



TUGAS AKHIR - DK184802

ANALISIS KETERKAITAN FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA  
HIJAU (RTH) PUBLIK DI SUB WILAYAH KOTA (SWK)  
KAREES, KOTA BANDUNG

NADHILA WAHYUNINGTYAS  
0821164000098

Dosen Pembimbing  
Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya  
2020







**TUGAS AKHIR – DK184802**

**ANALISIS KETERKAITAN FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
(RTH) PUBLIK DI SUB WILAYAH KOTA (SWK) KAREES, KOTA  
BANDUNG**

**NADHILA WAHYUNINGTYAS  
0821164000098**

**Dosen Pembimbing  
Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya  
2020**





**FINAL PROJECT – DK184802**

**RELATED FACTORS AFFECTING THE AVAILABILITY OF  
PUBLIC GREEN SPACE ANALYSIS IN SUB-REGION OF  
KAREES, BANDUNG CITY**

**NADHILA WAHYUNINGTYAS  
0821164000098**

**Advisor  
Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.**

**Departement of Urban and Regional Planning  
Faculty of Civil, Planning and Geo Engineering  
Sepuluh Nopember Institute of Technology  
Surabaya  
2020**



# LEMBAR PENGESAHAN

## ANALISIS KETERKAITAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI SUB WILAYAH KOTA KAREES, KOTA BANDUNG

### TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota  
Pada  
Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Sipil,  
Perencanaan, Dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

**NADHILA WAHYUNINGTYAS**

NRP. 08211640000098

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir



**Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.**

NIP. 196106181989031001



Surabaya, Agustus 2020





# **ANALISIS KETERKAITAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI SUB WILAYAH KOTA (SWK) KAREES, KOTA BANDUNG**

**Nama Mahasiswa** : Nadhila Wahyuningtyas  
**NRP** : 0821164000098  
**Departemen** : Perencanaan Wilayah dan Kota  
**Dosen Pembimbing** : Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

## **ABSTRAK**

*Bagi suatu perkotaan, ruang terbuka hijau (RTH) publik merupakan ruang alami yang sangat penting bagi suatu kota. RTH publik memiliki peran sebagai penanggulangan berbagai masalah lingkungan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat kota Bandung, terutama di subwilayah kota (SWK) Karees. SWK Karees merupakan bagian dari pusat pelayanan kota (PPK) Alun-Alun Bandung yang mendukung struktur hierarki pusat pelayanan kota Bandung. Berdasarkan RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, SWK Karees merupakan salah satu SWK di kota Bandung dengan luas RTH terkecil dibandingkan dengan SWK yang lainnya yaitu sebesar 26,77 ha. Selain itu, salah satu kecamatan di SWK Karees, yaitu Kecamatan Kiaracondong, merupakan kecamatan dengan luas RTH terkecil se-kota Bandung dengan luas RTH sebesar 0.18 ha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan permintaan pembangunan infrastruktur perkotaan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pembangunan RTH publik.*

*Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung melalui dua tahap. Tahap pertama adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung menggunakan teknik analisis konten yang didapat dari proses hasil wawancara dengan stakeholders terpilih. Kemudian, tahap kedua adalah merumuskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung menggunakan analisis regresi linear berganda data panel dengan pendekatan fixed effect model (FEM). Pada penelitian ini, digunakan data panel dengan rentan waktu pada tahun 2014 – 2018.*

*Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung yaitu jumlah penduduk, industri, permukiman, fasilitas umum, perdagangan dan jasa, kepadatan bangunan, dan harga lahan. Sedangkan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung adalah jumlah penduduk, kawasan industri, serta fasilitas umum.*

***Kata Kunci*** — *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, Pembangunan Infrastruktur, Jumlah Penduduk, Kawasan Industri, Fasilitas Umum.*

# **ANAYSIS OF RELATED FACTORS AFFECTING THE AVAILABILITY OF PUBLIC GREEN SPACE IN SUB-REGION OF KAREES, BANDUNG CITY**

**Student's Name** : Nadhila Wahyuningtyas  
**Student's Number** : 0821164000098  
**Departement** : Perencanaan Wilayah dan Kota  
**Advisor** : Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

## **ABSTRACT**

*Public green space is a natural space that has very important purpose for a city. Public green space has a role as a response to various environmental problems in order to maintain the balance of environmental quality for the society in Bandung, especially in sub-region of Karees. Sub-region of Karees is a part of Bandung City Service Center which supports the hierarchy structure of Bandung City Service Center. Based on the Bandung City Spacial Plan for 2011-2031, Karees is one of the sub-region in Bandung with the smallest amount of public green space compared to the other sub-region. Karees only has 26.77 ha of public green space. In addition, one of the sub-districts in Karees, named Kiaracandong, is the sub-districts with the smallest amount of public green space in Bandung. Kiaracandong only has 0.18 ha of public green space. It was caused by several factors, one of them is caused by high population causing high demand for urban infrastructure development but not balanced with the development of public green space.*

*This research aims to determine the related factors that affecting the availability of public green space in Karees, Bandung, through two phases. The first phase is to identify the factors that*

*affecting the availability of public green space in Karees, Bandung using content analysis technique obtained from the results of interviews with selected stakeholders. And the second phase is formulating the related factors that affecting the availability of public green space in Karees, Bandung using multiple linear regression analysis of panel data with a fixed effect model (FEM) approach. Panel data with time vulnerable in 2014-2018 is used in this research.*

*The results obtained from this research are the factors that affecting the availability of public green space in Karees, Bandung. These factors are population, industrial areas, residences, public facilities, trade and services, building density, and land prices. Meanwhile, main factors that affecting the availability of public green space in Karees, Bandung are population, industrial areas, and public facilities.*

**Keywords** — *Public Green Space, Infrastructure Development, Population, Industrial Areas, and Public Facilities.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. Dalam proses penulisan Tugas Akhir, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pencerahan, bantuan dan doa dari beberapa pihak lain sehingga Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Tebruka Hijau (RTH) Publik di Sub Wilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung”** ini dapat terselesaikan. Pada Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia dan segala kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
2. Orang tua, adik, dan keluarga yang telah memberi dorongan, semangat dan selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir
3. Bapak Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang selalu membantu dan memberi saran, kritik serta masukan dengan sabar bagi penulis
4. Ibu Belinda Ulfa Aulia, ST, M.Sc dan Bapak Prananda Navita, ST, M.Sc, Ph.D selaku dosen wali yang selalu membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS, Surabaya.
5. Astri Karunia Tamara, Iradha, Selia Faradisa MZ, dan Sri Oka Indriani sebagai sahabat penulis yang selalu menemani penulis pada dunia perkuliahan maupun kehidupan pribadi dari awal hingga akhir dalam suka maupun duka.

6. Thresya Laila Chrisdiana, Khresna Bayu, Jihan Nabila, dan Danuta Aldina sebagai sahabat melakukan kegiatan *unpredictable* penulis selama ini, selalu sabar menghadapi penulis ketika sedang senang maupun sedih selama penyusunan Tugas Akhir, dan saran-saran yang tidak pernah habis diberikan kepada penulis ketika penulis sedang kebingungan.
7. Muhammad Raihan, Ganida Bima, dan Catur Rizaldi yang selalu sabar mendengar keluhan penulis, memberi saran, serta selalu memberikan semangat kepada penulis bahwa penulis sanggup menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
8. Anak-anak bimbingan Pak Putu Rudy yang selalu membantu mengerjakan tugas akhir dan saling *support* satu sama lain.
9. Seluruh teman-teman Corazon yang sudah hadir di hidup penulis.
10. Seluruh teman-teman nongkrong penulis di Bandung yang tidak pernah berhenti mengajak penulis nongkrong dikala senang maupun sedih dan tidak pernah berhenti menghibur.

Bandung, Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.4 Ruang Lingkup .....	6
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi.....	9
1.4.3 Ruang Lingkup Pembahasan .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
1.7 Kerangka Berpikir .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	13
2.1.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	13
2.1.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	14
2.1.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	17
2.1.4 Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	17
2.1.5 Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan .....	18
2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Perkotaan .....	21



2.3 Penelitian Sebelumnya.....	28
2.4 Sintesa Tinjauan Pustaka .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Jenis Penelitian .....	38
3.3 Variable Penelitian.....	38
3.4 Populasi dan Sampel.....	39
3.4.1 Populasi .....	39
3.4.2 Sampel .....	40
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.6 Metode Analisis Data .....	43
3.6.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.....	44
3.6.2 Merumuskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.....	47
3.7 Tahapan Penelitian.....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Gambaran Umum.....	61
4.1.1 Wilayah Administrasi .....	61
4.1.2 Kependudukan .....	73
4.1.3 Penggunaan Lahan.....	73
4.1.4 Kepadatan Bangunan.....	89
4.1.5 Alih Fungsi Lahan .....	89
4.1.6 Harga Lahan .....	90
4.1.7 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.....	97
4.2 Analisis dan Pembahasan .....	105

4.2.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH Publik di SWK Karees, Kota Bandung.....	105
4.2.2 Merumuskan Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan RTH Publik di SWK Karees, Kota Bandung .....	168
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	193
5.1 Kesimpulan.....	193
5.2 Rekomendasi .....	194
DAFTAR PUSTAKA.....	195
LAMPIRAN .....	201

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya Tentang Faktor yang Mempengaruhi Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	29
Tabel 2.2	Sintesa Kajian Pustaka .....	35
Tabel 3.1	Variabel Penelitian .....	39
Tabel 3.2	<i>Stakeholders</i> Pada Penelitian.....	40
Tabel 3.3	Metode Analisis Data .....	43
Tabel 3.4	Penulisan Tabel di Microsoft Excel 2019.....	57
Tabel 4.1	Luas Setiap Kecamatan pada SWK Karees, Kota Bandung.....	69
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung.....	73
Tabel 4.3	Luas Penggunaan Lahan Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung.....	74
Tabel 4.4	Luas Permukiman Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung.....	75
Tabel 4.5	Luas Perdagangan dan Jasa Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung .....	77
Tabel 4.6	Luas Fasilitas Umum Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung.....	80
Tabel 4.7	Luas Kawasan Industri Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung.....	82
Tabel 4.8	Kepadatan Bangunan Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung.....	89
Tabel 4.9	Alih Fungsi Lahan Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung.....	90
Tabel 4.10	Harga Lahan Berdasarkan Rata-Rata Harga Dominan Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung .....	90
Tabel 4.11	Luas RTH Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung.....	97
Tabel 4.12	<i>Stakeholders</i> Terpilih.....	106

Tabel 4.13 Tabel Pengkodean dan Pengelompokkan Variable Berdasarkan Transkrip Wawancara.....	109
Tabel 4.14 Tabel Pemahaman Data Transkrip Wawancara.....	112
Tabel 4.15 Matriks Data Panel .....	172
Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	184

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian .....	7
Gambar 3.1	Langkah Penelitian Data Panel .....	56
Gambar 3.2	Tampilan Eviews Ver.10 .....	58
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Bandung.....	63
Gambar 4.2	Peta Pembagian Sub Wilayah Kota (SWK) di Kota Bandung .....	67
Gambar 4.3	Peta SWK Karees, Kota Bandung .....	71
Gambar 4.4	Perumahan dan Permukiman di SWK Karees .....	75
Gambar 4.5	Perdagangan dan Jasa di SWK Karees .....	77
Gambar 4.6	Fasilitas Umum di SWK Karees.....	81
Gambar 4.7	Kawasan Industri di SWK Karees .....	82
Gambar 4.8	Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2014 .....	83
Gambar 4.9	Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2015 .....	84
Gambar 4.10	Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2016 .....	85
Gambar 4.11	Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2017 .....	86
Gambar 4.12	Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2018 .....	87
Gambar 4.13	Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2014.....	91
Gambar 4.14	Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2015.....	92
Gambar 4.15	Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2016.....	93
Gambar 4.16	Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2017.....	94
Gambar 4.17	Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2018.....	95
Gambar 4.18	RTH Publik di SWK Karees.....	98
Gambar 4.19	Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2014.....	99
Gambar 4.20	Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2015.....	100
Gambar 4.21	Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2016.....	101
Gambar 4.22	Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2017 .....	102
Gambar 4.23	Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2018.....	103



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengertian ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan jenis kepemilikan, ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. (Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau). Ruang terbuka hijau publik terdiri dari taman kota, taman pemakaman umum, serta jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat terdiri dari kebun atau halaman dari rumah, gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami oleh tumbuhan. (UU RI Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Bagi suatu kota, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan ruang alami yang sangat penting bagi suatu kota yang memiliki peran sebagai penanggulangan berbagai masalah lingkungan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup. (Simonds, 1983). RTH di perkotaan memiliki fungsi penting terkait aspek ekologi, sosial budaya, dan estetika. Berdasarkan aspek ekologi, RTH memiliki fungsi dalam pengendali iklim, yaitu sebagai produsen oksigen, peredam kebisingan, dan *visual control* dengan menahan silau matahari atau pantulan sinar matahari. Selain itu, berdasarkan aspek

sosial budaya, RTH memiliki fungsi sebagai ruang komunikasi dan interaksi sosial bagi masyarakat, sarana rekreasi dan olahraga, serta sarana pendidikan. Adapun berdasarkan aspek estetika, RTH dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota, serta menstimulasi kreativitas dan produktivitas masyarakat kota. (Imansari dan Khadiyanta, 2015).

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang disebut sebagai kawasan strategis nasional, karena kota Bandung memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong perkembangan wilayah. Penduduk kota Bandung semakin bertambah dan berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di kota Bandung mencapai 2.490.622 jiwa, sedangkan pada tahun 2017, jumlah penduduk di kota Bandung bertambah menjadi 2.497.938 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Bandung antara tahun 2016 dengan 2017, penduduk kota Bandung mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,29%. (Kota Bandung Dalam Angka, 2018). Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh kota Bandung, yaitu semakin besarnya laju pertumbuhan penduduk di kota Bandung yang menyebabkan sektor ekonomi bergerak dengan cepat. Hal ini berdampak pada kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat dan menyebabkan perubahan peruntukan lahan. Alih fungsi pemanfaatan lahan yang semula diperuntukan untuk RTH menjadi lahan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat perkantoran, serta pusat permukiman merupakan penyebab sulitnya merealisasikan pemenuhan luasan RTH dari proporsi yang telah ditentukan. (Budiman, 2014). Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan fasilitas penunjang di perkotaan memiliki dampak buruk bagi keberadaan ruang terbuka hijau (RTH). Saat ini, luasan RTH yang terdapat di kota Bandung belum memenuhi ketentuan luas ideal Ruang Terbuka Hijau



Kawasan Perkotaan (RTHKP) yaitu minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau *public* dan 10% ruang terbuka hijau *private* dari luas kawasan. (Prihatin, 2015). Pada tahun 2018, Kota Bandung yang memiliki luas sebesar 16.770 ha hanya memiliki ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 12,21% atau sekitar 2.000 ha. Selama lima tahun terakhir, penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandung hanya 1% atau sekitar 0,2% setiap tahunnya. (Detik,2019).

Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, hirarki pusat pelayanan kota Bandung dibagi menjadi dua, yaitu pusat pelayanan kota (PPK) Alun-Alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-Alun memiliki beberapa subpusat pelayanan, salah satunya adalah subpusat pelayanan Maleer yang melayani subwilayah kota (SWK) Karees. Subwilayah kota (SWK) Karees meliputi Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Batununggal yang memiliki fungsi khusus sebagai kawasan perdagangan. Sesuai peruntukannya sebagai kawasan perdagangan, subwilayah kota (SWK) Karees dilengkapi oleh fasilitas penunjang seperti permukiman, peribadatan, bina sosial, olahraga atau rekreasi, pemerintahan, serta perbelanjaan atau jasa. Sehingga, kebutuhan lahan untuk fasilitas penunjang terus bertambah setiap waktunya. Hal ini menyebabkan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau terus berkurang untuk memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang tersebut. Akibatnya, sub wilayah kota (SWK) Karees menjadi subwilayah kota (SWK) yang ada di kota Bandung dengan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) paling kecil, yaitu sebesar 26,77 ha. Sementara itu, Kecamatan Kiaracondong yang merupakan salah satu kecamatan di subwilayah kota (SWK) Karees, menjadi kecamatan di kota Bandung yang memiliki luas ruang terbuka hijau (RTH) paling kecil, yaitu sebesar 0,18 ha. (RTRW Kota Bandung 2011-2031). Jumlah RTH yang kecil pada SWK Karees berdampak pada kurangnya ruang sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, RTH publik memiliki fungsi

untuk menyuplai oksigen secara pasif, sehingga jumlah RTH yang kecil akan mengurangi suplai oksigen bagi masyarakat SWK Karees.

Sehubungan dengan masalah ini, maka diperlukan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandung, terutama di subwilayah kota (SWK) Karees. Akan tetapi, dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di sebuah kota terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangan ruang terbuka hijau (RTH) (Prakosa,2019). Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangan ruang terbuka hijau (RTH). Namun, setiap kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penelitian untuk mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di SWK Karees, kota Bandung beserta keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dikarenakan anggaran pemerintah yang terbatas, keterkaitan antar faktor dirumuskan untuk mengetahui faktor utama dalam penyediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung sehingga dapat memudahkan pemerintah.

Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau publik (RTH) di subwilayah kota (SWK) Karees, kota Bandung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi dalam perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut fakta dan teori yang didapat, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH). Salah satu faktor yang mempengaruhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung adalah perkembangan lahan. Penggunaan lahan di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung terus bertambah sehingga menyebabkan alih fungsi lahan dan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami penurunan. Namun, hingga saat ini belum diketahui keterkaitan antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu ***Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung?***

## **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung. Sasaran penelitian untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.
2. Merumuskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.

## **1.4 Ruang Lingkup**

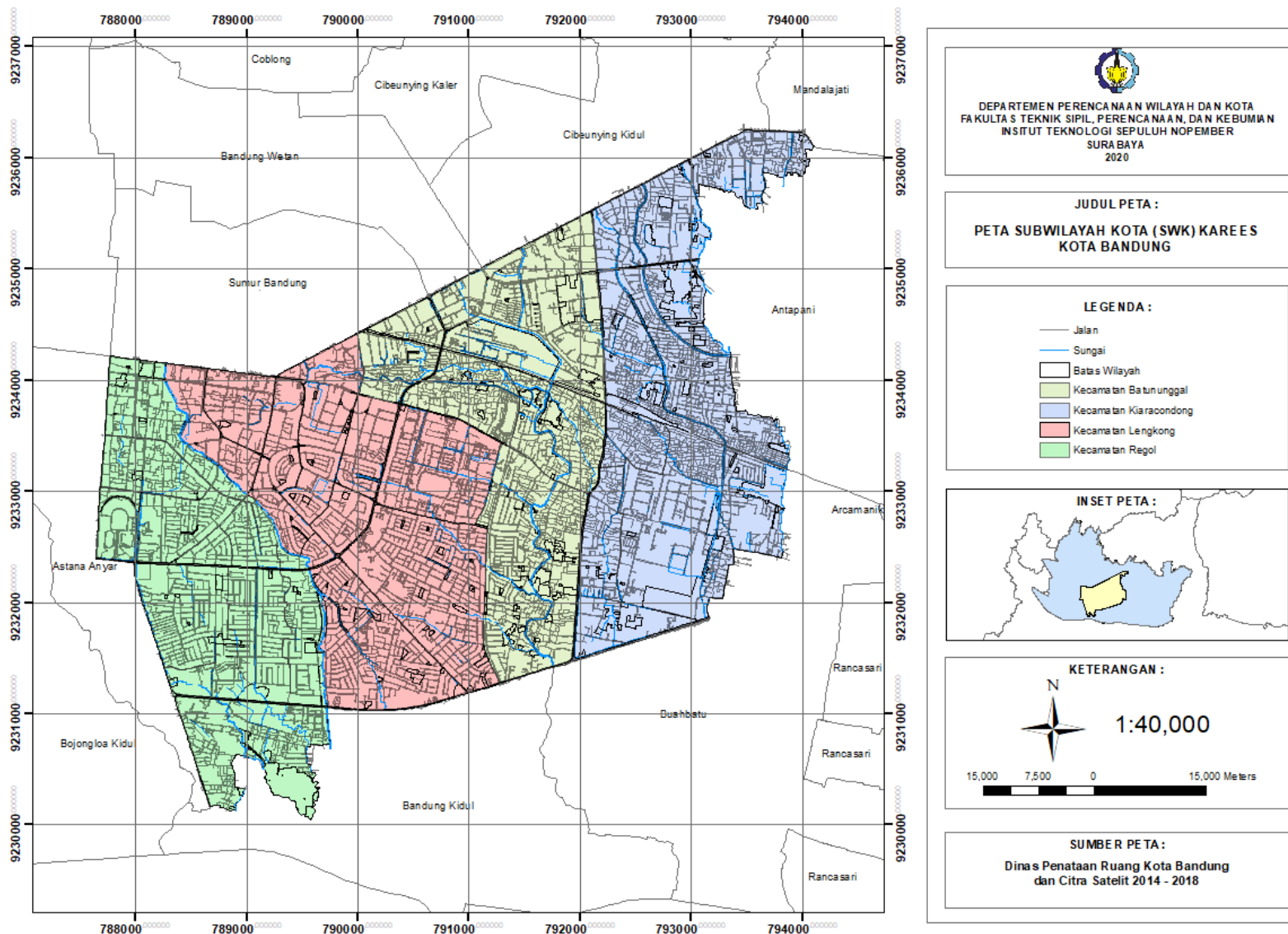
Ruang lingkup penelitian mengenai keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup pembahasan.

### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Subwilayah Kota (SWK) Karees terletak di Kota Bandung dan terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Regol, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Kiaracondong. Subwilayah Kota (SWK) Karees memiliki luas sebesar 2.103 ha dan berada di ketinggian 675-791 mpdl dengan kemiringan lahan sebesar 0-2%.

Subwilayah kota (SWK) Karees berbatasan dengan sub wilayah perkotaan lainnya yang ada di Kota Bandung, yaitu:

- Utara : SWK Cibeunying,
- Timur : SWK Arcamanik dan SWK Gedebage
- Barat : SWK Tegalega dan SWK Bojonegara
- Selatan : SWK Kordon



**Gambar 1.1** Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Sumber: RDTR Kota Bandung 2015-2035

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

### **1.4.2 Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang terdiri dari taman skala RT/RW, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan atau sungai serta faktor yang mempengaruhi ketersediaannya.

### **1.4.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini bersifat spasial yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari penelitian sebelumnya yang serupa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, kota Bandung.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan studi mengenai perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung.

### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan masukan bagi pemerintah kota Bandung yang dapat dijadikan pertimbangan dalam rencana penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Bandung.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan permasalahan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat

penelitian, ruang lingkup wilayah studi, sistematika pembahasan serta kerangka berpikir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dibahas mengenai kajian teori-teori mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas mengenai pendekatan dan tahapan penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

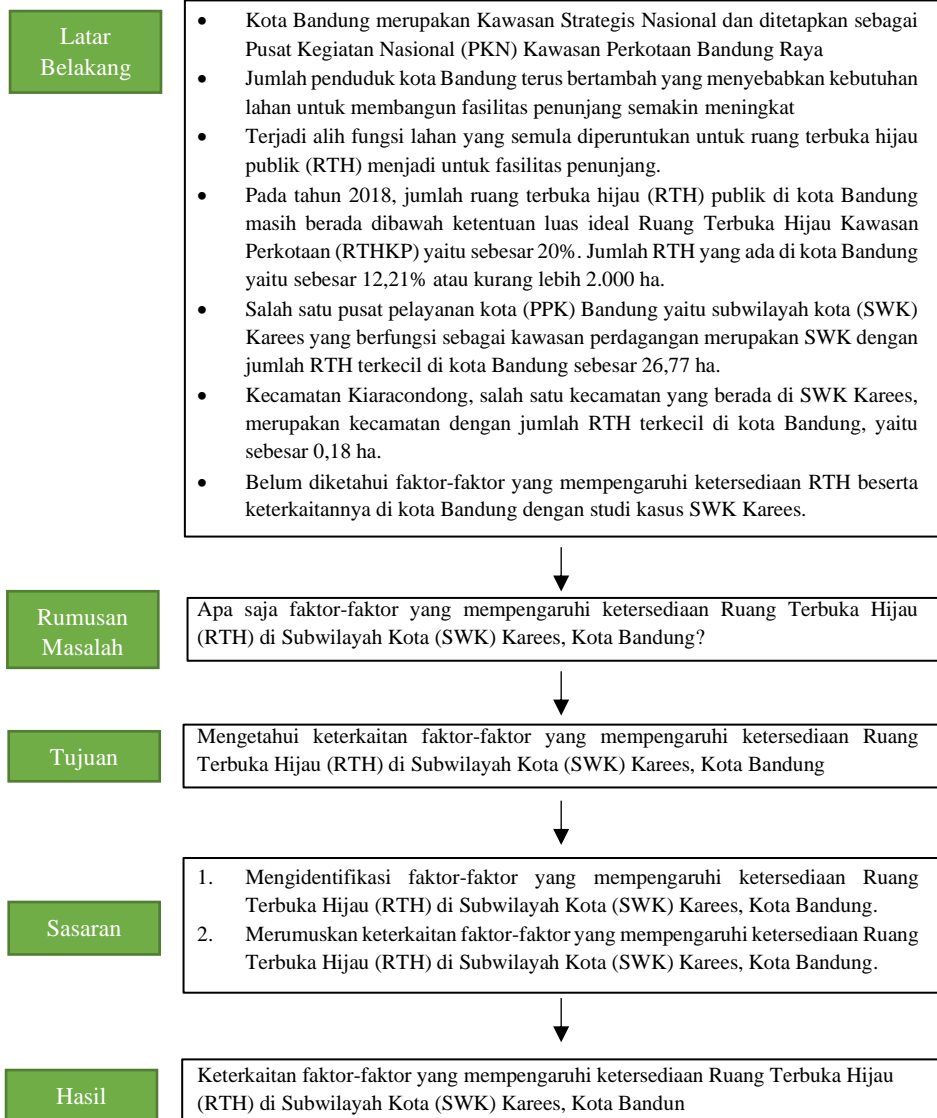
Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum kondisieksisting wilayah penelitian, serta hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.



## 1.7 Kerangka Berpikir



*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

##### **2.1.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Berdasarkan UU RI No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka atau *open space* suatu wilayah perkotaan yang memiliki tumbuhan, tanaman, dan vegetasi yang berguna untuk mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau (RTH) dalam kota tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. (Kusumawardhani, 2013 dalam Direktorat Jendral Departemen PU, Tahun 2006).

Ruang terbuka hijau (RTH) dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralkan udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan. (Shirvani, 1983).

Dalam konteks pemanfaatan, pengertian ruang terbuka hijau perkotaan mempunyai lingkup yang lebih luas dari sekedar

pengisian hijau tumbuh-tumbuhan, sehingga mencakup pula pengertian dalam bentuk pemanfaatan ruang terbuka bagi kegiatan masyarakat. (Salim dan Mutis, 2007). Selain itu, Ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Dirjentaru, 2008).

### **2.1.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau**

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, ruang terbuka hijau (RTH) memiliki beberapa fungsi tertentu bagi perkotaan. Fungsi ruang terbuka hijau (RTH) tersebut adalah:

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
  - Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
  - Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
  - Sebagai peneduh
  - Produsen oksigen
  - Penyerap air hujan
  - Penyedia habitat satwa
  - Penyerap polutan media udara, air dan tanah
  - Penahan angin.
2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
  - Fungsi sosial dan budaya:
    - Menggambarkan ekspresi budaya lokal
    - Merupakan media komunikasi warga kota
    - Tempat rekreasi
    - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam

- Fungsi ekonomi:
  - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur
  - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
- Fungsi estetika:
  - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro : halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro : lansekap kota secara keseluruhan
  - Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
  - Pembentuk faktor keindahan arsitektural
  - Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Sedangkan, berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan (RTHKP) menjelaskan fungsi dari RTHKP sebagai berikut:

1. Pengamanan ketersediaan kawasan lindung perkotaan
2. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
3. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
4. Pengendali tata air
5. Sarana estetika kota.

Hasni (2008) mengatakan bahwa fungsi ekologis ruang terbuka hijau (RTH) dibagi dalam empat macam, yaitu fungsi edhapis, fungsi hidro-orologis, fungsi kломatologis dan fungsi

higienis. Berikut ini adalah penjelasannya dari keempat fungsi tersebut:

1. Fungsi edhapis, yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya, dapat dipenuhi dengan penanaman pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah atau bijinya atau serangga yang hidup di daun-daunnya digemari oleh burung.
2. Fungsi hidro-orologis, adalah perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air, dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman penutup sehingga menimbulkan erosi, serta meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya serap air dari humus.
3. Fungsi klimatologis, adalah terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman. Untuk memiliki fungsi ini secara baik sebaiknya RTH memiliki cukup banyak pohon tahunan.
4. Fungsi higienis, adalah kemampuan RTH untuk mereduksi polutan baik di udara maupun di air, dengan cara memilih 17 tanaman yang memiliki kemampuan menyerap SO, NO, dan atau logam berat lainnya.

Menurut Fattah (2011), ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai ruang publik yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan kontak sosial, berteman, dan berkomunikasi. Sedangkan Lase (2017) mengatakan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran udara oleh kendaraan bermotor dengan cara menyerap polutan. Selain itu, peran ruang terbuka hijau (RTH) dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga kota adalah sebagai penyumbang ruang bernafas yang segar, sebagai paru-paru kota, sumber air dalam tanah, mencegah

erosi, keindahan dan kehidupan satwa, menciptakan iklim, serta sebagai sumber pendidikan (Simonds, 1983).

Berdasarkan fungsi-fungsi ruang terbuka hijau (RTH) diatas, dapat disimpulkan bawah ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian penting untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat di suatu perkotaan, baik dari aspek sosial, ekologis, ekonomi, dan estetika.

### **2.1.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Berdasarkan, Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan (RTHKP), manfaat ruang terbuka hijau (RTH) adalah:

1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
6. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
7. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
8. Memperbaiki iklim mikro
9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

### **2.1.4 Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008, secara fisik, ruang terbuka hijau (RTH) dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alami  
Ruang terbuka hijau (RTH) alami terdiri dari habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional.
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Non Alami atau Binaan

Ruang terbuka hijau (RTH) non alami atau binaan terdiri dari taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan.

Selain itu, secara struktur ruang, ruang terbuka hijau (RTH) dibagi menjadi dua yaitu:

1. Mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar)
2. Mengikuti pola planologis (mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan).

Sedangkan menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berdasarkan jenis kepemilikannya, ruang terbuka hijau (RTH) dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau (RTH) publik terdiri dari taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat

Ruang terbuka hijau (RTH) privat adalah ruang terbuka hijau (RTH) milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008). Ruang terbuka hijau (RTH) privat terdiri dari kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

### **2.1.5 Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan**

Suatu kota merupakan pusat kegiatan aktivitas ekonomi dan selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dengan adanya perkembangan kota tersebut, maka banyak perubahan yang



terjadi yaitu perubahan penggunaan lahan dan perubahan terkait sosial ekonomi seperti jumlah penduduk, fasilitas dan pelayanan sosial, migrasi, dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya suatu kota, maka pertumbuhan penduduk di kota tersebut akan ikut berkembang. (Wahidah, 2013).

Pertumbuhan penduduk yang tumbuh dan berkembang semakin tinggi setiap tahunnya memiliki dampak bagi perkembangan pembangunan fisik kota. Perkembangan pembangunan fisik kota yang pesat menyebabkan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) sangat penting untuk menciptakan keseimbangan lingkungan perkotaan. Namun, jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dengan tinggi memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan lahan kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan membutuhkan perhatian khusus. (Miranti, 2014).

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan suatu usaha untuk merencanakan jumlah penggunaan lahan guna keperluan tertentu dan berada di lokasi yang tepat. Rencana tata ruang mengatur pemanfaatan dan letak elemen-elemen ruang kota yaitu pusat pelayanan, industri, permukiman dan ruang terbuka hijau (RTH) serta jaringan jalan untuk mencapai tujuan perencanaan kota. Tujuan perencanaan tata ruang kota adalah menyediakan ruang yang cukup untuk setiap jenis penggunaan lahan secara efisien untuk kenyamanan bagi lingkungan kegiatan masyarakat di perkotaan (Sinulingga,2005). Penataan ruang sangat dibutuhkan oleh suatu kota, terutama terkait penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) publik atau *open spaces* yang berguna untuk mengatasi kondisi lingkungan perkotaan. (Miranti,2014).

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi salah satu harapan di kawasan perkotaan untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan perkotaan. Namun pada kenyataannya, ruang terbuka hijau (RTH) dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis sehingga fungsi ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan tidak berjalan dengan baik. (Rahman,2016). Sehingga, penataan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan secara berlebihan serta mengatasi dampak ekologis dari berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam pada lingkungan perkotaan. (Shani, 2015).

Ruang terbuka hijau (RTH) publik sebagai ruang alami merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu kota berkaitan dengan penanggulangan masalah lingkungan. RTH dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat kota yaitu: sebagai penyumbang ruang bernafas yang segar, paru-paru kota, sumber air tanah, mencegah erosi, keindahan, dan kehidupan satwa, menciptakan iklim, serta sebagai sumber pendidikan. (Prakosa,2019).

Ruang terbuka hijau (RTH) publik merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau (RTH) yang harus ada di wilayah perkotaan. Kerimbunan tanaman yang ada di ruang terbuka hijau (RTH) publik dapat menurunkan suhu setempat dan menaikkan kelembaban udara. Pohon dan tanaman dalam proses evaporasi serta fungsinya sebagai absorban atau penyerap radiasi memerlukan panas sehingga akan menurunkan suhu lingkungan wilayah perkotaan yang tinggi karena kesibukan aktivitas di dalamnya. (Miranti,2014). Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) publik juga memiliki fungsi sosial bagi wilayah perkotaan. Ruang terbuka hijau (RTH) publik dapat menjadi ruang keluarga yang

digunakan untuk keperluan pribadi, menjadi ruang untuk bergaul atau bersosialisasi, menjadi tempat untuk pertemuan warga, serta dapat menjadi daerah ruang terbuka utama yang digunakan untuk kegiatan bersama seluruh masyarakat. (Utami, 2011). Ruang terbuka hijau (RTH) publik juga memiliki manfaat sebagai sarana rekreasi publik secara aktif maupun pasif (Miranti, 2014).

## **2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Perkotaan**

Prabowoningsih (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta)” mengatakan bahwa Dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

### **1. Ketersediaan anggaran**

Faktor ketersediaan anggaran dapat dilihat dari data anggaran yang dikhususkan untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu kota.

### **2. Alokasi ruang terbuka hijau (RTH) dalam perencanaan tata ruang**

Faktor alokasi ruang terbuka hijau (RTH) dalam perencanaan tata ruang dapat dilihat dari aturan KDH pada masing-masing penggunaan lahan di suatu kota.

### **3. Implementasi rencana kerja terkait ruang terbuka hijau (RTH)**

Faktor ini berkaitan dengan program- program terkait ruang terbuka hijau di suatu kota, baik pembangunan maupun pendekatan dengan masyarakat. Dalam mengimplementasi rencana kerja terkait RTH, dinas yang bersangkutan berperan dalam kegiatan teknis, sehingga rencana kerja penyediaan RTH akan dimulai dari Bappeda dan pemerintah kota yang mengusulkan taman yang akan dibangun.

4. Penghargaan dalam program penghijauan  
Penghargaan dalam program penghijauan akan diberikan kepada suatu kota yang telah melaksanakan program dengan baik di setiap dominasi penggunaan lahan. Penghargaan terfokuskan untuk ruang terbuka hijau (RTH) publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota tersebut.
5. Pelaksanaan program  
Pelaksanaan program terkait penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) suatu kota dilakukan di beberapa zona perkotaan dengan program pembangunan jalur hijau, taman RT, taman kelurahan, maupun taman kota.
6. Partisipasi masyarakat  
Partisipasi masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota dapat berupa ikut melakukan penghijauan di taman sekitar tempat tinggal, menjaga keberlanjutan taman dan hutan kota, melakukan pengaduan apabila terjadi kerusakan pada ruang terbuka hijau (RTH), serta melakukan penghijauan dengan penyediaan tanaman dalam pot, pohon, rumput bagi pelaku usaha di kawasan perdagangan dan jasa.
7. Pengaruh tokoh masyarakat  
Tokoh masyarakat merupakan *stakeholder* yang terkait dengan penyediaan RTH di setiap zona dominasi penggunaan lahan. Pada kondisi di lapangan, tokoh masyarakat hanya pada zona perumahan, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang berperan sebagai wakil dari masyarakat yang memberikan usul kepada Lurah dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Di zona industri dan perdagangan jasa tidak ada tokoh masyarakat karena sifat RTH yang berada di dalam pabrik dan pertokoan sehingga tidak ada intervensi dari pihak luar. Untuk RTH di zona perlindungan

setempat dan ruang terbuka bersifat publik sehingga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.

8. Keberadaan Komunitas Hijau

Keberadaan komunitas hijau dapat mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu kota karena komunitas hijau memiliki peran dalam menjaga dan merawat ruang terbuka hijau (RTH) publik seperti taman kota dengan cara menanam bibit atau melakukan kegiatan bersih-bersih.

9. Daya serap pohon terhadap  $CO_2$

Daya serap pohon terhadap  $CO_2$  yang ada di taman kota bergantung pada jenis pohon yang tersedia, seperti vegetasi pohon memiliki daya serap lebih tinggi dibandingkan dengan semak, rumput, dan sawah.

10. Ketersediaan Lahan

Faktor ketersediaan lahan didapatkan dari data lahan yang diperuntukkan untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di setiap zona dominasi penggunaan lahan di suatu kota, dimana setiap dominasi penggunaan lahan di hitung dengan persentase aturan KDH yang seharusnya diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau (RTH)

11. Nilai Lahan

Nilai lahan berpengaruh dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Semakin rendah nilai suatu lahan maka akan semakin mudah untuk dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik oleh pemerintah.

12. Pengawasan Pengendalian Tata Guna Lahan

Bentuk pengawasan pengendalian tata guna lahan di suatu kota dapat berupa tersedianya dokumen AMDAL, serta pengawasan melalui IMB atau IUP (Izin Usaha Perdagangan). Apabila terjadi alih fungsi lahan dapat dilakukan pembebasan lahan seperti dari

sempadan sungai yang nantinya akan direlokasi menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Sedangkan menurut Kurnia (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kurangnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Depok”, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) adalah

1. Perencanaan pembangunan

Perencanaan merupakan awal dari seluruh kegiatan yang bertujuan agar mencapai sasaran dengan efisien dan efektif, selain itu perencanaan juga sebagai alat agar kegiatan yang dijalankan, berjalan sesuai dengan pedoman dan arahan. Perencanaan pembangunan menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi kurangnya ketersediaan RTH dikarenakan dalam perencanaan terdapat banyak kepentingan yang ditampung di dalamnya sehingga dapat menggeser kepentingan RTH yang tidak dianggap sebagai prioritas oleh beberapa pihak.

2. Implementasi rencana kerja

Implementasi dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas-Dinas yang terkait dengan RTH, seperti Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup. Implementasi merupakan suatu inti dari sebuah perencanaan, dan implementasi rencana kerja harus berpedoman pada perencanaan. Dalam implementasi rencana kerja, ditemui hambatan-hambatan yang mempengaruhi keberhasilan dari program yang dijalankan.

3. Keterbatasan anggaran

Anggaran menjadi salah satu masalah dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan. Untuk menyediakan sebuah taman di suatu kota, pemerintah memerlukan biaya, namun biaya tersebut kurang memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan

sebuah taman kota, karena terhambat alokasi biaya untuk penyediaan RTH yang kurang.

4. Lemahnya pengawasan

Lemahnya pengawasan dikarenakan beberapa hal, seperti jumlah SDM yang terbatas. Pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif, karena terdapat wilayah yang tidak terjangkau, akibat keterbatasan sumber daya manusia.

5. Keterbatasan lahan

Daerah perkotaan mempunyai kondisi penggunaan lahan yang dinamis, sehingga perlu terus dipantau perkembangannya, karena seringkali pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat. Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan.

Menurut Lizya (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan” faktor-faktor yang mempengaruhi ruang terbuka hijau (RTH) publik di suatu kota adalah sebagai berikut :

1. Eksplorasi data variable

Eksplorasi data variable dilakukan dengan menghitung selisih luasan ruang terbuka hijau (RTH) eksisting dengan luas ruang terbuka hijau (RTH) yang dibutuhkan berdasarkan standar ideal.

2. Jumlah penambahan penduduk

Pertambahan penduduk yang meningkat pesat menyebabkan densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali. Selain itu, dengan adanya penambahan penduduk yang pesat juga berdampak bagi peningkatan kebutuhan ruang terbangun untuk mengakomodasi kepentingannya.

3. Kepadatan penduduk

Semakin padat penduduk di satu kota maka akan semakin meningkatnya permintaan ruang untuk permukiman dan lahan terbangun yang mengabaikan pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini mengakibatkan merosotnya kuantitas dan kualitas lingkungan akibat kurangnya penyediaan terhadap ruang terbuka hijau (RTH)

4. Ketersediaan fasilitas ekonomi, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas kesehatan

Menjamurnya jumlah fasilitas ekonomi, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas kesehatan disebabkan oleh tingginya kegiatan di kawasan perkotaan sebagai penunjang kehidupan.

5. Alokasi ruang terbuka hijau (RTH) dalam RTRW

Alokasi ruang terbuka hijau (RTH) merupakan penentuan banyaknya ruang terbuka hijau (RTH) yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) pada suatu kota.

6. Ketersediaan areal hijau

Ketersediaan areal hijau dapat berupa lahan kosong yang dapat dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik.

Sitorus (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Jakarta Selatan” mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan luas terbuka hijau, yaitu:

1. Alokasi ruang terbuka hijau (RTH) dalam RTRW

2. Pertumbuhan kepadatan penduduk

Peningkatan kepadatan penduduk disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan penambahan luas wilayah suatu kota. Padatnya penduduk suatu kota akan meningkatkan pembangunan fisik seperti pembangunan fasilitas perkotaan, perumahan, gedung-gedung, dan sarana transportasi



3. Jumlah pendatang dari kota lain

Pendatang yang berasal dari kota lain menuju suatu kota disebabkan karena adanya proses urbanisasi. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk perumahan akan meningkat pesat.

4. Ketersediaan fasilitas Pendidikan, fasilitas ekonomi, dan fasilitas kesehatan,

Prakosa (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun” mengatakan bahwa kurang tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan juga disebabkan oleh faktor kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan dibagi menjadi dua jenis yaitu milik masyarakat dan milik pemerintah. Banyaknya lahan milik masyarakat mengakibatkan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) berkurang, sedangkan dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dibutuhkan juga lahan milik pemerintah. Konversi atau alih fungsi lahan juga menjadi faktor penyebab kurang tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan atau penggunaan yang menyebabkan alih fungsi lahan pada luasan lahan untuk RTH adalah permukiman, perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum, dan perkantoran. Selain itu, kepadatan bangunan yang memiliki intensitas tinggi mengakibatkan pemerintah sulit untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan karena lahan yang tersedia sudah terbangun dan tidak dapat dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Rahman (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Jumlah Penduduk di Kota Solo”, mengatakan bahwa secara kuantitatif, ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan berkurang karena adanya perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan terjadi akibat masifnya

pembangunan fasilitas umum yang terjadi karena pesatnya pertumbuhan penduduk di suatu kota.

### **2.3 Penelitian Sebelumnya**

Dalam menyusun penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan. Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya Tentang Faktor yang Mempengaruhi Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil
1	Prabowoningsih (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta)	Analisis AHP digunakan untuk mengetahui tingkatan faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau. Hasil penelitian menunjukkan setiap dominasi penggunaan lahan industri, perumahan, perdagangan jasa, perlindungan setempat, dan ruang terbuka memiliki faktor prioritas yang berbedabeda. Faktor utama yang paling berpengaruh di zona industri adalah pengawasan pengendalian tata guna lahan, zona perumahan dan perdagangan jasa adalah alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang, zona perlindungan setempat adalah ketersediaan anggaran, sedangkan zona ruang terbuka adalah daya serap pohon terhadap CO <sub>2</sub>
2	Kurnia (2015)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kurangnya	Dalam meningkatkan kualitas hidup Kota Depok perlu peningkatan luas RTH.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil
		Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Depok	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terstruktur yang dilakukan pada dinas-dinas yang terkait, faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab kurang tersedianya RTH Publik adalah faktor keterbatasan lahan, faktor lemahnya pengawasan, faktor keterbatasan dana, faktor fokus perencanaan, faktor implementasi perencanaan, faktor peraturan yang menjadi acuan, faktor kinerja kelembagaan.
3	Lizya (2017)	Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan	Ketersediaan RTH publik yang masih luasnya terbatas belum dapat memenuhi kebutuhan jumlah penduduk, sementara Kota Balikpapan terus berkembang setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyediaan RTH publik di Kota Balikpapan yaitu, pertumbuhan pertambahan luas

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil
			<p>fasilitas kesehatan dan ketersediaan areal hijau. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan RTH publik di Kota Balikpapan dapat dikurangi dengan arahan penyediaan dalam penelitian ini meliputi pembangunan RTH publik pada fasum-fasos minimal 20% KDH, pengembangan RTH publik berbentuk vertikal, pemerataan jumlah dan luas RTH publik, serta penetapan kawasan RTH publik.</p>
4	Sitorus (2011)	<p>Analisis Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Jakarta Selatan</p>	<p>Meningkatnya kegiatan pembangunan di Jakarta Selatan menyebabkan perubahan penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Lahan yang dialokasikan untuk ruang terbuka hijau (RTH) dalam RTRW Kota Jakarta menjadi faktor utama yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Selain itu, faktor lainnya adalah pertumbuhan pembangunan yang tinggi</p>

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil
			pada fasilitas penunjang kehidupan dan kepadatan penduduk.

*Sumber: Penulis, 2019*

## 2.4 Sintesa Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa referensi diatas, indikator-indikator yang muncul terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di perkotaan adalah sebagai berikut

### 1. Kependudukan

Indikator kependudukan disebut dalam penelitian “Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan” oleh Lizya (2015) dan “Analisis Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Jakarta Selatan” oleh Sitorus (2011). Peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk akan meningkatkan pembangunan fisik seperti pembangunan fasilitas perkotaan, perumahan, gedung-gedung, dan sarana transportasi. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang terbangun secara pesat dan tidak terkendali sehingga terjadi perubahan fungsi lahan. Variable yang terkait dengan kependudukan adalah jumlah penduduk.

### 2. Jenis Penggunaan Lahan

Indikator jenis penggunaan lahan disebut dalam penelitian “Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan” oleh Lizya (2015), “Analisis Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Jakarta Selatan” oleh Sitorus (2011), dan “Kajian Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun” oleh Prakosa (2019). Karena menjamurnya jumlah fasilitas penunjang kehidupan perkotaan disebabkan oleh tingginya kegiatan di kawasan perkotaan sebagai penunjang kehidupan. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan bagi ruang terbuka hijau (RTH) semakin berkurang. Jenis-jenis penggunaan lahan yang merupakan variable dari indikator penggunaan lahan

adalah permukiman, perdagangan dan jasa, industri, serta fasilitas umum.

3. Tingkat Alih Fungsi Lahan

Indikator alih fungsi lahan disebut dalam penelitian “Kajian Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun” oleh Prakosa (2019) dan “Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Jumlah Penduduk di Kota Solo” oleh Rahman (2016). Tingkat alih fungsi lahan terjadi akibat masifnya pembangunan fasilitas umum karena pesatnya pertumbuhan penduduk di suatu kota. Pembangunan fasilitas umum yang masif menyebabkan kebutuhan lahan meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan alih fungsi lahan yang semula diperuntukan untuk RTH publik menjadi lahan terbangun yang terdiri dari permukiman, perdagangan dan jasa, industri, serta fasilitas umum. Variable yang terkait dengan tingkat alih fungsi lahan adalah tingkat alih fungsi lahan.

4. Kepadatan Bangunan

Indikator alih fungsi lahan disebut dalam penelitian “Kajian Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun” oleh Prakosa (2019). Kepadatan bangunan yang memiliki intensitas tinggi mengakibatkan pemerintah sulit untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan karena lahan yang tersedia sudah terbangun dan tidak dapat dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Variable yang terkait dengan kepadatan bangunan adalah kepadatan bangunan

5. Harga Lahan

Indikator alih fungsi lahan disebut dalam penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta)” oleh Prabowoningsih (2018). Dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik, pemerintah membutuhkan



lahan yang berstatus milik pemerintah. Sehingga harga lahan berpengaruh dalam penyediaan ruang terbuka hijau karena semakin rendah nilai suatu lahan maka akan semakin mudah untuk dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik oleh pemerintah. Variable yang terkait dengan harga lahan adalah harga lahan.

Indikator beserta variable faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Sintesa Kajian Pustaka**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Variable</b>
<b>Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.</b>	Kependudukan	1. Jumlah penduduk
	Jenis Penggunaan Lahan	1. Permukiman 2. Perdagangan Dan Jasa 3. Industri 4. Fasilitas Umum
	Tingkat Alih Fungsi Lahan	Tingkat Alih Fungsi Lahan
	Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan
	Harga Lahan	Harga Lahan

*Sumber: Penulis, 2019*

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif-kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. (Rahmat,2009).

Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, dibutuhkan populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan analisis data yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan. (Wahidmurni,2017).

Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif dilakukan menggunakan *content analysis* dan pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. *Content analysis* digunakan untuk menguji variable yang telah diperoleh dari kajian pustaka untuk memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian. Sedangkan analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar faktor dan seberapa pengaruhnya faktor-

faktor tersebut terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik. Setelah itu, akan dilakukan perumusan model matematis mengenai pengaruh variable terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Sub Wilayah Kota Karees, Kota Bandung.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang menggunakan tindakan pengumpulan data untuk menentukan adanya hubungan atau kaitan antara dua atau lebih variable. Gay dalam Sukardi (2008) mengatakan bahwa penelitian korelasional merupakan salah satu bagian penelitian *ex-postfacto* karena peneliti tidak dapat memanipulasi data terkait variable yang ada dan akan langsung mencari keberadaan hubungan serta tingkat hubungan variable dalam koefisien korelasi. Nazir dalam Sukardi (2008) mengatakan bahwa penelitian korelasional termasuk dalam penelitian deskripsi karena penelitian korelasional menggambarkan kondisi yang sudah terjadi dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel.

Dalam penelitian ini, penelitian korelasional digunakan untuk menentukan rumus model matematis dan menentukan pengaruh variable terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Sub Wilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.

### **3.3 Variable Penelitian**

Pada penelitian ini, variable penelitian didapat dari sintesa kajian pustaka dari para ahli maupun dari penelitian sebelumnya. Tahap selanjutnya, variable tersebut akan diuji dalam tahap analisis data dengan metode yang telah ditentukan untuk dianalisis mengenai korelasinya terkait ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Sub Wilayah Kota Karees, Kota Bandung. Variable penelitian bersifat

spasial, yaitu mengikuti perkembangan lahan. Variable penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Variabel Penelitian**

No	Variable	Definisi Operasional
1	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk di wilayah penelitian
2	Permukiman	Luas zona permukiman di wilayah penelitian
3	Perdagangan dan Jasa	Luas zona perdagangan dan jasa di wilayah penelitian
4	Industri	Luas zona industri di wilayah penelitian
5	Fasilitas Umum	Luas zona fasilitas umum di wilayah penelitian
6	Tingkat Alih Fungsi Lahan	Luas perubahan lahan yang diperuntukan untuk RTH publik menjadi daerah terbangun
7	Kepadatan Bangunan	Jumlah total luas bangunan per satuan luas di wilayah penelitian
8	Harga Lahan	Harga lahan sesuai data NJOP di wilayah penelitian.

*Sumber: Penulis, 2019*

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya dapat berupa orang, namun juga dapat berupa obyek atau benda-benda

alam yang lain. (Sugiyono,2010). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah *stakeholders* yang memiliki hubungan atau berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung.

### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiyono,2010). Untuk menghemat biaya dan waktu, diperlukan sampel *stakeholders* yang telah ditentukan. Penentuan sampel *stakeholders* dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling technique* atau teknik purposif sampling.

*Purposive sampling technique* atau teknik purposif sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto,2006). Teknik purposif sampling memiliki tujuan untuk memilih responden yang bersifat heterogen secara langsung yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian sasaran penelitian. (Prakosa,2019). Teknik purposif sampling biasanya dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil sampel dalam jumlah besar.

Sample *stakeholders* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Stakeholders Pada Penelitian**

<i>Stakeholders</i>	Alasan Pemilihan
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung</b>	Sebagai pihak yang melakukan pemantauan serta melakukan evaluasi dan pelaporan dalam lingkup penelitian dan pengembangan kota Bandung

<i>Stakeholders</i>	<i>Alasan Pemilihan</i>
<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung</b>	<p>1. Sebagai pihak yang merumuskan dan menjalankan kebijakan lingkup Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan</p> <p>2. Sebagai pihak yang melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan</p>
<b>Dinas Penataan Ruang Kota Bandung</b>	Sebagai pihak yang melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang di Kota Bandung
<b>Dosen Planologi Universitas Islam Bandung</b>	Sebagai pihak akademis yang memahami perencanaan tata ruang
<b>Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung</b>	Sebagai pihak akademis yang memahami perencanaan tata ruang.

*Sumber: Penulis, 2019*

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey primer dan metode survey sekunder.

#### 1. Survey Primer

Survey primer adalah metode pencarian data dan informasi yang dilakukan secara langsung melalui responden di lapangan. Survey primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuisioner.

- Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui pengamatan langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode ini dilakukan dengan mengambil gambar kondisi eksisting selama pengamatan lapangan yang dilakukan dalam beberapa hari. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, tabel, peta dan gambar

- Wawancara

Wawancara dilakukan kepada *stakeholders* dengan menggunakan form wawancara. Wawancara bertujuan untuk membantu melengkapi pengumpulan data yang tidak dapat diperoleh melalui hasil observasi secara langsung pada wilayah penelitian. Form wawancara dibutuhkan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Sub Wilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.

#### 2. Survey Sekunder

Survei sekunder adalah metode pengumpulan data dari instansi pemerintah terkait. Hasil yang didapat dari data sekunder ini berupa uraian, data angka, atau peta mengenai keadaan wilayah



penelitian. Selain itu survei sekunder juga didapat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

### 3.6 Metode Analisis Data

Pada penilitan ini, metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* dan analisis regresi linear berganda data panel. *Content analysis* merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif (Holsti dalam Ibrahim, 2009). Pada *content analysis*, digunakan teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. (Subrayogo, 2001). *Content analysis* digunakan untuk menguji variable yang telah diperoleh dari kajian pustaka untuk memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian.

Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval (Narimawati,2008). Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar faktor dan seberapa pengaruhnya faktor-faktor tersebut terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik.

**Tabel 3.3 Metode Analisis Data**

Sasaran	Input	Teknik Analisis	Output
<b>Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan</b>	Variable yang telah disusun berdasarkan sintesa pustaka	<i>Content Analysis</i>	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang

<b>Sasaran</b>	<b><i>Input</i></b>	<b>Teknik Analisis</b>	<b><i>Output</i></b>
<b>Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.</b>			Terbuka Hijau (RTH) Publik
<b>Merumuskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.</b>	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Analisis Regresi Linear Berganda Data Panel	Model Matematis tentang Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

*Sumber: Penulis, 2019*

### **3.6.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.**

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung, teknik yang digunakan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif (Holsti dalam Ibrahim, 2009). *Content analysis* digunakan untuk menguji variable yang telah diperoleh dari kajian pustaka untuk memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian. Pada *content analysis*, digunakan teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. (Subrayogo, 2001). Interpretasi yang didapat akan dijelaskan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah fenomena yang bersifat actual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan kuat. (Nawawi,2003).

Langkah-langkah dalam proses mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH di SWK Karees, Kota Bandung menggunakan *content analysis* adalah sebagai berikut:

1. Menentukan indikator dan variable untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di perkotaan.
2. Menentukan dan menetapkan sample *stakeholders* menggunakan teknik *purposive sampling*.
3. Melakukan proses wawancara dengan *stakeholders* yang akan menjadi responden menggunakan teknik wawancara *in-depth interview*. Teknik wawancara *In-depth interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti

dengan *stakeholders*, dengan atau tanpa menggunakan pedoman dimana peneliti dan *stakeholders* terlibat dalam kehidupan sosial yang *relative* lama (Sutopo, 2006). Proses wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur. Metode wawancara semi terstruktur dilakukan peneliti dengan cara menyusun form pertanyaan terlebih dahulu, namun pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kondisi saat proses wawancara berlangsung.

4. Melakukan transkrip wawancara
5. Meng-*input* transkrip wawancara sebagai data yang akan diolah menggunakan *content analysis* dengan melakukan *symbol coding* berdasarkan variable yang telah didapat. Proses *symbol coding* dilakukan dengan cara mengamati penjelasan dari masing-masing responden berdasarkan kutipan percakapan wawancara.
6. Menghitung jumlah kode yang muncul kemudian membandingkan hasil *coding* dari *stakeholders* dengan cara tabulasi
7. Menyimpulkan hasil coding dengan melihat hasil coding. Jika variable sering disebutkan oleh *stakeholders* maka variable tersebut mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, Kota Bandung.
8. Pengambilan keputusan dengan cara menyimpulkan tergantung dari sisi *stakeholders*, karena setiap *stakeholders* memiliki kepentingan masing-masing sehingga pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan kebijakan dengan *stakeholders*.

### **3.6.2 Merumuskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung.**

Untuk menentukan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Sub Wilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung, digunakan analisis regresi linear berganda data panel. Menurut Widarjono (2009), data panel adalah gabungan antara data runtut waktu atau *time series* dan data silang atau *cross section* dimana data *cross section* diukur pada waktu yang berbeda. Analisis regresi linear berganda adalah suatu metode yang sederhana yang dapat digunakan untuk menginvestigasi hubungan fungsional antar variable yang diwujudkan dalam bentuk matematis. (Nawari, 2010). Sedangkan menurut Santoso (2010), analisis regresi linear berganda adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah model atau persamaan yang menjelaskan hubungan antar *variable independent* atau variable bebas dengan *variable dependent* atau variable terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis regresi linear berganda data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross section*.

Analisis regresi linear berganda data panel digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) terhadap variable terikat ( $Y$ ) yang dituangkan dalam bentuk persamaan dengan melihat perubahan data berdasarkan *time series* dan *cross section*. Persamaan model analisis regresi linear berganda data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1ti} + \beta_2 X_{2ti} + \dots + \beta_n X_{nti} + e_{it}$$

Keterangan :

- $Y_{it}$  = variable terikat (*dependent*)
- $\alpha$  = konstanta
- $\beta_1$  = koefisien regresi
- $X_{1ti}$  = variable bebas (*independent*)
- $t$  = periode ke- $t$
- $i$  = individu ke- $i$
- $e_{it}$  = error *cross section* ke- $I$  dan waktu ke- $t$

Pada penelitian ini, *variable* yang digunakan memiliki satuan yang berbeda-beda sehingga diperlukan model log-log pada hasil regresi linier berganda. Model log-log bertujuan untuk menyamakan satuan *variable* yang berbeda-beda menjadi bentuk persen. Persamaan model log-log analisis regresi linear berganda data panel adalah sebagai berikut:

$$\log Y_{it} = \alpha + \beta_1 \log X_{1ti} + \beta_2 \log X_{2ti} + \dots + \beta_n \log X_{nti} + e_{it}$$

- $Y_{it}$  = variable terikat (*dependent*)
- $\alpha$  = konstanta
- $\beta_1$  = koefisien regresi
- $X_{1ti}$  = variable bebas (*independent*)
- $t$  = periode ke- $t$
- $i$  = individu ke- $i$
- $\log$  = logaritma yang menyatakan *variable* menjadi dalam bentuk persen
- $e_{it}$  = error *cross section* ke- $I$  dan waktu ke- $t$

Menurut Basuki dan Prawoto (2016), metode estimasi model regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Menurut Widarjono (2009), *Common Effect Model* (CEM) merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pada model CEM, perbedaan dimensi individu dan waktu diabaikan, sehingga perilaku data dari setiap individu dianggap sama dalam berbagai periode waktu yang berbeda. Oleh karena itu, estimasi parameter pada CEM dilakukan dengan cara menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

*Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang mengasumsikan bahwa *intercept* yang berbeda untuk setiap individu pada data *cross section*, namun *slope* pada setiap individu tidak berubah seiring periode waktu (Gujarati, 2013). Untuk membedakan satu individu dengan individu yang lainnya, model FEM menggunakan variabel *dummy*. (Kuncoro, 2012). Variabel *dummy* adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Model estimasi ini disebut juga dengan model *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

3. *Random Effect Model* (REM)

*Random Effect Model* (REM) disebabkan oleh variasi yang ada pada nilai dan arah hubungan antar individu yang diasumsikan *random* dan dispesifikasikan dalam bentuk residual. Model ini mengestimasi data panel yang variabel

residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu. (Kuncoro, 2012). Model REM memiliki fungsi untuk mengatasi kelemahan model FEM yang menggunakan variabel *dummy*. Model analisis data panel menggunakan pendekatan model REM harus memiliki jumlah *cross section* yang lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. (Widarjono, 2009). Model estimasi ini disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Selanjutnya, akan dilakukan penentuan model regresi data panel menggunakan Uji Chou atau Uji Likelihood, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Menurut (Basuki dan Prawoto, 2016), berikut ini adalah penjelasan dari Uji Chou atau Uji Likelihood, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier:

1. Uji Chou atau Uji Likelihood

Uji Chou adalah uji yang akan menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Common Effect Model* yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Jika hasil dari Uji Chou menyatakan bahwa hipotesis nol diterima, maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*. Sedangkan, apabila hasil dari Uji Chou menyatakan bahwa hipotesis nol ditolak, maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Syarat untuk hipotesis nol diterima adalah nilai prob  $> 0.05$

2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Jika dari hasil Uji Hausman menyatakan bahwa hipotesis nol diterima, maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Random Effect Model*. Sedangkan, apabila hasil dari Uji Hausman



menyatakan bahwa hipotesis nol ditolak, maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Syarat untuk hipotesis nol diterima adalah nilai  $\text{prob} > 0.05$

### 3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier adalah uji untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model* yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Jika dari hasil Uji Lagrange Multiplier menyatakan bahwa hipotesis nol diterima, maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*. Sedangkan, apabila hasil dari Uji Lagrange Multiplier menyatakan bahwa hipotesis nol ditolak, maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Random Effect Model*. Syarat untuk hipotesis nol diterima adalah nilai  $\text{prob} > 0.05$ .

Namun, apabila Uji Chou dan Uji Hausman telah menghasilkan hasil yang sama maka Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan.

Setelah melakukan pemilihan model regresi data panel terbaik menggunakan Uji Chou, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, dilakukan Uji Asumsi Klasik. Uji Asumsi Klasik memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan linier, tak bias, dan memiliki varians atau kesalahan minimum. Menurut Gujarati (2004), Uji Asumsi Klasik yang digunakan pada regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) yang meliputi Uji Linearitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Gujarati (2004) mengatakan bahwa tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan kepada tiap model regresi linier dengan pendekatan OLS, karena:

- a. Pada setiap model regresi linear, Uji Linieritas hampir tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan sudah diasumsikan bahwa

model bersifat linear, sehingga apabila Uji Linearitas harus dilakukan hanya semata-mata untuk melihat sejauh apa tingkat linearitasnya.

- b. Pada dasarnya, Uji Normalitas bukan merupakan syarat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) sehingga Uji Normalitas tidak wajib dipenuhi.
- c. Uji Multikolinearitas wajib dilakukan apabila regresi linear menggunakan satu atau lebih variabel bebas. Jika hanya terdapat satu variabel bebas, maka tidak mungkin terjadi multikolinearitas.
- d. Uji Heteroskedastisitas dilakukan pada data *cross section*, dimana data panel lebih mendekati pada ciri data *cross section* dibandingkan dengan *time series*.
- e. Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series* sehingga Uji Autokorelasi akan sia-sia apabila dilakukan pada data yang bersifat *cross section* atau data panel.

Sehingga, pada penelitian ini hanya menggunakan Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas yang menggunakan data panel (*cross section* dan *time series*).

1. Uji Multikolinearitas

Menurut Maddala (1992), salah satu asumsi regresi linear klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas sempurna, yaitu tidak adanya hubungan linier antar variabel bebas pada suatu model regresi. Suatu model regresi akan dikatakan terkena multikolinearitas apabila terhadai hubungan linear yang sempurna (*perfect*) atau pasti (*exact*) di antara beberapa atau semua variable bebas. Apabila suatu model regresi memiliki multikolinearitas, maka model regresi tersebut bersifat bias dan varians atau kesalahan standartnya tidak tentu.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan ketika terjadi ketidaksamaan varians dari error pada setiap *variable independent* dalam model regresi, sehingga suatu model regresi harus terhindar dari heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila uji asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi akan dinyatakan tidak valid. (Basuki dan Prawoto, 2016).

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, maka tahap estimasi model dan pengambilan hipotesis dapat disimpulkan. Untuk menginterpretasikan hasil akhir model regresi yang dihasilkan, dibutuhkan Uji Statistik T, Uji Statistik F, Analisis Korelasi Ganda, Analisis Koefisien Determinasi Berganda, dan Analisis Nilai *Adjust R Square*.

1. Uji Statistik T

Uji Statistik T merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Uji Statistik T digunakan untuk mengetahui *variable independent* berpengaruh signifikan terhadap *variable dependent* secara parsial dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah *variable independent* berpengaruh signifikan terhadap *variable dependent* secara parsial dapat dilihat pada nilai prob *variable independent*. Apabila nilai prob  $< 0.05$  maka *variable independent* berpengaruh signifikan terhadap *variable dependent* secara parsial. Namun apabila nilai prob  $> 0.05$  maka *variable independent* tidak berpengaruh signifikan terhadap *variable dependent* secara parsial (Santoso, 2000)

2. Uji Statistik F

Uji Statistik F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Uji Statistik F digunakan untuk

mengetahui apakah *variable independent* memiliki pengaruh terhadap *variable dependent* secara keseluruhan. Uji Statistik F dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi F hitung (*F-statistic*). Apabila nilai *F-statistics*  $< 0.05$  maka seluruh *variable independent* memiliki pengaruh terhadap *variable dependent* secara signifikan. Namun, apabila nilai *F-statistics*  $> 0.05$  maka seluruh *variable independent* tidak memiliki pengaruh terhadap *variable dependent* secara signifikan. (Santoso, 2000)

### 3. Analisis Korelasi Ganda (R)

Analisis Korelasi Ganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *variable independent* secara keseluruhan terhadap *variable dependent*. Koefisien ganda dilihat pada nilai R-square yang didapat. Menurut Sugiyono (2007), berikut ini adalah pedoman untuk melihat tingkat kekuatan hubungan koefisien korelasi :

0.00 – 0.199 = sangat rendah

0.20 – 0.399 = rendah

0.40 – 0.599 = sedang

0.60 – 0.799 = kuat

0.80 – 1.000 = sangat kuat

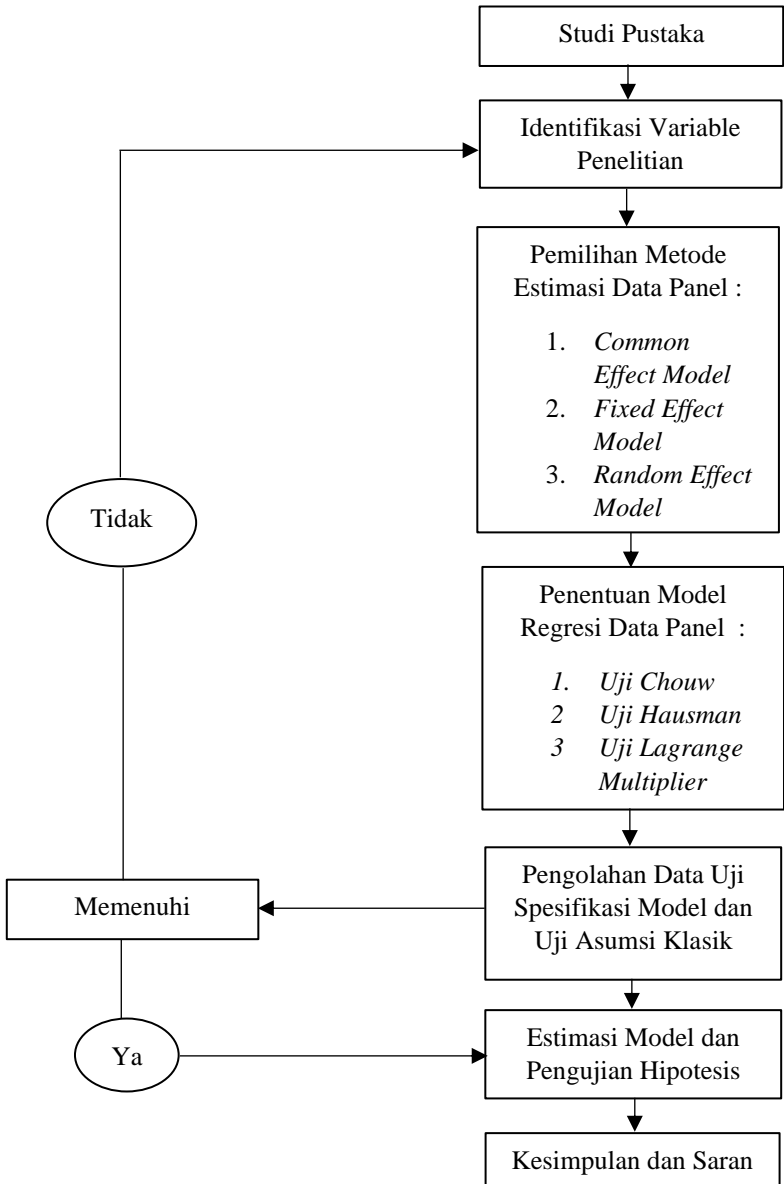
### 4. Analisis Koefisien Determinasi Berganda

Analisis Koefisien Determinasi Berganda memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh *variable independent* secara keseluruhan terhadap *variable dependent*. Koefisien Determinasi Berganda menyatakan seberapa besar persentase variansi *variable independent* yang digunakan untuk menjelaskan variasi *variable dependent* pada model regresi. Nilai koefisien determinasi berganda dapat dilihat pada nilai R Squared pada hasil analisis model regresi. (Priyatno, 2014)

5. Analisis Nilai Adjust R Square

Nilai adjust R Square adalah nilai R square yang telah dikoreksi oleh nilai standard error atau *S.E of Regression*. *S.E of Regression* adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui banyaknya kesalahan pada model regresi dalam memprediksi nilai *variable dependent*. Selain itu, nilai adjust R square yang didapat akan selalu lebih kecil daripada nilai R squared. Nilai *S.E of Regression* yang dibandingkan dengan nilai *S.D Dependent Var* juga digunakan untuk menentukan apakah model regresi yang dihasilkan signifikan dalam memprediksi nilai *variable dependent*. *S.D Dependent Var* adalah nilai yang menunjukkan keberagaman yang terjadi pada data yang dianalisis dan menentukan bagaimana sebaran data pada sample yang dianalisis. Apabila nilai *S.E of Regression* < nilai *S.D Dependent Var* maka model regresi yang dihasilkan dapat memprediksi nilai *variable dependent* dengan baik (Priyatno, 2014).

Langkah-langkah penelitian data panel dapat dilihat pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1** Langkah Penelitian Data Panel

*Sumber: Basuki dan Prawoto, 2016*

Pada tahap ini, digunakan *software Microsoft Excel 2019* dan *Econometric Views (Eviews) Ver.10*. Input yang digunakan adalah seluruh faktor-faktor yang didapatkan dari hasil *content analysis* yang dianggap mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di SWK Karees, Kota Bandung.

### I. *Microsoft Excel 2019*

*Microsoft Excel 2019* adalah sebuah program bagian dari paket instalasi *Microsoft Office* untuk mengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik dan manajemen data. *Microsoft Excel 2019* digunakan untuk membuat tabel hasil dari survei dan *content analysis*.

**Tabel 3.4 Penulisan Tabel di *Microsoft Excel 2019***

Kelurahan	Tahun	Y	$V_{x1}$	$V_{x2}$	$V_{x3}$

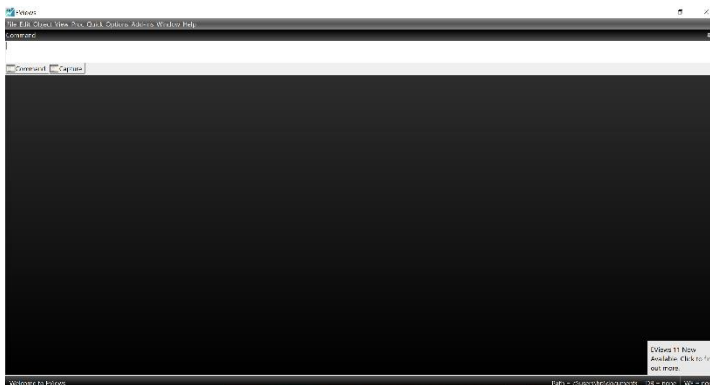
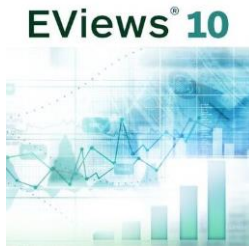
Sumber: Penulis, 2019

Keterangan:

- Kelurahan : Nama Kelurahan
- $V_{x1}, V_{x2}, V_{x3}, dst$  : *Variable independent*
- Y : *Variable dependent*

### II. *Econometric Views (Eviews) Ver.10*

*Econometric Views (Eviews) Ver.10* adalah program komputer berbasis *Windows* yang digunakan untuk menganalisis data statistika dan ekonometri pada jenis runtun waktu (*time series*). *Eviews* dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk *time series*, *cross section*, dan data panel.



**Gambar 3.2** Tampilan Eviews Ver.10

*Sumber: Penulis, 2020*

Pada proses analisis regresi linear data panel digunakan data faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung, dengan unit analisis sebanyak 28 unit berupa jumlah kelurahan yang ada di SWK Karees dengan satu *variable dependent* berupa jumlah RTH dan delapan *variable independent* berupa jumlah penduduk (JP), kawasan industry (Ind), permukiman (Perkim), fasilitas umum (Fasum), perdagangan dan jasa (Perjas), kepadatan bangunan (Kpdt), alih fungsi lahan (AFL) dan harga lahan (Hrg) berdasarkan rentan waktu dari tahun 2014 – 2018.



Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linear berganda pada *Eviews Ver.10*:

1. Membuat *workfile* yang akan digunakan dalam proses analisis data
2. Input data dari hasil Microsoft Excel 2019. Data yang *diinput* berupa data faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik pada SWK Karees, kota Bandung berdasarkan survey yang telah dilakukan
3. Setelah meng *input* data, dilakukan tahap regresi data panel. Dalam melakukan regresi data panel, dilakukan tiga model pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) maupun *Random Effect Model* (REM).
4. Kemudian, dilakukan penentuan model regresi data panel terbaik dari *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) maupun *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model terbaik dilakukan tiga uji, yaitu Uji Chou, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.
5. Setelah menemukan model regresi data panel terbaik, maka selanjutnya dilakukan tahap Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas untuk data panel. Untuk melakukan Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas, hal yang harus dilakukan adalah menyimpan residual masing-masing unit analisis, yaitu ke-28 kelurahan pada SWK Karees.

### **3.7 Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah  
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Publik di Subwilayah Kota (SWK) Karees, Kota Bandung?”

2. Studi Literatur

Studi literatur pada penelitian ini didapat dari literatur berupa jurnal, makalah, tugas akhir, buku, dan lain-lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi pendukung penelitian seperti teori, konsep, studi kasus, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara survey primer dan survey sekunder. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap dibutuhkan pada penelitian ini karena akan menjadi input yang akan diolah. Data yang diambil akan disesuaikan dengan variable yang telah disusun.

4. Analisis data

Data yang telah didapat akan dianalisis dengan metode yang telah ditentukan untuk menjawab tujuan dan sasaran penelitian. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif berupa *content analysis* untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan RTH dan kuantitatif berupa analisis regresi linear berganda untuk mengetahui keterkaitan antar faktor tersebut.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menentukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil dari proses analisis data yang didapat. Kesimpulan akhir yang ditarik diharapkan dapat menjawab tujuan akhir dari penelitian ini yaitu mengetahui keterkaitan antar faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH di SWK Karees, Kota Bandung.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

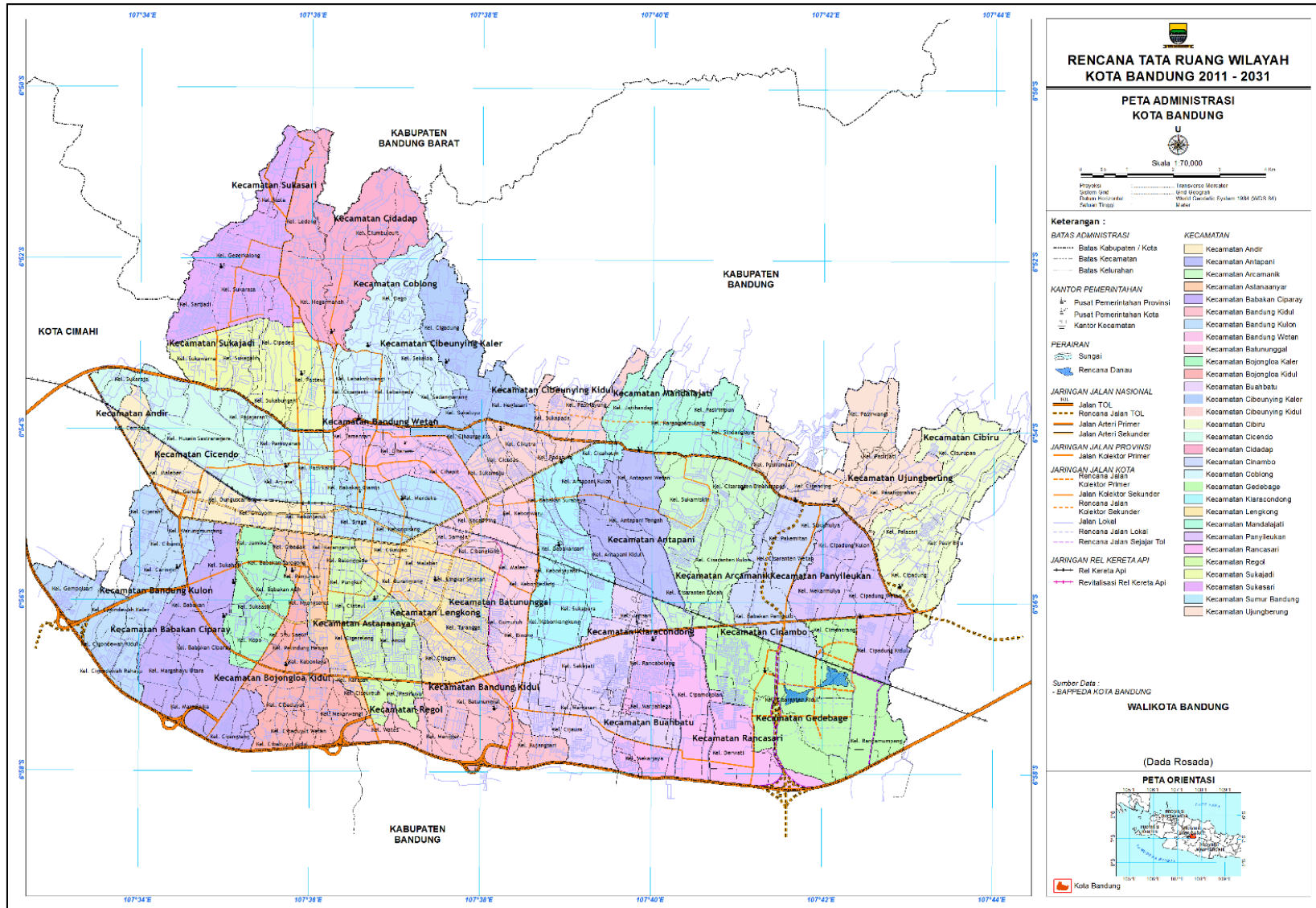
##### **4.1.1 Wilayah Administrasi**

###### **1. Kota Bandung**

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan dan termasuk kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat dengan luas sebesar 16.729,65 ha. Kota Bandung merupakan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 675 – 1050 meter di atas permukaan laut dan berada pada koordinat  $6^{\circ} 50' 38''$  -  $6^{\circ} 58' 50''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 34''$  -  $107^{\circ} 43' 50''$  BT. Secara geografis, Kota Bandung memiliki jarak yang relatif dekat dengan Kota Jakarta yang sebagai ibu kota Negara dan pusat perdagangan sehingga menjadikan Kota Bandung berkembang pesat di berbagai bidang kegiatan pembangunan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bandung memiliki batas-batas :

- Utara : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat
- Selatan : Kabupaten Bandung
- Timur : Kabupaten Bandung
- Barat : Kota Cimahi

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Bandung  
Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2031

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

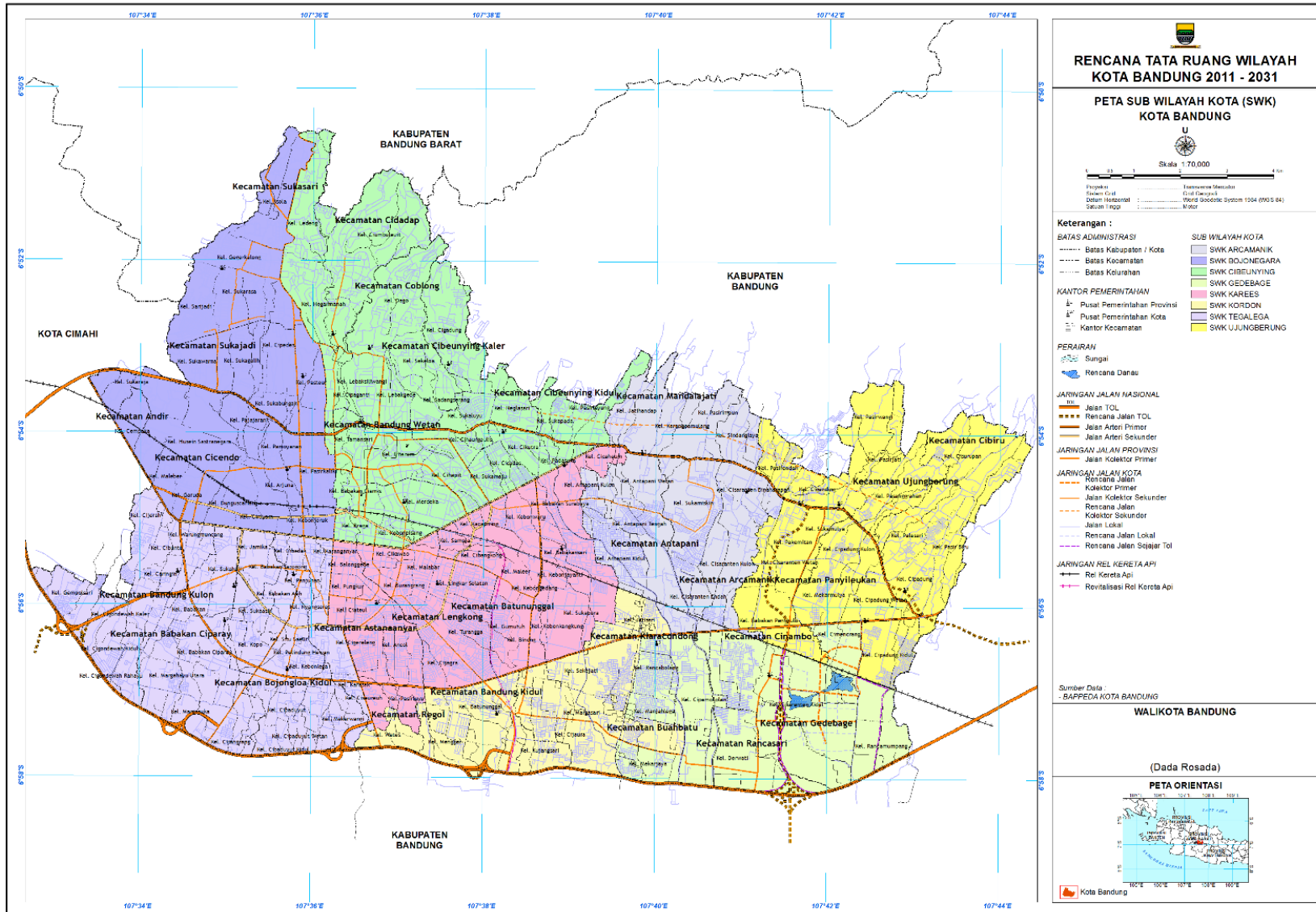
Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, Rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 jenjang yaitu:

1. Pusat pelayanan kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan atau regional
2. Subpusat pelayanan kota (SPK) yang melayani subwilayah kota (SWK)
3. Pusat lingkungan (PL)

Pusat pelayanan kota (PPK) Bandung terdiri dari dua bagian, yaitu PPK Alun-Alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun melayani Subwilayah Kota (SWK) Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage melayani Subwilayah Kota Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*





**Gambar 4.2** Peta Pembagian Sub Wilayah Kota (SWK) di Kota Bandung  
Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2031

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

## 2. Sub Wilayah Kota (SWK) Karees

Salah satu wilayah pusat pelayanan kota (PPK) Alun-alun adalah subpusat pelayanan Maleer yang melayani subwilayah kota (SWK) Karees. Sesuai peruntukannya sebagai kawasan perdagangan, subwilayah kota (SWK) Karees dilengkapi oleh fasilitas penunjang seperti permukiman, peribadatan, bina sosial, olahraga atau rekreasi, pemerintahan, serta perbelanjaan atau jasa. Subwilayah kota (SWK) Karees meliputi Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Batununggal yang memiliki fungsi khusus sebagai kawasan perdagangan. SWK Karees memiliki 28 kelurahan.

Subwilayah Kota (SWK) Karees memiliki luas sebesar 2.102,87 ha dan berada di ketinggian 675-791 mpdl dengan kemiringan lahan sebesar 0-2%. Luas wilayah pada setiap kecamatan di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.1.

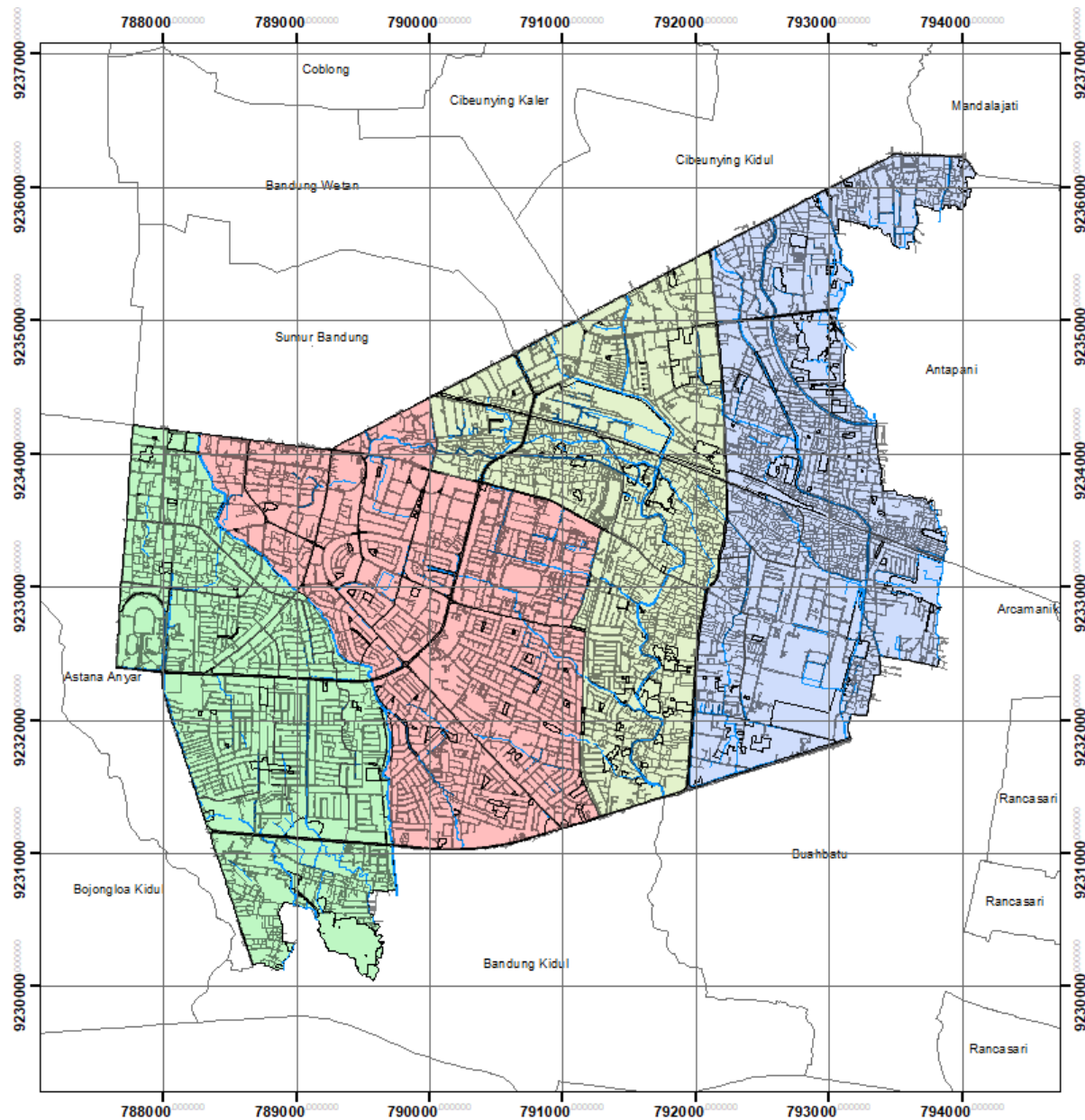
**Tabel 4.1 Luas Setiap Kecamatan pada SWK Karees, Kota Bandung**

No	Kecamatan	Luas (ha)
1	Kiaracondong	568.32
2	Regol	475.88
3	Batununggal	485.09
4	Lengkong	573.58
<b>Total</b>		<b>2102.87</b>

*Sumber: Kota Bandung dalam Angka, 2018*

Subwilayah kota (SWK) Karees berbatasan dengan sub wilayah perkotaan lainnya yang ada di Kota Bandung, yaitu:

- Utara : SWK Cibeunying,
- Timur : SWK Arcamanik dan SWK Gedebage
- Barat : SWK Tegalega dan SWK Bojonegara
- Selatan : SWK Kordon



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN KEBUMAHAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA  
2020

**JUDUL PETA :**  
**PETA SUBWILAYAH KOTA (SWK) KAREES  
KOTA BANDUNG**

**LEGENDA :**

- Jalan
- Sungai
- Batas Wilayah
- Kecamatan Batununggal
- Kecamatan Kiaraoondong
- Kecamatan Lengkok
- Kecamatan Regol

**INSET PETA :**

**KETERANGAN :**

1:40,000

15,000    7,500    0    15,000 Meters

**SUMBER PETA :**  
Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  
dan Citra Satelit 2014 - 2018

**Gambar 4.3** Peta SWK Karees, Kota Bandung  
*Sumber: RDTR Kota Bandung 2015-2035*

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

#### 4.1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk pada SWK Karees, Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang terdapat pada SWK Karees, Kota Bandung selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kiaracondong</b>	11.0235	120.662	124.988	129.842	135.590
<b>Regol</b>	67.628	71.833	75.042	79.318	83.647
<b>Batununggal</b>	95.386	99.446	103.639	109.017	113.823
<b>Lengkong</b>	47.583	51.508	56.249	60.509	65.198
Total	320.832	343.449	359.918	378.686	398.258

*Sumber: Data Kependudukan Kantor Kecamatan Terkait dan BPS Kecamatan Terkait*

#### 4.1.3 Penggunaan Lahan

Sub Wilayah Kota (SWK) Karees merupakan kawasan seluas 2102.87 ha dengan kegiatan yang cukup padat karena SWK Karees terletak di pertengahan kota Bandung. Pola penggunaan lahan di SWK Karees dibagi menjadi dua, yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Penggunaan lahan SWK Karees didominasi oleh kawasan terbangun yang terdiri dari permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan militer, serta fasilitas umum. Sedangkan kawasan tidak terbangun di SWK Karees terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH), semak belukar, dan zona wilayah tani. Penggunaan lahan pada SWK Karees didominasi oleh permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri.

Data luas setiap jenis penggunaan lahan pada SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Luas Penggunaan Lahan Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Permukiman</b>	1284.96	1285.07	1285.22	1285.35	1285.46
<b>Perdagangan dan Jasa</b>	215.18	215.26	215.37	215.42	215.52
<b>Fasilitas Umum</b>	149.11	149.17	149.21	149.25	149.33
<b>Kawasan Industri</b>	154.18	140.87	140.91	140.96	141.01
<b>RTH Publik</b>	62.45	64.29	64.33	64.37	77.86

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*

a. Perkarangan rumah dan Permukiman

Kawasan perkarangan rumah yang terdapat di SWK Karees berupa perumahan yang tersebar di setiap kecamatan, misalnya Kompleks Jatimulya, Kompleks Pertamina Samoja, dan Cluster Bali di Kecamatan Batununggal, Kompleks Bank Indonesia, Perumahan Puri Suryalaya dan Pangarang Indah Permai di Kecamatan Lengkong, Cluster Bali 2 Kawalayaan, Kompleks Puri Tirta Kencana, Sweet Antapani Residence, Green Kawalayaan, Perumahan Sukalaksana Makmur Antapani, Perumahan Bumi Asri Sukapura, dan Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Pindad Selatan di Kecamatan Kiaracandong, serta Kompleks Batu Mas dan Padmae Regency di Kecamatan Regol. Selain perumahan, terdapat permukiman warga yang tersebar di seluruh wilayah SWK Karees.

Luas permukiman pada setiap kecamatan di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.4.



**Tabel 4.4 Luas Permukiman Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

Kecamatan	Luas Permukiman (ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kiaracondong</b>	334.19	334.22	334.30	334.34	334.37
<b>Regol</b>	319.96	320.03	320.08	320.16	320.23
<b>Batununggal</b>	301.58	301.60	301.63	301.64	301.67
<b>Lengkong</b>	329.23	329.25	329.26	329.27	329.28
Total	1284.96	1285.07	1285.22	1285.35	1285.46

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*



**Gambar 4.4** Perumahan dan Permukiman di SWK Karees

*Sumber: Survey Primer, 2020*

**b. Perdagangan dan Jasa**

Dalam RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, SWK Karees ditetapkan sebagai SWK yang memiliki fungsi khusus sebagai perdagangan. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa pada SWK Karees terdapat di Kecamatan Regol yang merupakan etalase perdagangan dan jasa Kota

Bandung. Pada Kecamatan Regol, kawasan perdagangan dan jasa menyebar di sekitar Alun-Alun Kota Bandung, yaitu pada Jl. Dewi Sartika, Jl. Dalem Kaum, Jl. Cibadak, dan Jl. Otto Iskandar Dinata. Selain Kecamatan Regol, perdagangan dan jasa dengan jumlah yang dominan terdapat di Kecamatan Lengkong yang menyebar di sekitar Jl. Gatot Subroto, Jl. Malabar, Jl. Cikawao, Jl. Karapitan, Jl. Buah Batu dan Jl. Pelajar Pejuang. Sedangkan pada Kecamatan Batununggal, perdagangan dan jasa terdapat pada area utara dan selatan, serta pada Kecamatan Kiaracondong perdagangan dan jasa terdapat pada area utara.

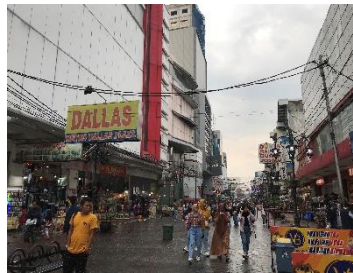
Pada SWK Karees, terdapat pusat perdagangan tradisional dan pusat perdagangan modern. Untuk pusat perdagangan tradisional, terdapat Pasar Tradisional Batununggal Indah di Kecamatan Batununggal, Pasar Tradisional Palasari dan Pasar Buku Palasari di Kecamatan Lengkong, Pasar Kiaracondong, Pasar Basah Cicadas, dan Pasar Cicaheum di Kecamatan Kiaracondong, serta Pasar Tradisional Ancol di Kecamatan Regol. Sedangkan untuk pusat perdagangan modern terdapat Trans Studio Mall Bandung, The Plaza IBCC, dan Lucky Square Mall di Kecamatan Batununggal, Piser Square di Kecamatan Lengkong, Griya Kiaracondong dan Bandung Trade Mall di Kecamatan Kiaracondong, serta Parahyangan Plaza, ITC Kebon Kelapa, The Kings Shopping Center, dan Grand Yoga Kepatihan di Kecamatan Regol. Selain itu, toko-toko lainnya seperti ruko juga tersebar di setiap kecamatan di SWK Karees, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Lengkong.

Luas perdagangan dan jasa pada setiap kecamatan di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Luas Perdagangan dan Jasa Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

Kecamatan	Luas Perdagangan dan Jasa (ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kiaracondong</b>	40.43	40.44	40.47	40.50	40.51
<b>Regol</b>	41.60	41.60	41.63	41.65	41.71
<b>Batununggal</b>	40.23	40.30	40.34	40.36	40.38
<b>Lengkong</b>	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92
Total	215.18	215.26	215.37	215.42	215.52

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*



**Gambar 4.5** Perdagangan dan Jasa di SWK Karees

*Sumber: Survey primer, 2020*

c. Fasilitas Umum

Berdasarkan RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, sesuai peruntukannya sebagai kawasan perdagangan, SWK

Karees dilengkapi oleh fasilitas umum seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan, fasilitas perkantoran, fasilitas kantor pemerintahan dan pelayanan umum, fasilitas transportasi umum, gelanggang olahraga, dan fasilitas peribadatan.

SWK Karees secara geografis terletak di tengah Kota Bandung sehingga dari segi transportasi, ketersediaan fasilitas transportasi memiliki peran yang penting. Fasilitas transportasi umum yang terdapat di SWK Karees menjadi tujuan maupun tempat untuk transit bagi dari masyarakat kota Bandung maupun kota lain di sekitar kota Bandung yang akan bepergian menggunakan kereta api dan bis. Adapun fasilitas transportasi umum tersebut adalah Stasiun Kereta Api Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong, dan Terminal Bis Kebon Kelapa di Kecamatan Regol.

Fasilitas Pendidikan yang terdapat di SWK Karees terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Hal ini menyebabkan SWK Karees sudah mampu memenuhi kebutuhan Pendidikan masyarakat yang tinggal di SWK Karees dan sekitarnya. Fasilitas Pendidikan tersebut terdiri dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dari sekian banyaknya sekolah di SWK Karees, terdapat beberapa sekolah swasta favorit di SWK Karees seperti TK Assalam, SD Assalam, SMP Assalam di Kecamatan Regol, SMK YPPT Bandung di Kecamatan Batununggal, dan SMA BPI 2 Bandung di Kecamatan Lengkong. Untuk sekolah negeri favorit di SWK Karees terdapat SDN Babakan Surabaya 4 di Kecamatan Kiaracondong, SMPN 4 Bandung di Kecamatan Batununggal, dan SMAN 7 Bandung di Kecamatan Lengkong. Selain itu, terdapat pula perguruan tinggi favorit di SWK Karees, seperti Universitas Langlangbuana, Universitas Pasundan, dan *Indonesian Art Institute* di Kecamatan Lengkong, serta Universitas Jendral Achmad Yani di Kecamatan Kiaracondong. Selain itu, terdapat

sekolah tingkat TK hingga SMA lain yang tersebar di setiap kecamatan, sedangkan untuk perguruan tinggi hanya tersebar di Kecamatan Batununggal, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Kiaracondong. Meskipun fasilitas Pendidikan di SWK Karees sudah lengkap, masih ada masyarakat yang bersekolah di luar SWK Karees karena persaingan kualitas sekolah di kota Bandung.

Fasilitas peribadatan yang terdapat di SWK Karees terdiri dari masjid, gereja, pura, dan vihara. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan peribadatan masyarakat di SWK Karees yang menganut berbagai macam keyakinan, misalnya Masjid Raya Bandung, Gereja Kristen Kalam Kudus Pasundan, dan Gereja Katolik Santo Paulus di Kecamatan Regol, Masjid Agung Trans Studio Bandung di Kecamatan Batununggal, serta Pura Wira Natha Darma dan Wihara Buddha Yakin di Kecamatan Lengkong.

Fasilitas Kesehatan yang terdapat di SWK Karees berfungsi untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan masyarakat yang tinggal di SWK Karees itu sendiri. Fasilitas Kesehatan tersebut terdiri dari apotik, praktik dokter, puskesmas, poliklinik, bidan, hingga rumah sakit. Terdapat 3 rumah sakit di SWK Karees, yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah di Kecamatan Lengkong, Rumah Sakit Umum Pindad Bandung di Kecamatan Kiaracondong dan Rumah Sakit Bersalin Pangestu di Kecamatan Batununggal. Rumah Sakit Umum Pindad Bandung dan Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut merupakan rumah sakit dengan skala regional yang memiliki fasilitas dan tenaga medis yang lengkap sehingga rumah sakit tersebut kerap didatangi oleh masyarakat untuk berobat. Untuk fasilitas Kesehatan lainnya sudah dimiliki oleh setiap kecamatan di SWK Karees.

Dalam penyediaan kegiatan pertandingan olahraga, SWK Karees dilengkapi oleh fasilitas gelanggang olahraga,

seperti Gelanggang Olahraga Mekar, Gelanggang Olahraga Fitra Utama, dan Stadion Persib Sidolig di Kecamatan Batununggal, serta Gelanggang Taruna Karees di Kecamatan Lengkong. Stadion Persib Sidolig digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola hingga skala nasional, namun sekarang Stadion Persib Sidolog sudah tidak digunakan kembali, sedangkan gelanggang olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga lain seperti pertandingan bulu tangkis, volley, futsal, dan lain-lain dalam skala lokal.

Setiap kecamatan di SWK Karees dilengkapi dengan kantor kecamatan sehingga masyarakat mudah dalam mengakses pelayanan umum yang dibutuhkan. Selain itu, pada SWK Karees juga terdapat kantor-kantor swasta maupun pemerintahan lainnya yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, misalnya Kantor PT. PLN, Kantor Bank, Kantor PT. Pertamina, Kantor PT. PGN, dan lain-lain.

Luas fasilitas umum pada setiap kecamatan di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6 Luas Fasilitas Umum Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

Kecamatan	Luas Fasilitas Umum (ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kiaracondong</b>	30.74	30.75	30.76	30.77	30.78
<b>Regol</b>	24.76	24.78	24.79	24.80	24.81
<b>Batununggal</b>	46.67	46.68	46.70	46.71	46.72
<b>Lengkong</b>	46.94	46.95	46.96	46.97	47.01
Total	149.11	149.17	149.21	149.25	149.33

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*



**Gambar 4.6** Fasilitas Umum di SWK Karees

*Sumber: Survey primer, 2020*

d. Kawasan Industri

Kawasan Industri terdapat pada setiap kecamatan di SWK Karees, dengan jumlah yang dominan terdapat di Kecamatan Kiaracondong. Kegiatan industri yang terdapat pada SWK Karees bermacam-macam, seperti industri textile atau garmen, industri sepatu, industri plastik, industri produk militer, industri kertas, industri keramik, *industrial*

*equipment supplier*, serta *chemical industry*. Contoh industri yang terdapat di SWK Karees adalah PT. Sapta Chemika Mutiara dan PT. Velvet Tekstil Indonesia di Kecamatan Batununggal, PT. Somap International Industri di Kecamatan Lengkong, PT. Pentarona Medan Kreasindo, PT. Laksana Karis Industri, dan PT. Pindad di Kecamatan Kiaracondong, serta Setia Graha Indoteknik Industri dan Dehatex Textile Industri di Kecamatan Regol.

Luas kawasan industri pada setiap kecamatan di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7 Luas Kawasan Industri Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

Kecamatan	Luas Kawasan Industri (ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kiaracondong</b>	79.85	79.86	79.87	79.88	79.88
<b>Regol</b>	35.75	35.75	35.76	35.77	35.78
<b>Batununggal</b>	32.48	19.14	19.14	19.15	19.16
<b>Lengkong</b>	6.11	6.12	6.13	6.16	6.19
Total	154.18	140.87	140.91	140.96	141.01

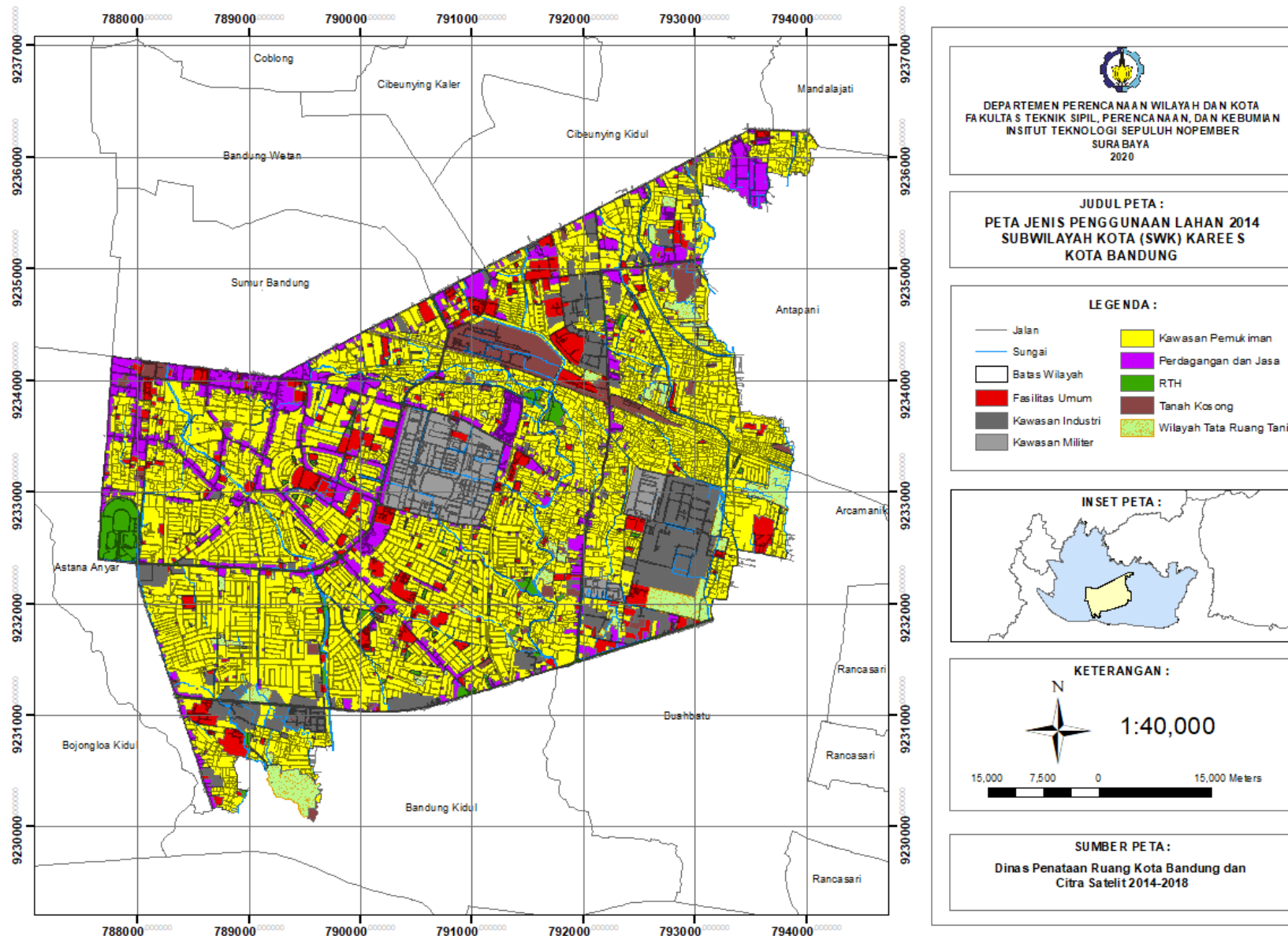
*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*



**Gambar 4.7** Kawasan Industri di SWK Karees

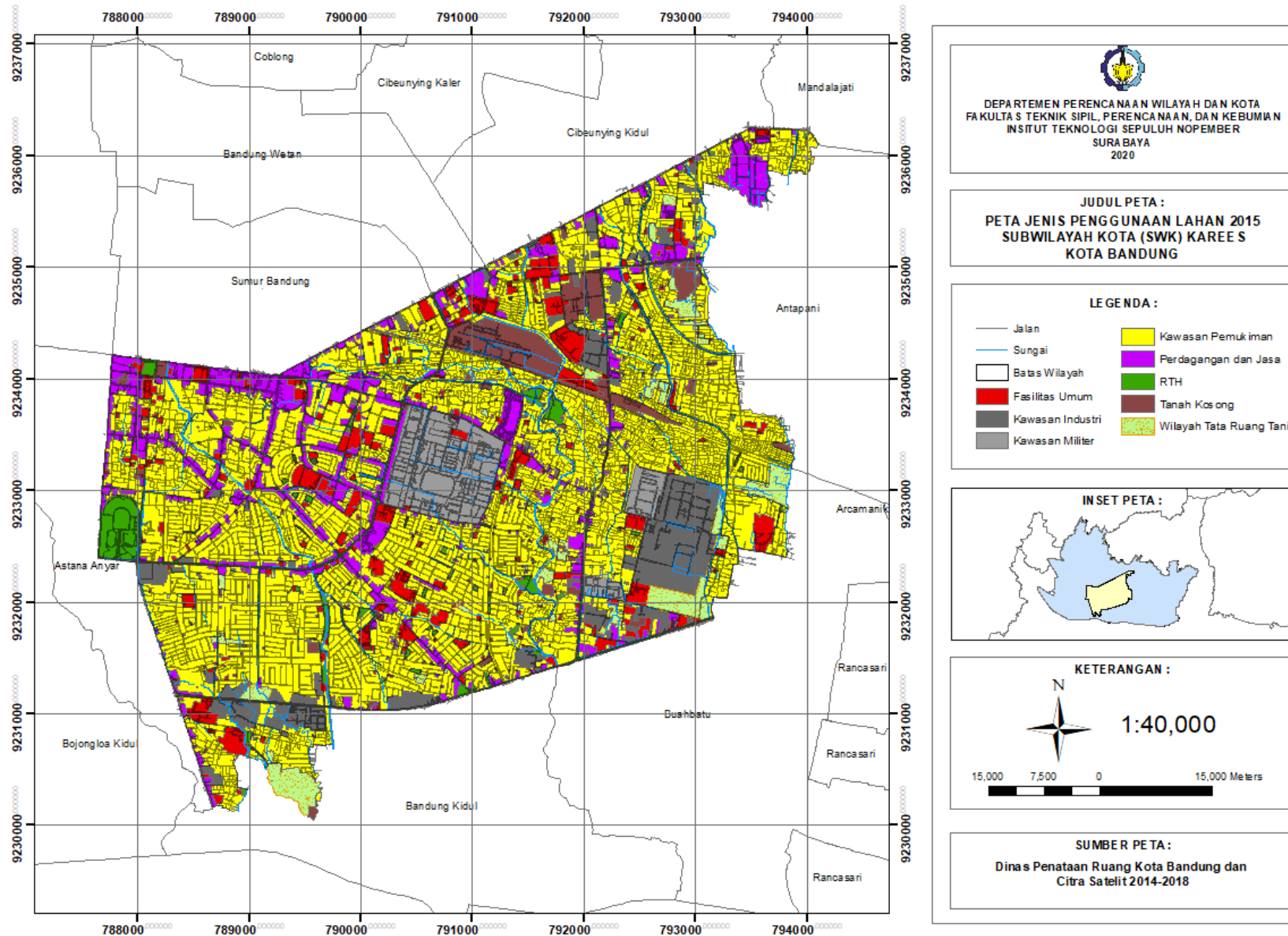
*Sumber: Survey primer, 2020*





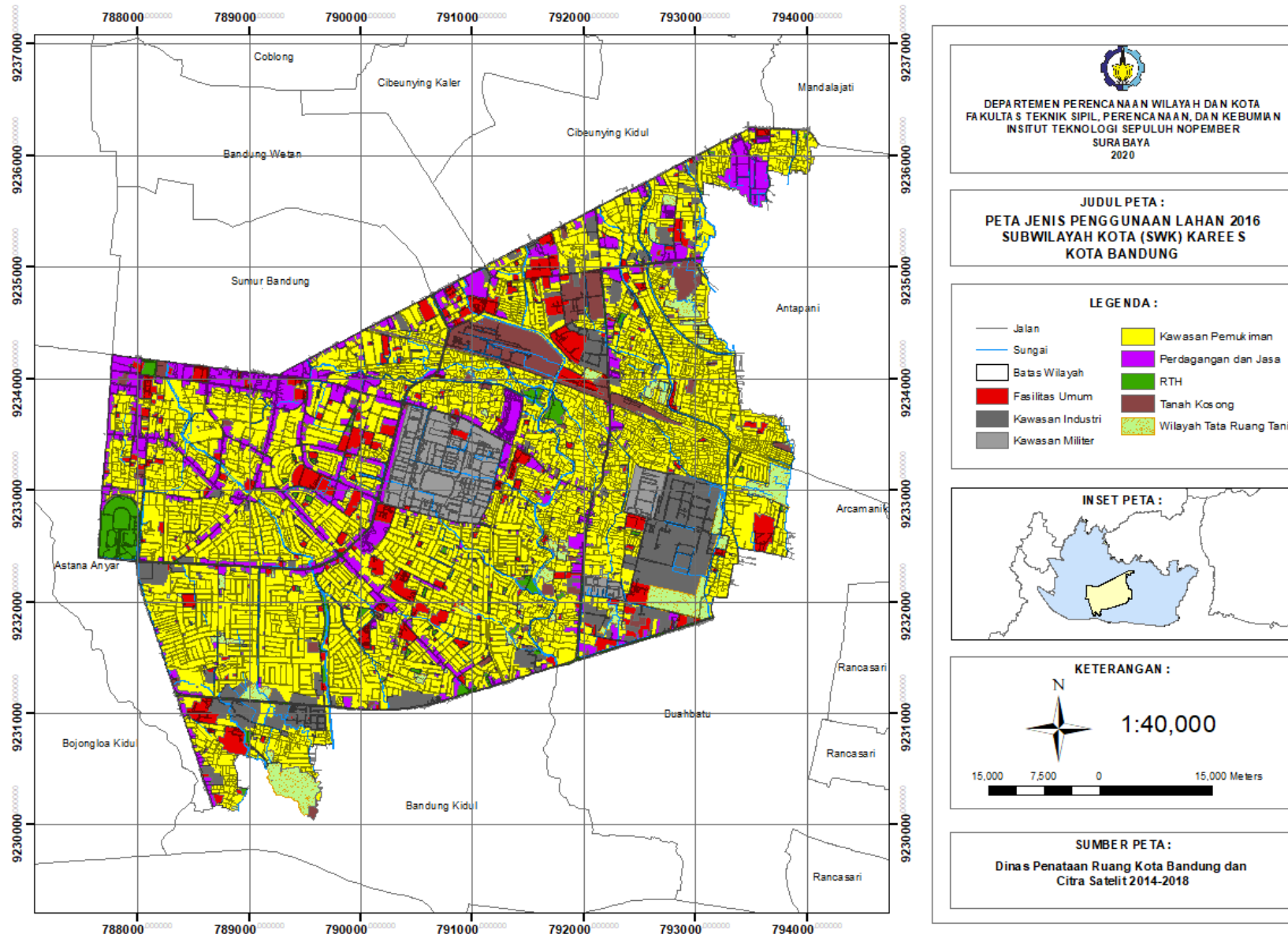
**Gambar 4.8** Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2014

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit



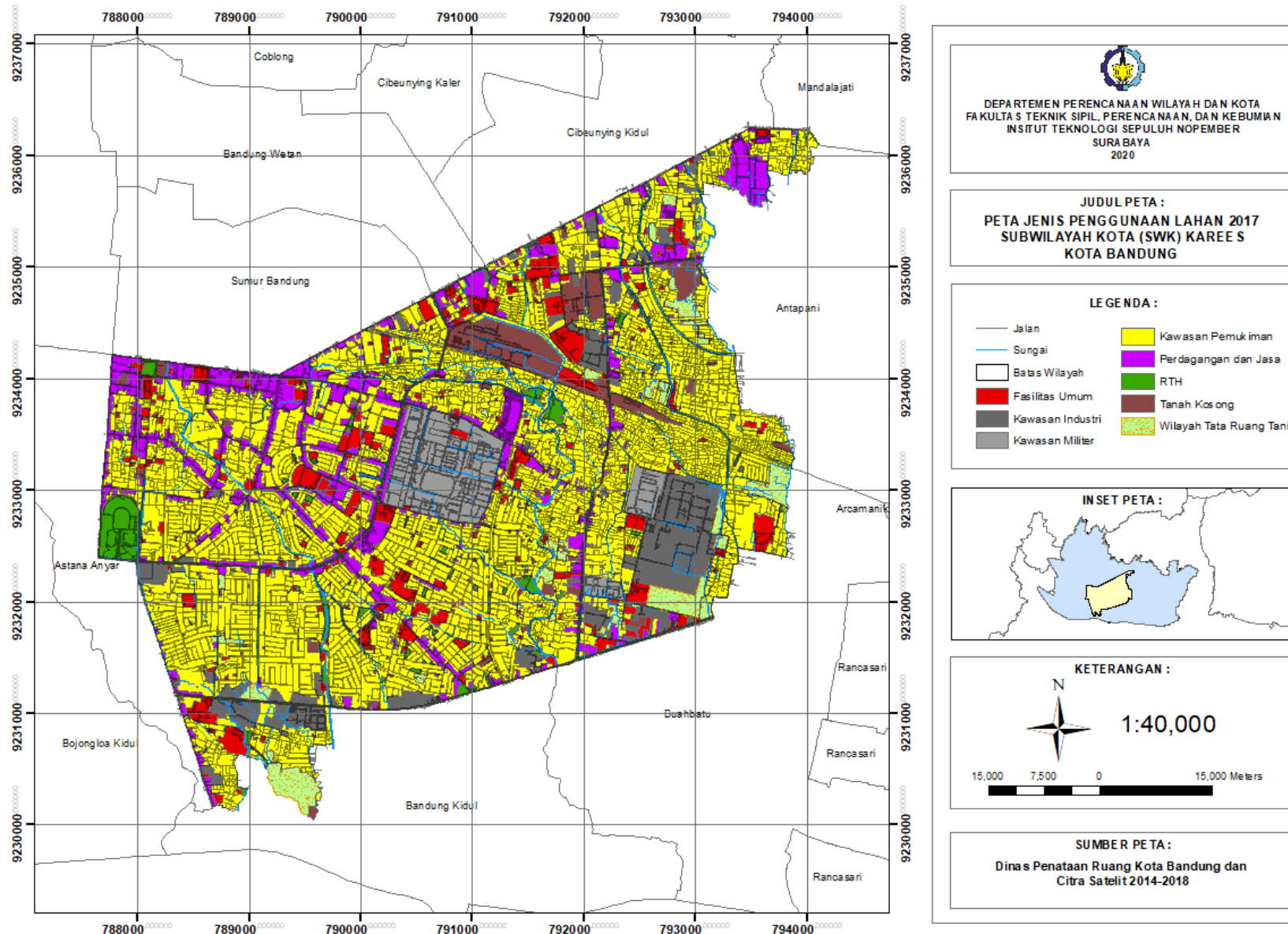
**Gambar 4.9** Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2015

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*



**Gambar 4.10** Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2016

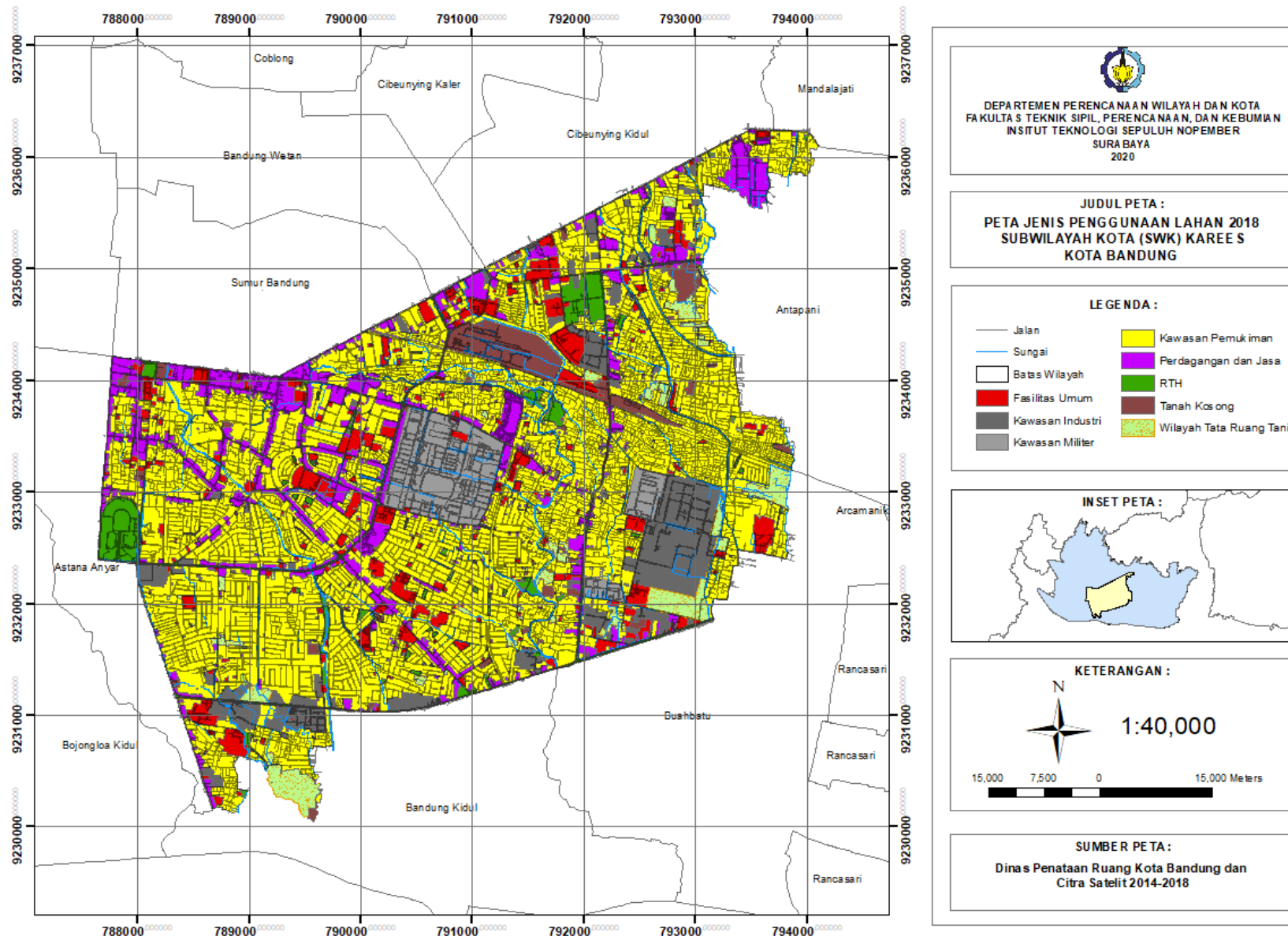
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit



**Gambar 4.11** Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2017

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*





**Gambar 4.12** Peta Jenis Penggunaan Lahan SWK Karees Tahun 2018

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

#### 4.1.4 Kepadatan Bangunan

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, SWK Karees memiliki kepadatan bangunan yang masuk dalam klasifikasi tinggi dan sangat tinggi pada setiap kecamatannya. Angka ini dapat memprediksi bahwa sulitnya terjadi perkembangan bangunan di SWK Karees, melihat angka kepadatan yang tinggi sehingga lahan yang tidak terbangun jumlahnya sudah sedikit.

Data kepadatan bangunan di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8 Kepadatan Bangunan Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

Kecamatan	Kepadatan Bangunan (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kiaracondong</b>	88.59	88.60	88.62	88.64	88.65
<b>Regol</b>	74.26	74.28	74.30	74.32	74.35
<b>Batununggal</b>	74.07	71.74	71.75	71.76	71.76
<b>Lengkong</b>	97.65	97.65	97.66	97.67	97.74

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*

#### 4.1.5 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan yang terjadi di SWK Karees merupakan perubahan fungsi lahan yang semula diperuntukan untuk RTH publik menjadi lahan terbangun yang terdiri dari permukiman, perdagangan dan jasa, industri, serta fasilitas umum.

Data alih fungsi lahan di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9 Alih Fungsi Lahan Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

Kecamatan	Alih Fungsi Lahan			
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
<b>Kiaracondong</b>	0	0	0	0
<b>Regol</b>	0	0	0	0
<b>Batununggal</b>	-13.27	0	0	0
<b>Lengkong</b>	0	0	0	0

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*

#### 4.1.6 Harga Lahan

Berdasarkan data NJOP Kota Bandung, SWK Karees memiliki harga lahan yang bervariasi, mulai dari Rp 614.000,00 / $m^2$  hingga Rp 10.455.000,00/  $m^2$  di tahun 2014, 2015, dan 2016. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018, harga lahan di SWK Karees mengalami kenaikan sehingga *range* harga lahan berubah mulai dari Rp 802.000,00 / $m^2$  hingga Rp 20.755.000,00 / $m^2$ .

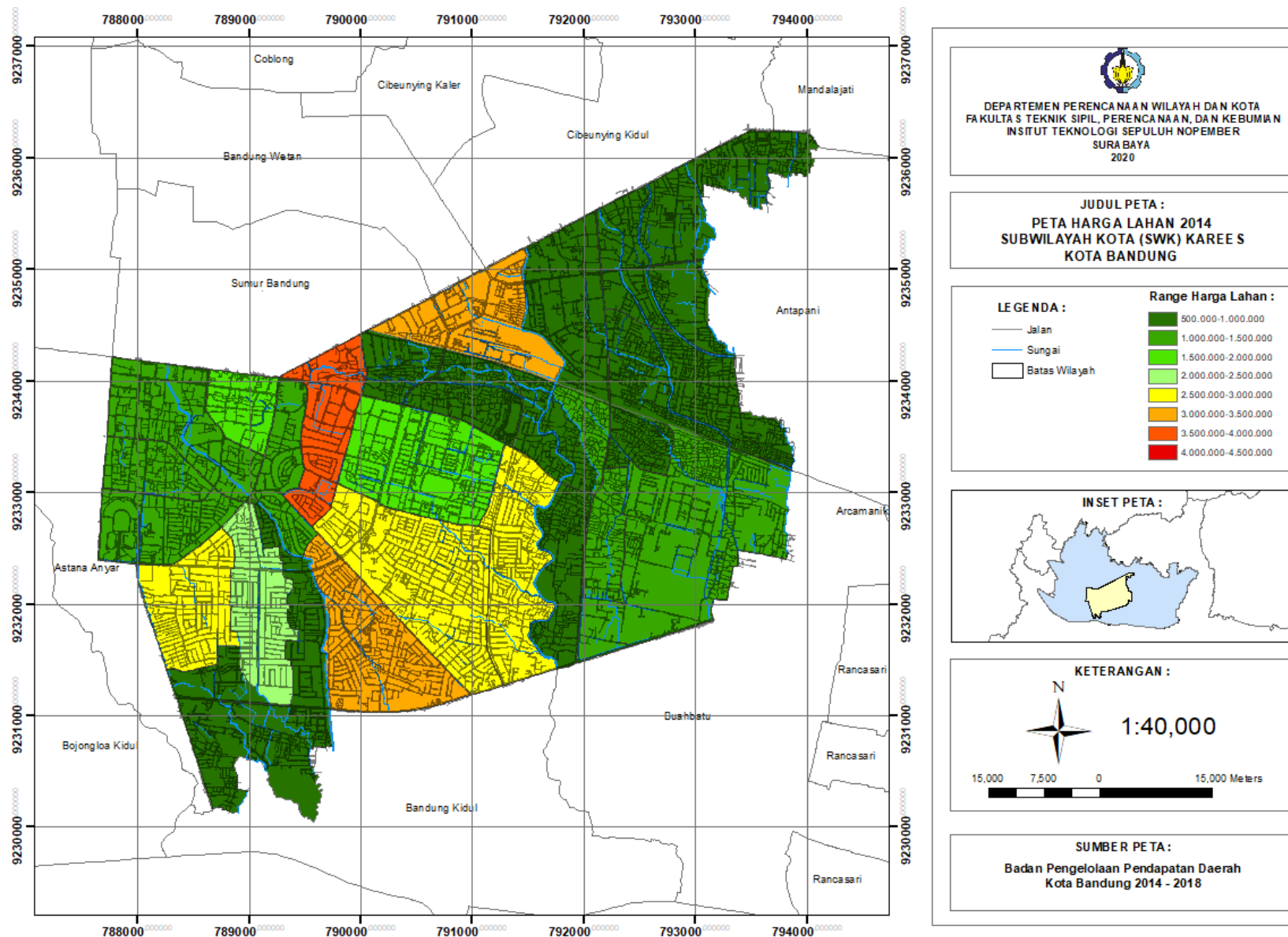
Data harga lahan berdasarkan rata-rata harga dominan pada setiap kelurahan di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10 Harga Lahan Berdasarkan Rata-Rata Harga Dominan Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

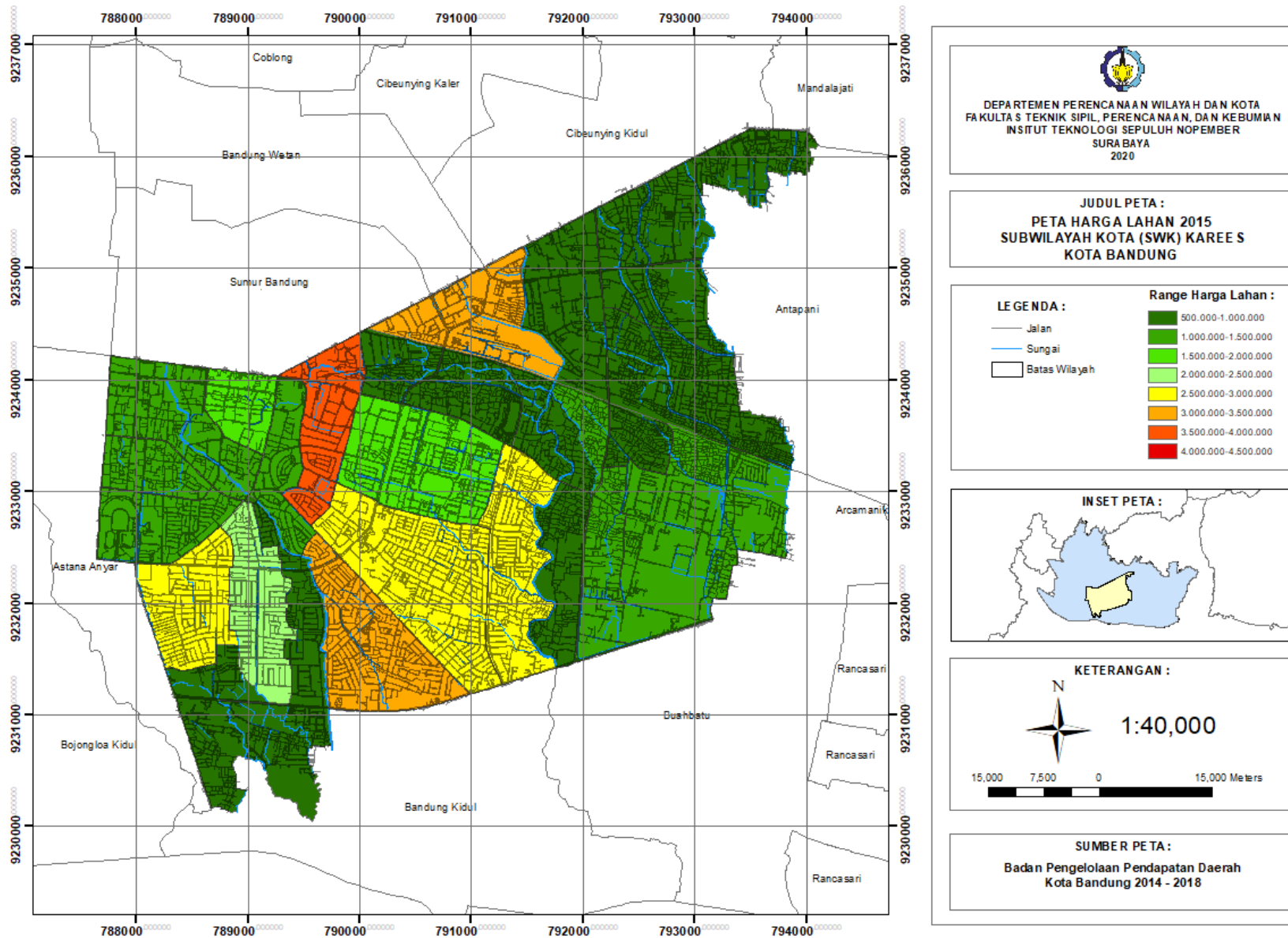
Kecamatan	Harga Lahan (Rp/ $m^2$ )				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kiaracondong</b>	917.325	917.325	917.325	1.118.667	1.118.667
<b>Regol</b>	1.506.429	1.506.429	1.506.429	1.700.571	1.700.571
<b>Batununggal</b>	1.388.375	1.388.375	1.388.375	1.599.125	1.599.125
<b>Lengkong</b>	2.246.571	2.246.571	2.246.571	2.689.286	2.689.286

*Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung*

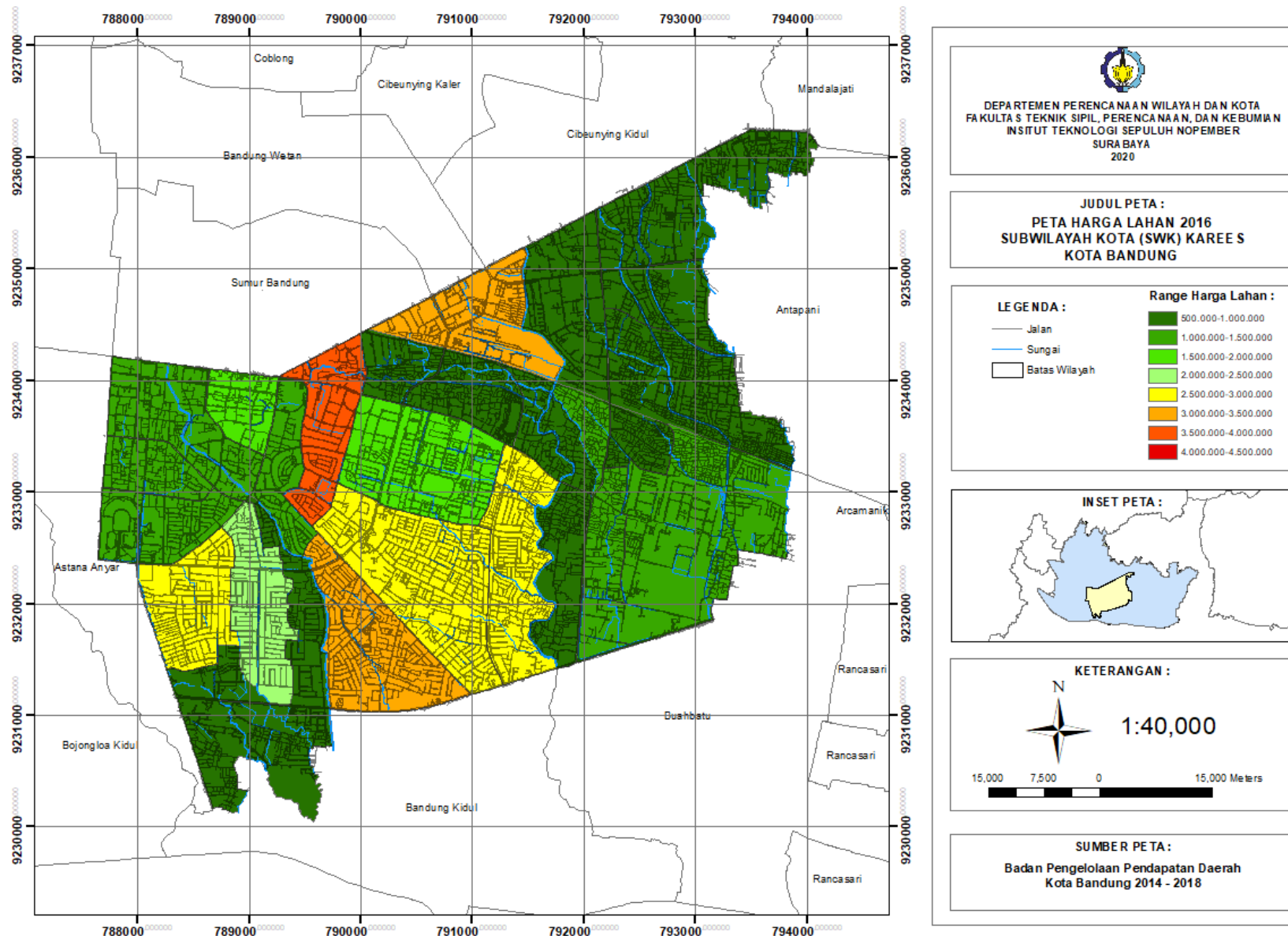




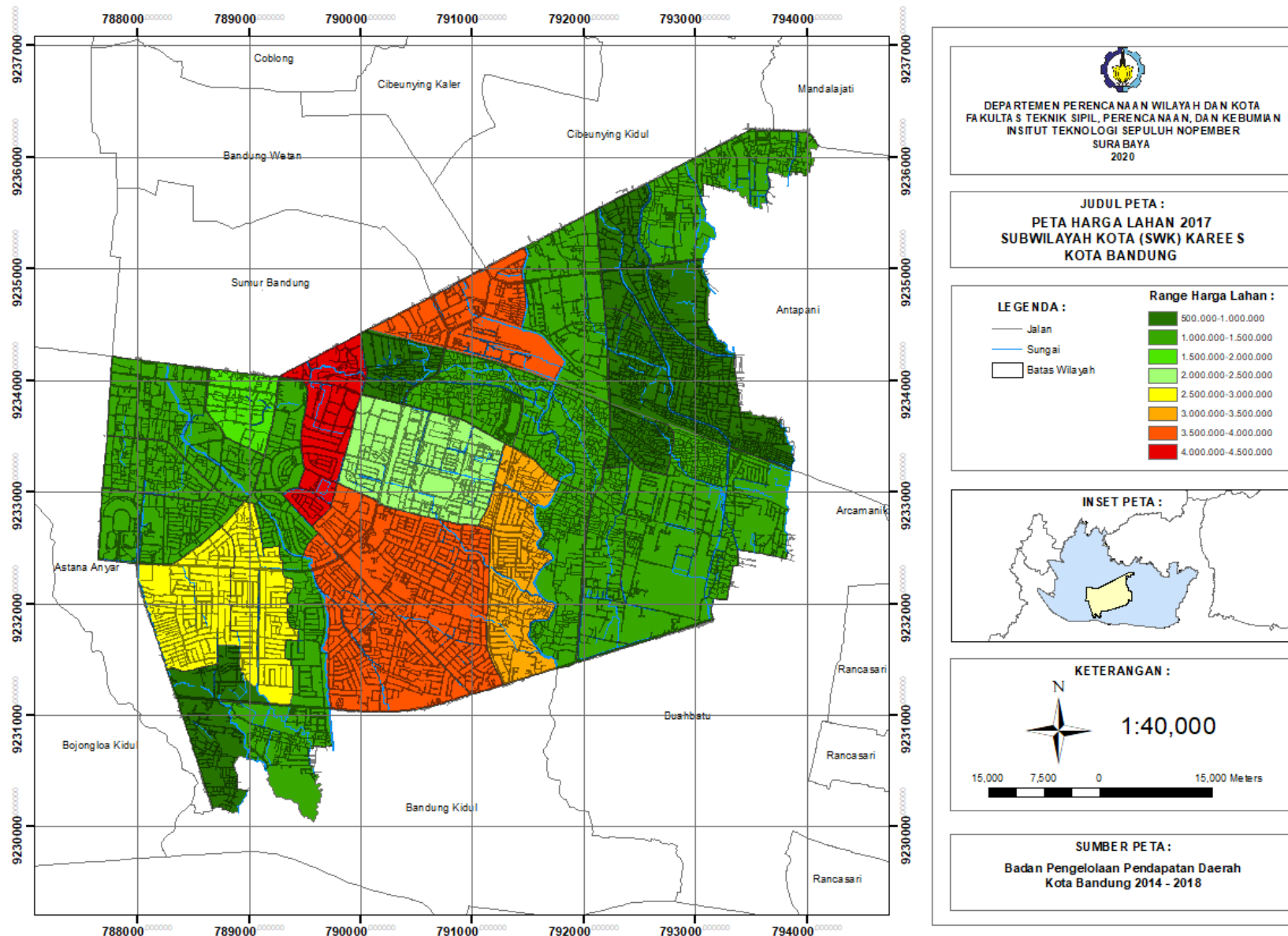
**Gambar 4.13** Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2014  
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit



**Gambar 4.14** Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2015  
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit

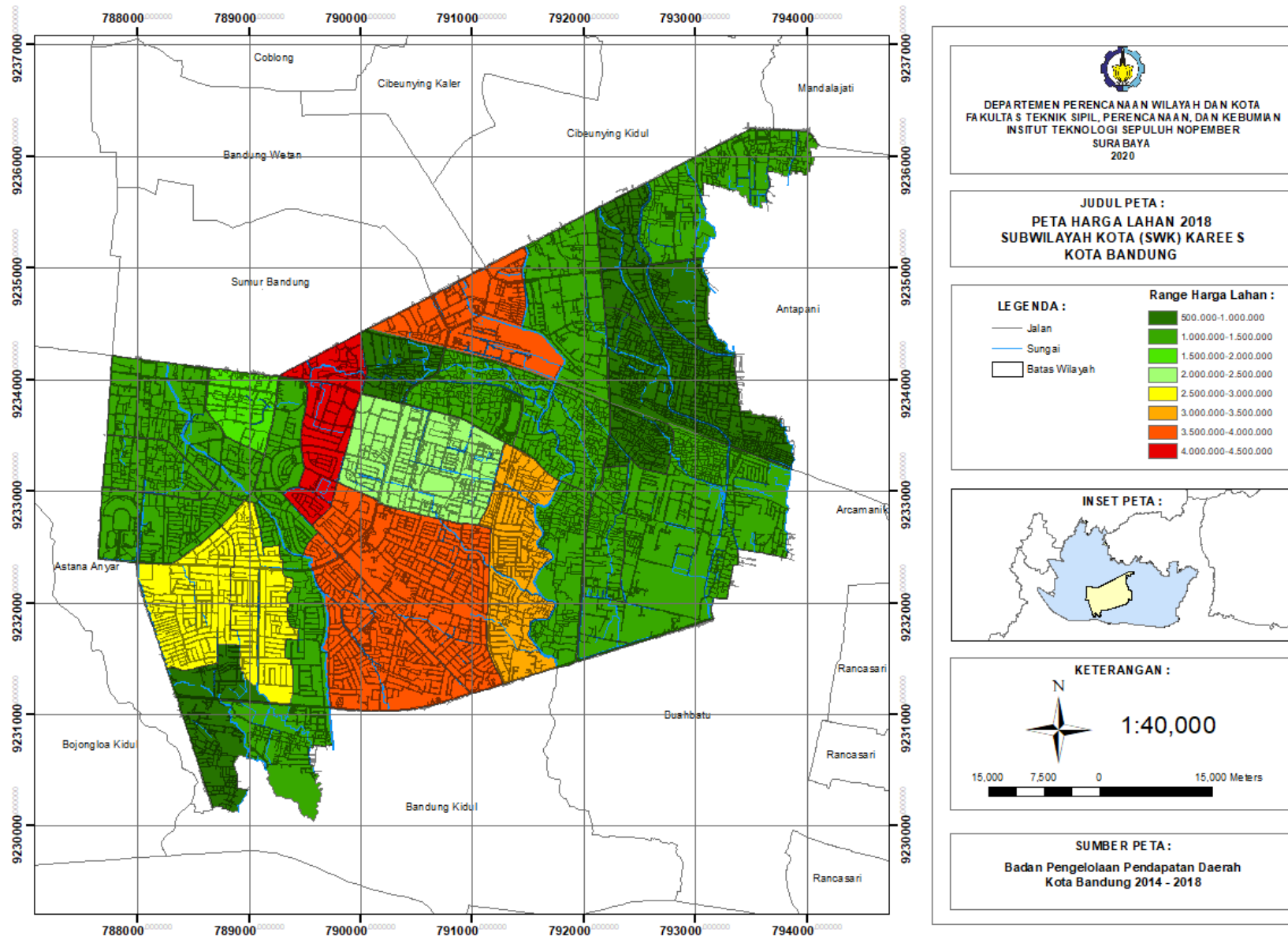


**Gambar 4.15** Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2016  
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit



**Gambar 4.16** Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2017  
 Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit





**Gambar 4.17** Peta Harga Lahan SWK Karees Tahun 2018  
 Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

#### 4.1.7 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang terbuka hijau (RTH) publik yang ada di SWK Karees terdiri dari taman skala RT/RW, taman lingkungan, taman kota, jalur hijau di sepanjang jalan atau sungai, dan taman pemakaman umum (TPU). RTH publik di SWK Karees hanya mencapai 3,18% dari luas wilayah SWK Karees.

Setiap kecamatan di SWK Karees dilengkapi dengan RTH publik, seperti Taman Kiara Artha, TPU Gumuruh, dan TPU Maleer di Kecamatan Batununggal, Taman Tri G dan Taman Karapitan UNLA di Kecamatan Lengkong, Taman Komplek Bumi Asri Sukapura dan Jalur Hijau Taman Boulevard 1-5 di Kecamatan Kiaracondong, serta Taman Alun-Alun Bandung, Taman Lapangan Tegalega, dan Jalur Hijau BKR di Kecamatan Regol.

Data luas RTH Publik di SWK Karees dapat dilihat pada Tabel 4.11.

**Tabel 4.11 Luas RTH Lima Tahun Terakhir pada SWK Karees, Kota Bandung**

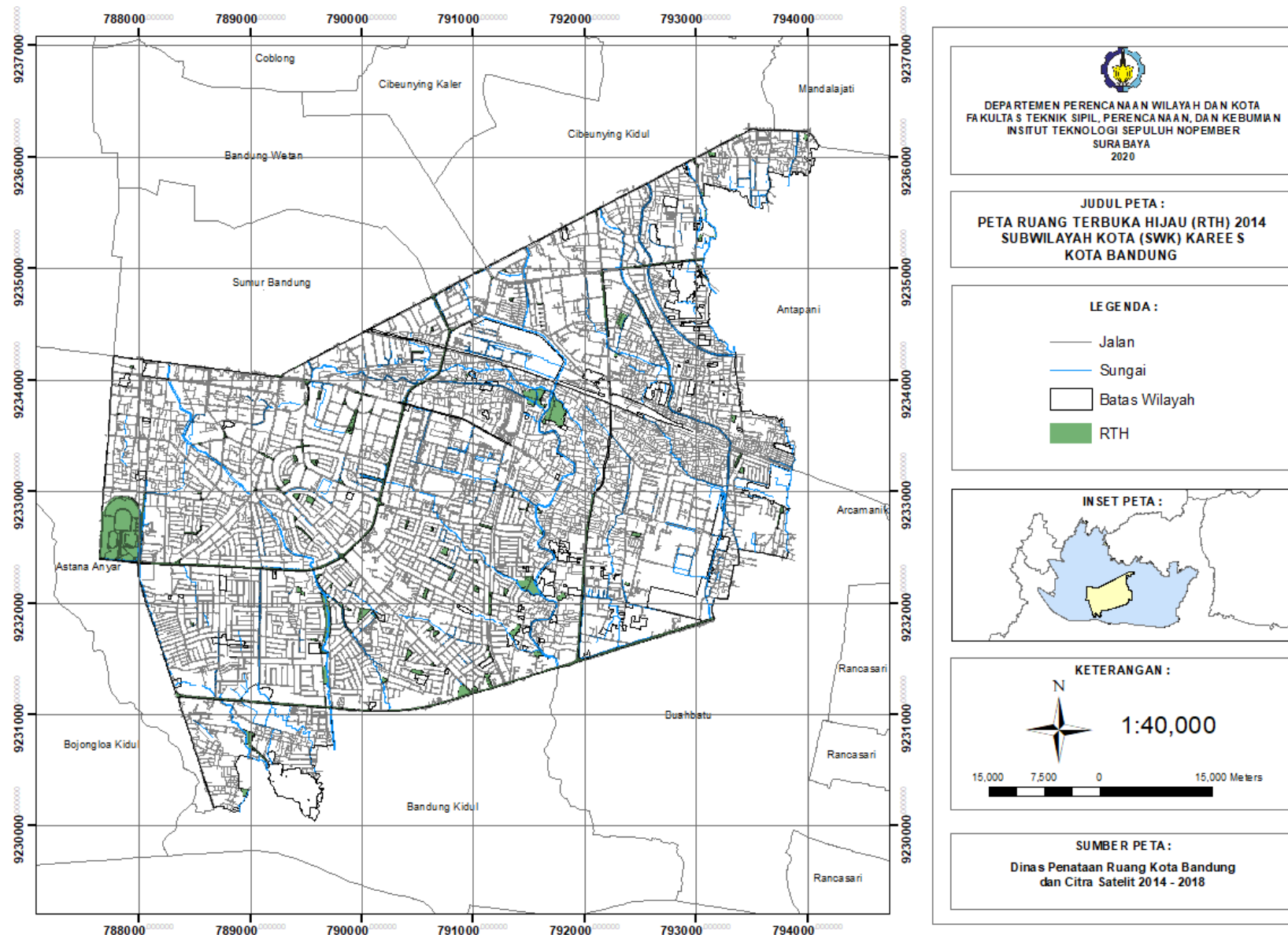
Kecamatan	Luas RTH Publik (ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kiaracondong</b>	8.51	8.52	8.54	8.55	8.56
<b>Regol</b>	27.25	29.07	29.08	29.09	29.21
<b>Batununggal</b>	13.17	13.18	13.19	13.20	26.54
<b>Lengkong</b>	13.52	13.53	13.53	13.54	13.55
Total	62.45	64.29	64.33	64.37	77.86

*Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit*

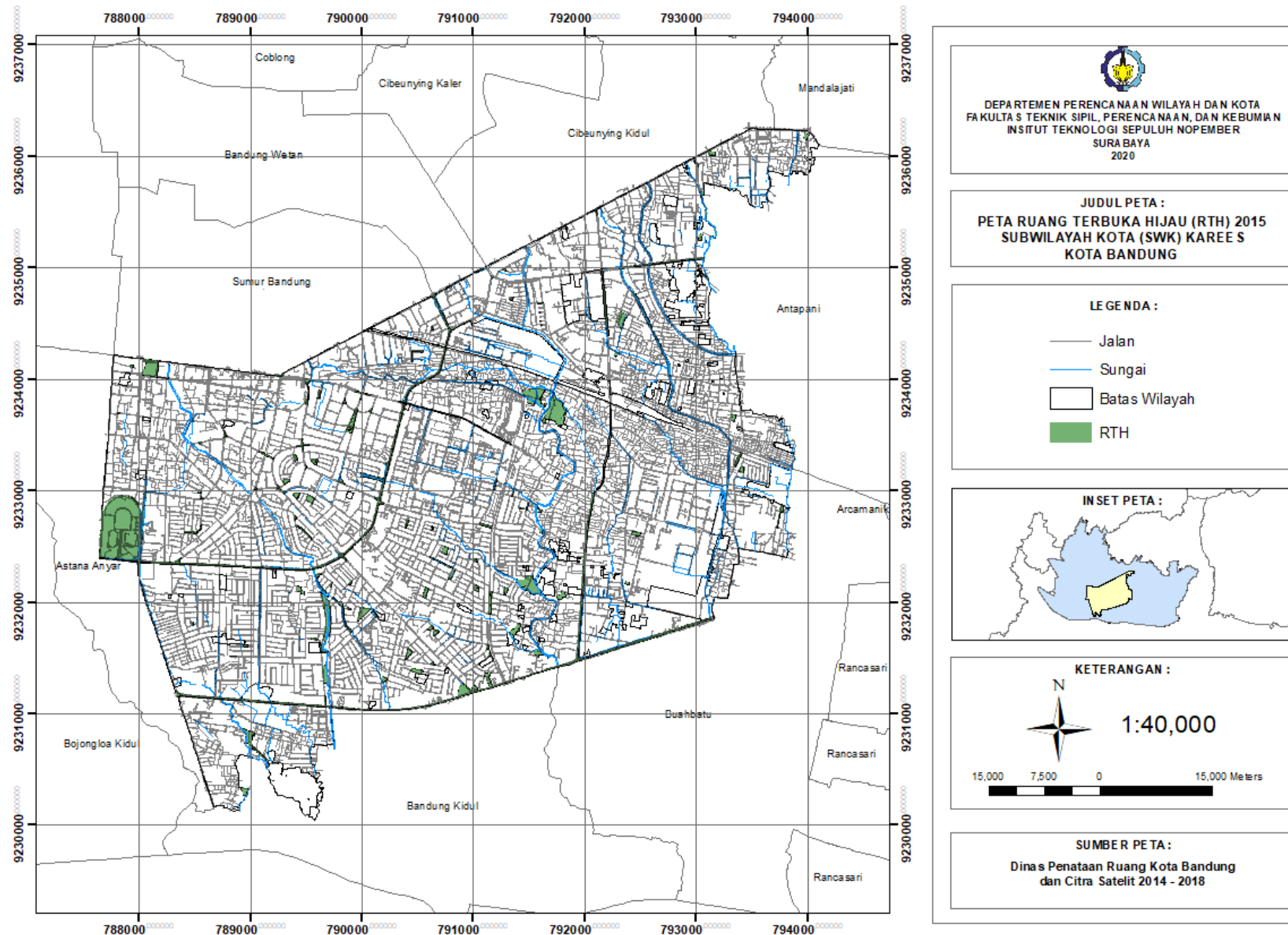


**Gambar 4.18** RTH Publik di SWK Karees  
*Sumber: Survey Primer dan Google, 2020*

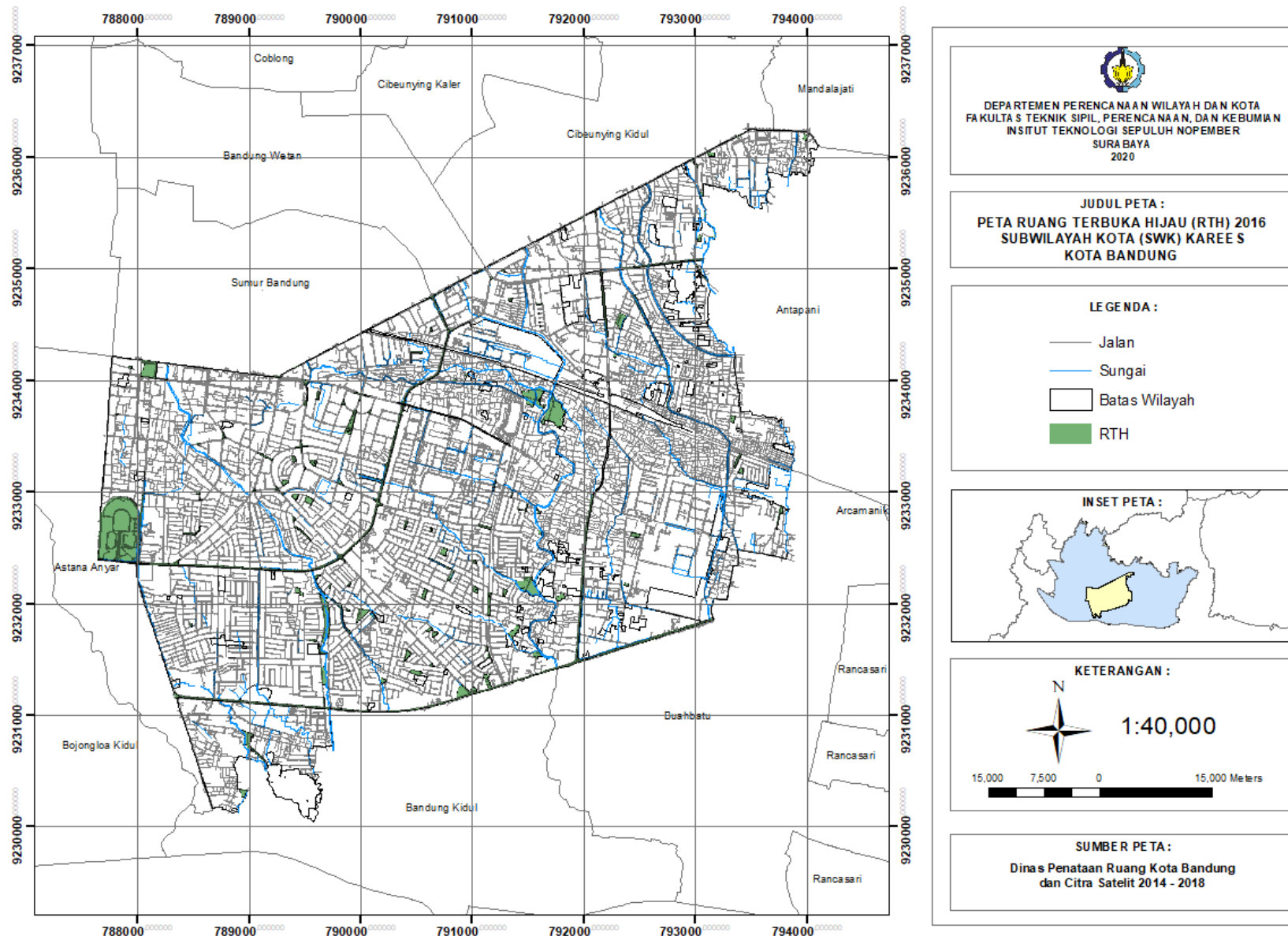




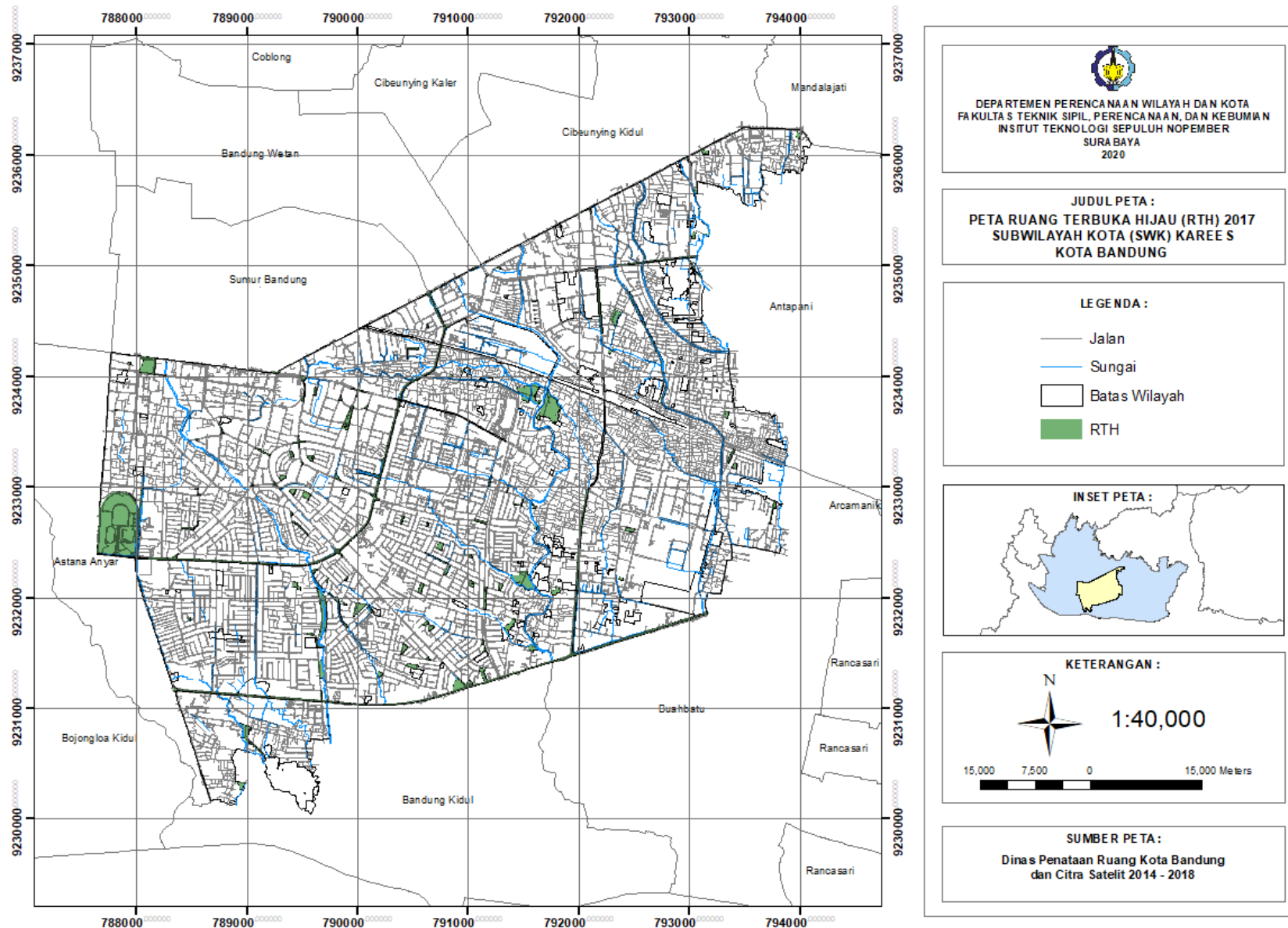
**Gambar 4.19** Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2014  
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit



**Gambar 4.20** Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2015  
 Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit

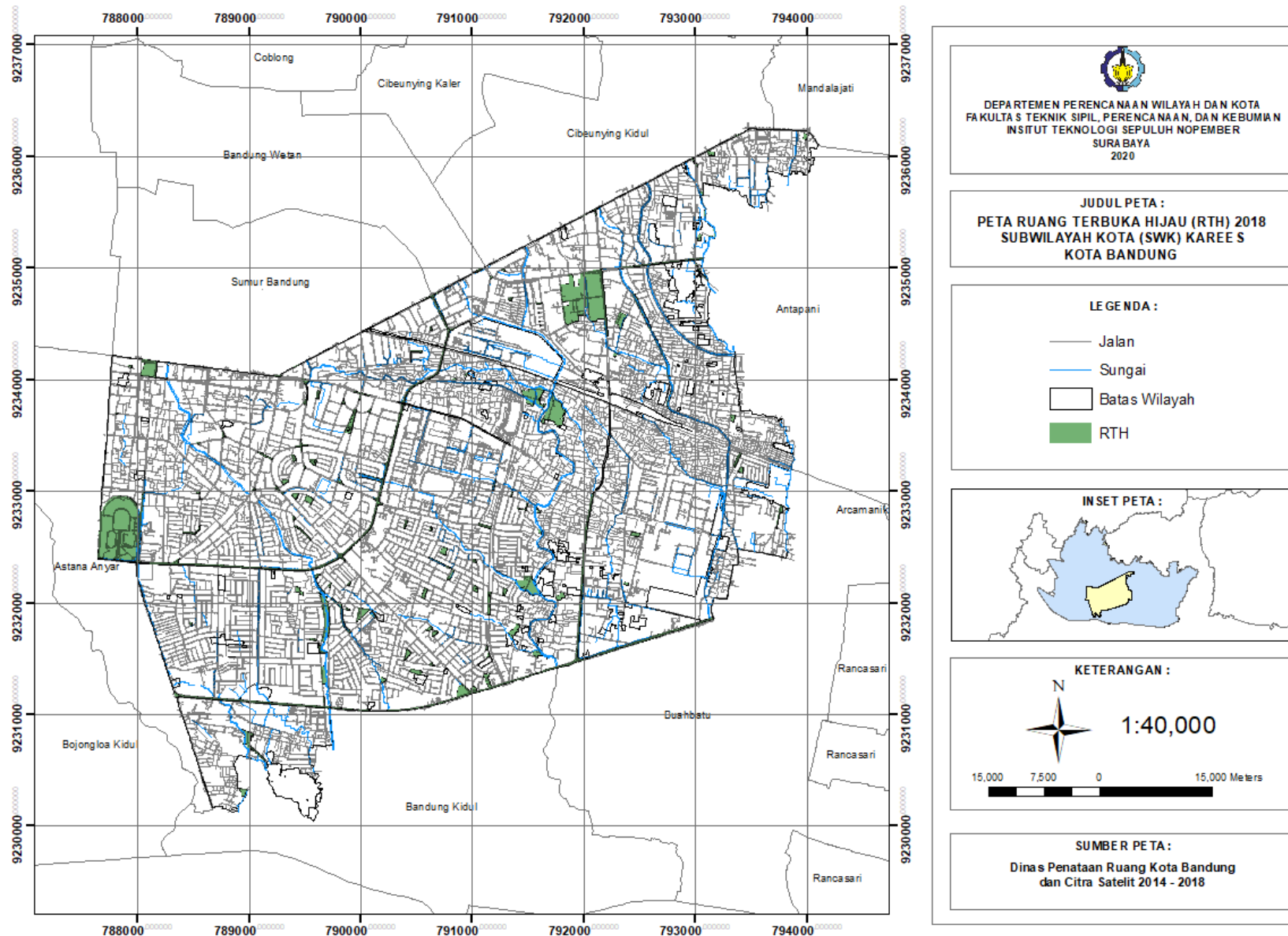


**Gambar 4.21** Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2016  
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit



**Gambar 4.22** Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2017  
 Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit





**Gambar 4.23** Peta RTH Publik SWK Karees Tahun 2018  
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Citra Satelit

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

## 4.2 Analisis dan Pembahasan

### 4.2.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH Publik di SWK Karees, Kota Bandung

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH Publik di SWK Karees, digunakan teknik *content analysis*. Dalam mendukung teknik *content analysis*, dilakukan wawancara menggunakan teknik *in-depth interview* kepada *stakeholders* yang terpilih. *Stakeholders* yang terpilih diharapkan dapat memberikan informasi mengenai RTH publik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, Kota Bandung.

Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan indikator dan variable yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, Kota Bandung berdasarkan kajian pustaka yang telah disusun penulis.

Kemudian, tahap kedua adalah menentukan dan menetapkan *stakeholders* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Stakeholders* yang telah ditetapkan didapat dari hasil analisis *stakeholders* berdasarkan tingkat kepentingan, tingkat pengaruh, dan tingkat dampak kepada penelitian. *Stakeholders* yang dipilih memiliki hubungan, kapasitas, dan wawasan pengetahuan mengenai RTH perkotaan. *Stakeholders* yang telah ditetapkan akan berperan dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, Kota Bandung.

Selanjutnya, tahap ketiga adalah melakukan proses wawancara dengan *stakeholders* yang telah ditentukan. Wawancara dengan *stakeholders* dilakukan dengan teknik wawancara *in-depth interview*, dimana proses tanya jawab dilakukan secara tatap muka antara penulis dengan *stakeholders*.

Proses wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur, dimana penulis sudah menyiapkan form wawancara berisi pertanyaan yang akan diberikan, kemudian pertanyaan akan berkembang sesuai dengan kondisi pada saat proses wawancara berlangsung. Dalam proses wawancara *stakeholders*, penulis mengunjungi langsung *stakeholders* sesuai jadwal yang telah disepakati. Adapun daftar *stakeholders* yang menjadi input dalam proses *content analysis* ini dapat dilihat pada Tabel 4.12.

**Tabel 4.12 Stakeholders Terpilih**

No	Kode	Nama	Instansi	Jabatan
1	P1	Yuni Sri Handayani, ST, MT, M.Eng	Dinas Penataan Ruang Kota Bandung	Fungsional Perencana Ahli Muda
2	P2	Andry Heru Santoso, ST, MT	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan ( <i>Bappelitbang</i> ) Kota Bandung	Kasubid I Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3	P3	Dwi Priyono, S.P.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung	Kepala Seksi Pengembangan Pertamanan
4	A1	Fachmy Sugih Pradifta, ST., MT.	Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota	Universitas Islam Bandung



No	Kode	Nama	Instansi	Jabatan
5	A2	Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP	Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)	Institut Teknologi Bandung

*Sumber: Penulis, 2020*

Setelah proses wawancara selesai, dilakukan tahap keempat yaitu pemberian *symbol coding*. Sebelum melakukan pemberian *symbol coding*, penulis melakukan transkrip wawancara terlebih dahulu, kemudian pemberian *symbol coding* dikelompokkan sesuai dengan variable yang telah didapat pada proses tinjauan pustaka. Tahap ini dilakukan dengan cara mengamati penjelasan yang diberikan oleh masing-masing *stakeholders* dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Adapun tabel pengelompokkan variable dapat dilihat pada Tabel 4.13.

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

**Tabel 4.13 Tabel Pengkodean dan Pengelompokkan Variable berdasarkan Transkrip Wawancara**

No	Indikator	Variabel	Stakeholders				
			P1	P2	P3	A1	A2
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk	P1.1	P2.1	P3.1	A1.6	A2.1
			P1.2	P2.3		A1.11	A2.2
			P1.3	P2.4		A1.12	A2.3
2	Jenis Penggunaan Lahan	Permukiman	P1.6	P2.2 P2.7	P3.4 P3.5	A1.7 A1.10	A2.7
		Perdagangan dan Jasa	P1.4	P2.2 P2.7 P2.8	P3.6	A1.8 A1.10	A2.4 A2.7
		Industri	P1.5	P2.9	P3.7	-	A2.4
		Fasilitas Umum	-	P2.2 P2.10	P3.8	A1.9 A1.10	A2.7
3	Tingkat Alih Fungsi Lahan	Tingkat alih fungsi lahan	P1.8	P2.12	P3.10	A1.13 A1.14 A1.15	A2.10
4	Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan	P1.10	P2.5 P2.11	P3.9	A1.1 A1.3	A2.5 A2.8
5	Harga Lahan	Harga Lahan	P1.7	P2.6	P3.2	A1.2	A2.6
			P1.9	P2.13		A1.4	A2.9
				P2.14		A1.5	

*Sumber: Penulis, 2020*

Tahapan kelima adalah melakukan proses pemahaman. Proses pemahaman adalah memahami fenomena kontekstual dari teks wawancara yang telah disusun guna mengarahkan analisis suatu data untuk menghubungkan teks wawancara dengan penjelasan secara deskriptif. Setelah itu, dilakukan tahap terakhir yaitu merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di SWK Karees, kota Bandung. Hasil dari pemahaman data transkrip wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.14.

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

**Tabel 4.14 Tabel Pemahaman Data Transkrip Wawancara**

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
Kependudukan	Jumlah Penduduk	P1	Jumlah penduduk yang padat dapat mempengaruhi suatu kota dalam penyediaan RTH publik seperti taman kota gitu ya. Saya kurang tahu apakah memang di Karees ini terpadat. Seharusnya jumlah penduduk itu linear dengan jumlah kebutuhan ruang akan RTH	P1.1	Menurut pemerintah, bertambahnya jumlah penduduk di SWK Karees menyebabkan kebutuhan akan O2 juga bertambah sehingga dibutuhkan luasan RTH publik yang besar. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk di SWK Karees, maka kebutuhan pembangunan infrastruktur kota juga meningkat sehingga menyebabkan jumlah	Dalam pemenuhan RTH publik di SWK Karees, jumlah penduduk memiliki peran, yaitu : 1. Penentuan standart skala pelayanan jenis-jenis taman di SWK Karees berdasarkan jumlah penduduk 2. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan meningkatkan permintaan pembangunan infrastruktur
			Karena jumlah penduduk itu mempengaruhi suatu kota untuk melakukan	P1.2		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			pembangunan seperti pembangunan permukiman, perjas, dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah untuk penunjang kehidupan masyarakat. Jumlah luasan zona untuk permukiman, perjas, dan fasum itu jadi bertambah akibat penduduk yang jumlahnya membludak, seperti yang terjadi di Karees juga ya.		RTH semakin sedikit. Selain itu, jumlah penduduk juga diperlukan untuk menentukan standart skala pelayanan jenis-jenis taman di SWK Karees.	perkotaan yang menyebabkan jumlah RTH semakin sedikit. 3. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan meningkat pula kebutuhan O2 bagi penduduk, sehingga dibutuhkan RTH publik untuk memenuhi kebutuhan O2 masyarakat

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			Jadi memang secara teori pun semakin banyak penduduk di Karees maka harus diimbangi dengan RTH yang memadai karena kaya kebutuhan oksigen gitu kan pengaruh ke masyarakat Karees sendiri. RTH itu kan dapat memberikan kebutuhan oksigen bagi masyarakat.	P1.3		
		P2	Penduduk di kota itu kan semakin padat tapi ruang kota itu semakin kecil, padahal harusnya semakin banyak	P2.1		



Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			penduduk maka RTH juga semakin banyak			
			Iya, kan ada kan standart nya kan? Standart di Kementerian PU, artinya untuk misalnya di Karees, sekarang kan penduduknya yang kota Bandung itu sekian puluh ribu, berapa taman kota yang dibutuhkan untuk jumlah penduduk dengan jumlah itu. Kemudian yang taman skala kawasan, ada juga standart pelayanan minimum kan nanti	P2.3		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			tolong di cek, jadi ada yang taman skala kota, misalnya berapa setiap satu juta penduduk harus ada taman skala kota, kemudian setiap 500 ribu, nanti ada taman skala kawasan, ada yang lebih lagi yang lingkungan.			
			Selain itu, semakin bertambahnya penduduk maka semakin bertambah juga jumlah perumahan dan infrastruktur kotanya yang menyebabkan RTH semakin sedikit karena	P2.4		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			<p>permintaan kebutuhan akan pembangunan kawasan terbangunnya tinggi. Sama halnya yang terjadi di Karees, bisa kita lihat disitu penuh sekali dengan permukiman dan perjas, karena memang permintaannya tinggi akibat jumlah penduduk disana yang padat.</p>			
		P3	<p>Oh iya mempengaruhi, kan ada standarnya itu satu taman untuk melayani berapa ratus penduduk. Jadi jumlah penduduk memang</p>	P3.1		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			mempengaruhi penyediaan RTH ya, semakin banyak jumlah penduduk maka RTH atau taman yang harus disediakan juga semakin bertambah			
		A1	Beragamnya penggunaan lahan itu muncul akibat semakin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu wilayah, tadi di Karees ya kasusnya, maka semakin meningkat juga permintaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	A1.6	Menurut akademisi, jumlah penduduk mempengaruhi dalam permintaan pembangunan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Hal ini dapat mengakibatkan okupasi fungsi lahan yang semula untuk ruang terbuka hijau	

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			Ya, karena kalau kita kaitkan dengan tingkat kebutuhan oksigen misalnya, kota yang penduduknya banyak atau padat dengan kota yang penduduknya lebih sedikit dengan luas wilayah yang sama tentu kebutuhannya oksigen nya juga berbeda sebetulnya.	A1.11	menjadi kawasan terbangun. Padahal, semakin banyak jumlah penduduk maka seharusnya semakin banyak pula RTH karena kebuthan akan O2 pada penduduk meningkat. Dalam sisi <i>planning</i> , jumlah penduduk dibutuhkan untuk menetapkan kebutuhan RTH publik berdasarkan analisis skala pelayanan jenis-jenis taman perkotaan.	
			Kemudian kalau dari sisi <i>planning</i> nya atau dari skala pelayanannya kalau kita ambil dari Permen PU no 5 tahun 2008	A1.12		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			tentang RTH itu yang bisa kita analisis berdasarkan skala pelayanannya kan kalau taman lingkungan bisa untuk berapa orang sampai taman kota itu kan juga bisa ketemu berapa jumlahnya.			
		A2	Karena jumlah penduduk yang terus bertambah jadi yang ruang terbuka hijau pun banyak yang bergeser fungsinya diokupasi, terutama sempadan-sempadan sungai itu yang	A2.1		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			kemudian mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau.			
			Jadi semakin banyak orang, 35 m2 atau jiwa perorang gitu ya, harusnya semakin banyak orang ya RTH nya semakin besar, dan itukan rasional. Orang kalau memang memanfaatkan oksigen ya makin banyak orang oksigennya terus semakin banyak berarti ruang terbukanya semakin banyak	A2.2		
			Tapi betul itu sebenarnya	A2.3		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			mempengaruhi karena sebetulnya semakin banyak orang semakin perlu ruang terbuka hijau untuk mensuplai oksigen. Nah selain itu, jumlah penduduk juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan pola ruang suatu kota. Ketika penduduk suatu wilayah terus <i>growing up</i> , maka wilayah tersebut harus membangun fasilitas penunjang kehidupan penduduknya.			
	Permukiman	P1	Berbeda ya dengan perumahan	P1.6	Menurut pemerintah, adanya penambahan	Penambahan luas lahan untuk



Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
Jenis Penggunaan Lahan			permukiman di Karees, kalau mereka kan kadang masih ada yang menyediakan taman meskipun hanya skala kecil, skala perumahan, tapi itu membantu dalam penyediaan RTH publik, walaupun apabila pola ruang di Karees berubah menjadi perumahan permukiman maka otomatis fungsi taman juga akan semakin sedikit, karena tidak semua perumahan menyediakan taman		luas lahan untuk permukiman di Karees akan mengakitbatkan berkurangnya jumlah RTH publik, karena perumahan dinilai lebih produktif secara ekonomi daripada RTH publik. Walaupun seharusnya setiap perumahan atau permukiman di Karees memberikan beberapa persen lahannya untuk pemerintah agar	permukiman di SWK Karees dapat mempengaruhi penyediaan RTH publik, karena : 1. Dengan dibangunnya permukiman, maka lahan didominasi oleh lahan terbangun sehingga sulit dalam penyediaan RTH publik. 2. Permukiman dinilai lebih produktif secara ekonomi daripada RTH publik.

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
		P2	Intinya kalau semua lahan diperuntukan untuk perumahan untuk infrastruktur lain seperti fasum atau komersil nanti lama-lama kan semakin sedikit RTH nya karena sudah terbangun.	P2.2	dapat dibangun RTH publik, namun kenyataannya masih terdapat perumahan yang tidak memberikan lahannya kepada pemerintah sehingga pemerintah kesulitan dalam mengelola penyediaan RTH publik.	3. Terdapat permukiman yang tidak memberikan beberapa persen lahannya kepada pemerintah sehingga pemerintah kesulitan dalam mengelola penyediaan RTH publik.
			Kemudian juga fungsi tadi ya perdagangan dan jasa tentunya juga ada kebutuhan lain juga termasuk perumahan, kan kebutuhan perumahan semakin ya artinya kalau lahan itu kan	P2.7	publik tetap dapat terpenuhi. Namun, sudah ada beberapa permukiman di Karees yang membantu penyediaan RTH publik karena terdapat beberapa	4. Permukiman dapat menyumbang kebutuhan RTH publik karena terdapat beberapa permukiman yang memiliki taman skala RW didalamnya.

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			kecenderungan pasarnya dia akan produktif secara ekonomi kan, kalau taman kan gak menghasilkan pemasukan		permukiman yang telah memiliki taman skala RW didalamnya.	5. Permukiman memiliki peran dalam menentukan jenis RTH publik yang dibutuhkan seperti taman skala RW berupa taman bermain atau taman olahraga.
		P3	Ada perumahan apa gitu, eh beberapa perumahannya di Karees belum diserahkan ke pemerintah kota, ruang terbukanya, jadi kita tidak bisa membangun juga karena itu kan masih lahan pemilik pengembang. Jadi memang sebenarnya	P3.4		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			perumahan atau permukiman gitu ya, di situ harusnya membangun RTH publik tiap satu perumahan, tapi banyak yang tidak bikin atau tidak menyerahkan lahannya untuk dibangun RTH publik, sehingga jadi kurang jumlah RTH nya			
			Ya kaya misalnya permukiman, walaupun jadi lahan terbangun tapi pasti ada tamannya kan setiap permukiman ada	P3.5		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			taman skala RW itu misalnya, meskipun pasti lebih banyak luasan untuk perumahannya daripada RTH nya			
		A1	Jadi misalnya memang kalau di Karees terdapat perumahan atau permukiman maka pasti dibutuhkan RTH publik yaitu taman perumahan seperti <i>playground</i> atau taman bermain atau taman olahraga gitu kan ya karena ada kebutuhan ekologis dan sosial budaya tadi bagi	A1.7	Menurut akademisi, apabila terdapat penambahan luas lahan untuk perumahan maka akan menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan RTH publik karena lahan sudah menjadi lahan terbangun. Selain itu, jenis penggunaan lahan juga akan	

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			masyarakat Karees dan kebutuhan perencanaan disitu			mempengaruhi jenis RTH publik yang dibutuhkan, seperti perumahan akan lebih dibutuhkan taman perumahan seperti <i>playground</i> dan taman olahraga untuk aktivitas sosial dan kebutuhan ekologis bagi masyarakat di sekitar perumahan.
			Faktor penentu kebutuhannya menurut saya ada dengan keragaman aktivitas dari beragamnya penggunaan lahan yang ada seperti fasum, perjas, perumahan tadi, sehingga akan membentuk karakter yang dibutuhkan pada lokasi tersebut sekiranya selain kepada luasan juga terhadap kegiatan yang ditampung.	A1.10		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
		A2	Meskipun memang bila lahan sudah menjadi lahan terbangun untuk permukiman, komersil, atau infrastruktur penunjang lainnya akan lebih sulit dalam penyediaan RTH publiknya.	A2.7		
	Perdagangan dan Jasa	P1	SWK Karees dari dulunya memang ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi utama komersil. Nah sedangkan, menurut saya, kalau suatu daerah yang sudah didominasi oleh kegiatan komersil atau	P1.4	Menurut pemerintah, penambahan luas lahan di SWK Karees untuk perdagangan dan jasa akan menyebabkan berkurangnya luas lahan untuk RTH publik karena perdagangan dan jasa	Penambahan luas lahan untuk perdagangan dan jasa dapat mempengaruhi penyediaan RTH publik SWK Karees, karena : 1. Dengan dibangunnya perdagangan dan

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			ditetapkan sebagai fungsi utamanya komersil pasti akan memiliki RTH yang sedikit, karena komersil boro-boro mau menyediakan RTH apalagi taman gitu ya.		produktif secara ekonomi yang dapat memberikan pemasukan bagi banyak pihak, sedangkan RTH publik dinilai kurang produktif secara ekonomi. Selain itu, pelaku usaha pun tidak menyumbang atau menyediakan RTH publik di sekitar kawasan perdagangan dan jasa pada SWK Karees.	jasa, maka lahan didominasi oleh lahan terbangun sehingga sulit dalam penyediaan RTH publik. 2. Perdagangan dan jasa dinilai memiliki produktif secara ekonomi yang dapat memberikan pemasukan bagi banyak pihak daripada RTH publik 3. Perdagangan dan jasa mempengaruhi faktor penentu kebutuhan RTH publik di suatu
		P2	Intinya kalau semua lahan diperuntukan untuk perumahan untuk infrastruktur lain seperti fasum atau komersil nanti lama-lama kan semakin sedikit RTH nya karena sudah terbangun.	P2.2		



Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			Kemudian juga fungsi tadi ya perdagangan dan jasa tentunya juga ada kebutuhan lain juga termasuk perumahan, kan kebutuhan perumahan semakin ya artinya kalau lahan itu kan kecenderungan pasarnya dia akan produktif secara ekonomi kan, kalau taman kan gak menghasilkan pemasukan	P2.7		kawasan seperti RTH publik yang bersifat lebih sosial dengan skala kota untuk <i>event-event</i> budaya atau kegiatan usaha.
			Tapi kalau dia jadi hotel jadi café jadi apartemen atau	P2.8		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			komersil lainnya kan bisa ada pemasukan, makanya kecenderungannya akan beralih fungsi menjadi kawasan-kawasan yang produktif secara ekonomi			
		P3	Kalau jadi komersil gitu jadi perdagangan jasa, pasti jadi tidak ada RTH publiknya.	P3.6		
		A1	Tapi takutnya akan berbeda dengan daerah yang mendominasi kegiatan perjas misalnya, sama-sama membutuhkan RTH	A1.8	Menurut akademisi, apabila terdapat penambahan luas lahan untuk perdagangan dan jasa maka akan	

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			tapi mungkin RTH seperti apa yang perlu diadakan disitu, mungkin dia butuhnya ruang terbuka yang sifatnya lebih sosial seperti taman skala kota untuk event-event budaya misalnya atau kegiatan usaha yang sifatnya <i>temporer</i> untuk seperti pasar malam dan sebagainya		menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan RTH publik karena lahan sudah menjadi lahan terbangun. Jenis penggunaan lahan mempengaruhi faktor penentu kebutuhan RTH publik pada suatu kawasan, seperti untuk perdagangan dan jasa	
			Faktor penentu kebutuhannya menurut saya ada dengan keragaman aktivitas dari beragamnya penggunaan lahan yang	A1.10	dibutuhkan RTH publik yang bersifat lebih sosial dengan skala kota untuk event-event budaya atau kegiatan usaha.	

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			ada seperti fasum, perjas, perumahan tadi, sehingga akan membentuk karakter yang dibutuhkan pada lokasi tersebut sekiranya selain kepada luasan juga terhadap kegiatan yang ditampung.			
		A2	Penyediaan RTH publik memang akan dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan eksisting karena setiap jenis penggunaan lahan itu harus wajib menyediakan RTH publik, harusnya. Tapi	A2.4		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			nyatanya banyak yang tidak menyediakan RTH publik tuh kaya industry atau perjas-perjas seperti mall,ruko, pasti dia berpikinya uang-uang aja kan tidak memikirkan RTH lah ngapain. Padahal RTH dapat membantu mengurangi polusi yang dihasilkan dari kegiatan industry tersebut.			
			Meskipun memang bila lahan sudah menjadi lahan terbangun untuk permukiman, komersil,	A2.7		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			atau infrastruktur penunjang lainnya akan lebih sulit dalam penyediaan RTH publiknya.			
	Industri	P1	Sebenarnya industry itu menyumbangkan RTH yang lumayan namun statusnya itu RTH private bukan RTH publik yang dapat dikelola oleh pemerintah. Sehingga kalau dikatakan menyediakan RTH publik tidak ya industry itu, karena ketika sudah jadi industry maka	P1.5	Menurut pemerintah, penambahan luas lahan untuk industry di SWK Karees akan menyebabkan berkurangnya jumlah RTH publik karena apabila suatu industry tetap menyediakan RTH, RTH tersebut bersifat private, meskipun tidak semua industry di SWK Karees	Penambahan luas lahan untuk permukiman di SWK Karees dapat mempengaruhi penyediaan RTH publik perkotaan, karena : 1. Dengan dibangunnya perindustrian, maka lahan didominasi oleh lahan terbangun sehingga sulit dalam

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			lahannya kan akan milik swasta, segala yang ada disitu milik swasta. Meskipun misal ada industry yang membuat taman gitu didalamnya, ya tapi itu tidak bisa diakses oleh publik, tidak bisa dikelola oleh pemerintah. Namun dapat dilihat sendiri ya terjadi pengurangan luas industry di Karees, yang di daerah Kircon itu, yang memang memiliki dampak bagi penyediaan RTH publik. Jadi di Karees		menyediakan RTH sendiri. Perubahan lahan menjadi industry di SWK Karees juga menyebabkan sulitnya penyediaan RTH publik karena lahan sudah menjadi lahan terbangun. Selain itu, pada SWK Karees terjadi pengurangan lahan industry yang ditujukan untuk penambahan luas RTH publik.	penyediaan RTH publik. 2. Meskipun perindustrian menyediakan RTH, RTH tersebut akan bersifat private, bukan publik. 3. Terdapat pengurangan luasan industri di SWK Karees yang menyebabkan penambahan luasan RTH publik. 3. Terdapat industry yang tidak menyediakan RTH publik meskipun

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			gak semata-mata selalu penambahan luas industry karena sudah tidak ada lahan lagi			seharusnya pembangunan industry diimbangi dengan penyediaan RTH publik karena dapat membantu mengurangi polusi yang dihasilkan dari kegiatan industry.
		P2	Saya rasa tidak ya, industry tidak menyediakan RTH publik karena pasti 90% lahannya sudah menjadi lahan terbangun kan, paling ya private statusnya	P2.9		
		P3	Apalagi di Kiaracandong itu kan banyak industrinya tapi RTH publiknya sedikit sekali, karena ya memang tidak	P3.7		



Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			disediakan oleh si industrinya.			
		A1	Tidak berpendapat	-	Menurut akademisi, penambahan luas lahan untuk industry seharusnya diimbangi dengan penyediaan RTH publik, namun banyak industry yang tidak menyediakan RTH publik.	
		A2	Penyediaan RTH publik memang akan dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan eksisting karena setiap jenis penggunaan lahan itu harus wajib menyediakan RTH publik, harusnya. Tapi nyatanya banyak yang tidak menyediakan RTH publik tuh kaya industry atau perjas-perjas seperti mall,ruko, pasti dia berpikinya uang-uang	A2.4		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			aja kan tidak memikirkan RTH lah ngapain. Padahal RTH dapat membantu mengurangi polusi yang dihasilkan dari kegiatan industry tersebut.			
	Fasilitas Umum	P1	Tidak berpendapat	-	Menurut pemerintah, penambahan luas lahan untuk fasilitas umum akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan RTH publik karena lahan sudah menjadi lahan terbangun. Selain itu, apabila fasilitas	Penambahan luas lahan untuk permukiman di SWK Karees dapat mempengaruhi penyediaan RTH publik, karena : 1. Dengan dibangunnya fasilitas umum, maka lahan didominasi
		P2	Intinya kalau semua lahan diperuntukan untuk perumahan untuk infrastruktur lain seperti fasum atau komersil nanti lama-lama kan semakin sedikit RTH nya karena sudah terbangun.	P2.2		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			Iya, fasilitas umum itu juga tidak menyediakan RTH publik sih malah menyediakannya RTH private kan seperti lapangan didalam rumah sakit misalnya kaya di Santosa itukan. Tapi tidak terhitung RTH publik. Paling yang membantu itu jalur hijau di sekitarnya ya.	P2.10	umum tetap menyediakan RTH, status RTH tersebut adalah RTH private.	oleh lahan terbangun sehingga sulit dalam penyediaan RTH publik. 2. Meskipun fasilitas umum menyediakan RTH, RTH tersebut akan bersifat private, bukan publik. 3. Fasilitas umum mempengaruhi faktor penentu kebutuhan RTH publik di suatu kawasan seperti lapangan atau taman publik.
		P3	Kalau fasilitas umum ya sama sih tidak menyediakan RTH publik juga, karena kalau sudah jadi lahan	P3.8		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			terbangun jadi si jenis-jenis penggunaan lahan itu pasti udah susah dalam penyediaan RTH publiknya. Tapi kan ada tuh kaya kantor atau rumah sakit yang menyediakan taman, tapi ya private statusnya ya bukan publik			
		A1	Atau contoh lagi, fasilitas umum, untuk kegiatan sekolah misalnya, RTH apa yang dibutuhkan? Pasti butuh nya seperti lapangan, atau taman publik yang memiliki	A1.9	Menurut akademisi, apabila terdapat penambahan luas lahan untuk fasilitas umum maka akan menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan RTH	

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			lapangan yang bisa digunakan anak-anak sekolah untuk berolahraga dan juga bisa untuk kegiatan belajar mengajar diluar sekolah seperti kegiatan yang berhubungan dengan alam.		publik karena lahan sudah menjadi lahan terbangun. Jenis penggunaan lahan mempengaruhi faktor penentu kebutuhan RTH publik pada suatu kawasan, seperti untuk fasilitas umum dibutuhkan RTH publik seperti lapangan atau taman publik.	
			Faktor penentu kebutuhannya menurut saya ada dengan keragaman aktivitas dari beragamnya penggunaan lahan yang ada seperti fasum, perjas, perumahan tadi, sehingga akan	A1.10		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			membentuk karakter yang dibutuhkan pada lokasi tersebut sekiranya selain kepada luasan juga terhadap kegiatan yang ditampung.			
		A2	Meskipun memang bila lahan sudah menjadi lahan terbangun untuk permukiman, komersil, atau infrastruktur penunjang lainnya akan lebih sulit dalam penyediaan RTH publiknya.	A2.7		
<b>Tingkat Alih Fungsi Lahan</b>	Tingkat Alih	P1	Ya ada alih fungsi lahan, namun disini kondisinya adalah dari	P1.8	Menurut pemerintah, alih fungsi lahan di SWK Karees tidak	Peluang terjadinya alih fungsi lahan dari zona RTH menjadi

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
	Fungsi Lahan		terbangun menjadi RTH sehingga memiliki dampak positif ya. Karena sebetulnya kalau lahan itu sudah ditetapkan sebagai RTH di pola ruang RDTR itu dia tidak akan bisa di alih fungsi.		dijumpai karena apabila suatu lahan telah ditetapkan sebagai RTH publik pada RDTR maka tidak dapat dialih fungsikan menjadi lahan terbangun. Namun, bila alih fungsi lahan tetap terjadi, alih fungsi lahan yang terjadi adalah lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun.	lahan terbangun di SWK Karees kecil karena apabila suatu lahan telah ditetapkan menjadi zona RTH pada RDTR maka lahan tersebut tidak dapat dialih fungsikan menjadi lahan terbangun. Peraturan tersebut juga telah ditaati oleh pemerintah maupun masyarakat di SWK Karees.
		P2	Ya ada sepertinya lahan untuk RTH namun jadi kawasan terbangun mungkin, tapi kan itu namanya pelanggaran tata ruang, tapi kayaknya di Karees tidak ada ya	P2.12		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
		P3	Mungkin ada alih fungsi lahan dari RTH ke terbangun tapi kecil, karena bila suatu lahan memang sudah diperuntukan menjadi ruang terbuka hijau ya tidak boleh diubah lagi peruntukannya oleh Dinas Tata Ruang.	P3.10		
		A1	Jadi, mungkin pada kenyataannya akan sulit sekali. Ketika ada orang yang membangun pada lahan yang memang sudah ditetapkan sebagai zona RTH dan juga akan banyak	A1.13	Menurut akademisi, alih fungsi lahan dari zona RTH publik menjadi lahan terbangun terjadi karena pemerintah kota yang merencanakan perubahan	



Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			<p>pengawasannya disitu tapi yang lebih mungkin itu memang alih fungsinya bukan oleh masyarakat yang apa, yang menduduki lahan itu secara illegal, yang lebih banyak pengaruhnya itu memang alih fungsi yang direncanakan sendiri oleh pemerintah kota</p>		<p>penggunaan lahan tersebut. Namun, alih fungsi lahan tidak hanya terjadi pada zona RTH, melainkan terjadi pula pada zona hijau lainnya seperti lahan pertanian. Meskipun, peluang terjadinya alih fungsi lahan tersebut kecil karena apabila suatu lahan telah ditetapkan menjadi lahan RTH maka tidak dapat diubah dan ditaati oleh pemerintah maupun masyarakat.</p>	
			<p>Ya sawah dan sebagainya ya lahan kosong pokoknya, namun dengan ekspansi pertumbuhan kotanya ya sawah itu</p>	A1.14		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			menjadi lahan terbangun yang memang sudah direncanakan sendiri oleh pemerintah,			
			Sebetulnya itu lebih, menurut saya kan itu porsinya kecil ya menurut saya untuk bisa dijadikan variable yang besar dalam kekurangan RTH, karena bila sudah ditetapkan menjadi zona RTH biasanya juga akan lebih ditaati oleh pemerintah maupun masyarakat.	A1.15		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
		A2	Nah tapi yang ekspansi itu adalah yang tadinya bukan terbangun jadi terbangun, sawah jadi real estate, industry walaupun sebetulnya kalau dari pertanian ya lahan kering lahan terbuka dia masih resapan air gitu ya walaupun tadinya tidak tidak hijau hijau amat lah kalau tidak ada pohonnya, tapi dia masih mending lah ada fungsi ekologisnya, hidrologisnya, walaupun tidak memberikan oksigen.	A2.10		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
<b>Kepadatan Bangunan</b>	Kepadatan Bangunan	P1	Iya betul. Karena semakin padat bangunan kan semakin sedikit lahan untuk ruang hijau publiknya. Kalau padat bangunan kita kesulitan untuk menyediakan RTH publik untuk masyarakat ya karena sudah tidak ada lahan kosong.	P1.10	Menurut pemerintah, kepadatan bangunan akan menyebabkan sulitnya penyediaan RTH publik di SWK Karees karena ketika kepadatan bangunan tinggi maka sudah tidak ada lagi lahan tidak terbangun yang dapat digunakan untuk membangun RTH publik.	Kepadatan bangunan di SWK Karees memberikan dampak dalam penyediaan RTH publik, yaitu : 1. Semakin tinggi kepadatan bangunan pada suatu kawasan maka akan semakin sulit pula dalam penyediaan RTH publik karena sudah tidak tersedia lagi lahan tidak terbangun untuk membangun RTH publik. Padahal, dalam membangun RTH publik,
		P2	Ketersediaan lahan kan semakin susah karena memang di Karees sudah padat bangunan nya sehingga semakin sulit dibangun RTH	P2.5	Sehingga dibutuhkan inovasi untuk membangun RTH publik di SWK Karees.	

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			Kalaupun nanti kepadatan bangunannya sudah terlalu tinggi, artinya untuk penyediaan RTH secara memenuhi standart tadi agak susah, harus ada inovasi.	P2.11		dibutuhkan lahan tidak terbangun agar lebih mudah dan murah dalam penyediaannya.
		P3	Iya, pembangunan permukiman, fasilitas, dan lain-lain akan menyebabkan lahan yang tidak terbangun jadi tidak ada. Kan kalau suatu kawasan dan sudah menjadi lahan terbangun semua, mau bangun	P3.9		2. Semakin tinggi kepadatan bangunan di SWK Karees maka seharusnya semakin banyak pula jumlah RTH publik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan sosial masyarakat didalamnya

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			<p>ruang terbuka hijau nya dimana, kan susah ya karena isinya bangunan semua, kepadatan bangunannya jadi tinggi. Soalnya menyediakan ruang terbuka hijau itu membutuhkan lahan kosong juga ya. Apalagi di Karees itu padat bangunan sekali</p>			
		A1	<p>Di Karees sendiri kan cukup padat ya bangunannya akibat sudah tidak ada lahan kosong disana, kemudian masyarakat Karees yang</p>	A1.1	<p>Menurut akademisi, semakin tinggi kepadatan bangunan di SWK Karees akan memberikan dampak pada masyarakat Karees, yaitu</p>	

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			beraktivitas disitu tentu jadi terkena pengaruh karena menjadi kurang ada ruang terbuka publik untuk melayani masyarakat Karees itu sendiri		masyarakat tidak memiliki ruang publik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan sosial. Kepadatan bangunan yang tinggi juga	
			Strategi seperti itu memang dibutuhkan untuk kawasan yang memiliki kepadatan bangunan tinggi, karena semakin tinggi kepadatan bangunan suatu kawasan maka akan semakin sulit pula penyediaan RTH yang bisa di akses masyarakat, RTH	A1.3	menyebabkan sulitnya penyediaan RTH publik karena sudah tidak ada lagi lahan tidak terbangun, sedangkan dalam membangun RTH publik dibutuhkan lahan tidak terbangun agar lebih mudah dan	

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			publik lah, kalau private mah kan beda ya.		mudah dalam penyediaannya.	
		A2	Nah udah gitu kalau dia tadi misalnya sudah terbangun atau padat bangunan, dengan yang belum terbangun itu pasti lebih mudah, lebih murah untuk yang belum terbangun ya untuk dijadikan RTH publik.	A2.5		
			Ya, semakin padat bangunan pada suatu kawasan seharusnya semakin banyak orang dan semakin perlu ruang terbuka hijau,	A2.8		



Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			baik untuk kesehatan ya penyedia oksigen, maupun untuk sosialnya.			
<b>Harga Lahan</b>	Harga Lahan	P1	Kemudian untuk membebaskan lahan, pemerintah juga melihat dari seberapa mahal lahannya itu, harga lahannya lah. Tinggi rendahnya harga lahan itu berpengaruh tadi ke untuk fungsi bangunan juga, pola ruangnya, perubahan pola ruang itu lagi. Nah kalau orang itu kan kalau	P1.7	Menurut pemerintah, harga lahan yang tinggi menyebabkan sulitnya penyediaan RTH publik karena anggaran pemerintah yang terbatas apabila harus melakukan pembebasan lahan untuk membangun RTH publik. Selain itu, di pusat kota, apabila harga lahan tinggi, lahan tersebut	Harga lahan memiliki pengaruh terhadap penyediaan RTH publik di SWK Karees, yaitu : 1. Semakin mahal harga suatu lahan, maka semakin sulit pula pemerintah untuk menyediakan RTH publik karena anggaran yang dimiliki oleh pemerintah terbatas

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			<p>nilai lahannya tinggi ya, dia kan inginnya itu lahannya dijadikan bangunan, dijadikan komersil, tidak ingin dijadikan taman gitu. Makanya sering kali ditengah kota itu sulit banget mencari lahan untuk dibuat taman gitu.[</p>		<p>akan cenderung menjadi bangunan komersil daripada menjadi RTH publik karena dengan menjadi bangunan komersil dinilai memiliki keuntungan yang lebih besar.</p>	<p>untuk melakukan pembebasan lahan. 2. Suatu lahan dengan harga yang tinggi akan cenderung menjadi bangunan komersil karena bangunan komersil dinilai lebih menguntungkan daripada RTH publik.</p>
			<p>Tapi dalam membebaskan lahan juga tidak semena-mena bisa langsung dilakukan, karena kan anggaran kita juga terbatas, balik lagi ke harga lahan. Bila harga</p>	P1.9		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			lahannya tinggi memang pemerintah cukup sulit untuk membebaskan lahan ya, kendala nya di anggaran yang terbatas.			
		P2	Kemudian kedua, harga lahannya kan gitu kan. Artinya misalnya kan kalau untuk taman skala kota minimal berapa lahannya? 1 hektar? Nyari lahan 1 hektar di Bandung mah susah, belum lagi harga lahannya yang tinggi apalagi di Karees jadi	P2.6		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			susah mau bangun RTH publik			
			Karena itu tadi, ketika nilai lahan, harga lahan, semakin mahal, berpengaruh sama bayar pajaknya juga jadi ikut mahal, maka orang-orang akan memanfaatkan lahannya menjadi daerah komersil yang bisa memberikan keuntungan besar, bukan RTH publik yang memang keuntungannya bukan bentuk uang kasarnya gitu. Jadi biasanya	P2.13		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			<p>masyarakat menjualnya ke pengembang yang memberikan harga tinggi, kalau dijual ke pemerintah kan harganya ya cuma sesuai NJOP, gak jauh-jauh dari NJOP. Nanti kan intinya gini, kan tadi kecenderungan perkotaan itu kan harga lahan semakin mahal lahan semakin sempit, kecenderungannya kan beralih fungsi menjadi komersial,</p>			

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			perdagangan jasa, kawasan perumahan			
			Jadi intinya harga lahan memiliki pengaruh dalam penyediaan RTH ketika pembebasan lahan, karena semakin tinggi harga lahan maka pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan RTH publik, karena butuh anggaran yang besar sedangkan APBD kita terbatas. Karena tadi itu, ketika lahannya masih milik masyarakat maka harus	P2.14		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			dibebaskan sehingga jadi milik pemerintah			
		P3	Kendalanya ada di harga lahan yang tinggi sedangkan anggaran pemkot itu tidak cukup. Contoh ya, saya mau menyediakan ruang terbuka hijau di tengah kota, nah harga lahan di tengah kota itu kan mahal, sok di Regol udah berapa harganya kan. Nah si lahan itu kan masih milik masyarakat ya atau swasta, nah kita ini pemerintah harus beli	P3.2		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			kan lahannya, akhirnya tidak jadi. Jadi memang kendalanya ada di anggaran pemerintahnya juga, bila harga lahannya terlalu mahal ya pemerintah tidak bisa membeli karena tidak cukup anggaran			
		A1	Kalau harga lahan mahal, pemerintah dapat kerja samakan dengan swasta untuk pemenuhan RTH publik	A1.2	Menurut akademisi, dalam memenuhi kebutuhan RTH publik, dibutuhkan pembebasan lahan yang akan mempertimbangkan harga lahan. Apabila harga lahan tinggi,	
			Jadi, kalau saya sih lebih ke yang tadi, kalau kita memiliki	A1.4		



Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			<p>indikasi atau rencana seperti pembangunan taman di Karees, kemudian kita membutuhkan lahan disitu, kemudian harga lahan itu akan menjadi pertimbangan untuk pembebasannya, karena Karees pusat kota dan harga lahannya bisa dibilang cukup tinggi</p>		<p>maka pemerintah akan kesulitan dalam membebaskan lahan untuk memenuhi kebutuhan RTH publik. Namun, pemerintah dapat bekerja sama dengan swasta untuk menyediakan RTH publik agar anggaran yang ditanggung tidak terlalu besar.</p>	
			<p>Jadi harga lahan si mungkin ya akan berpengaruh kalau dia memang tujuannya untuk mengakuisisi lahan tertentu untuk</p>	A1.5		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			diubah menjadi RTH publik			
		A2	Karena bila sudah terbangun, pemkot itu harus menyediakan biaya untuk mengokupasi lahan tersebut, tergantung harga lahan nya mahal atau tidak. Kalau mahal pasti lebih sulit lagi, udah mah harus mengokupasi, lalu membebaskan lahan	A2.6		
			Iya, itu tadi, RTH publik itukan milik Pemda, kalau misalnya tanahnya bukan punya Pemda berarti dia harus	A2.9		

Indikator	Variable	Ahli	Pemahaman Data Transkrip			
			Transkrip	Kode	Analisis	Hasil
			membebas kan lahan, nah itu tergantung lokasi dan pusatnya. Kalau misalnya lokasi yang diperlukan tapi harganya mahal ya dia harus menganggarkan biayanya besar.			

*Sumber: Penulis, 2020*

Berdasarkan hasil *content analysis* terhadap data transkrip wawancara *in-depth interview* tersebut, didapatkan bahwa alih fungsi lahan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees karena apabila suatu lahan telah ditetapkan sebagai zona RTH pada RDTR Kota Bandung, maka lahan tersebut tidak akan diokupasi menjadi lahan terbangun dan pemerintah maupun masyarakat mematuhi peraturan tersebut. Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung adalah sebagai berikut:

### **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di SWK Karees yang terus bertambah akan menyebabkan peningkatan permintaan pembangunan infrastruktur perkotaan yang dapat mengurangi jumlah RTH publik. Namun, peningkatan luasan RTH publik di SWK Karees terjadi karena kebutuhan oksigen penduduk dan ruang sosial bagi masyarakat akan bertambah dan harus terpenuhi.

### **2. Permukiman**

Pada SWK Karees, luas lahan yang telah didominasi oleh permukiman akan sulit dikembangkan menjadi RTH publik karena lahan sudah menjadi lahan terbangun. Permukiman dinilai memiliki nilai yang lebih produktif secara ekonomi daripada RTH publik yang menyebabkan pembangunan untuk permukiman lebih besar daripada RTH publik. Namun, terdapat beberapa perumahan di SWK Karees yang menyediakan RTH publik berupa taman skala RW untuk membantu memenuhi kebutuhan RTH publik, meskipun masih terdapat perumahan yang tidak menyediakan RTH publik karena belum menyerahkan sebagian lahannya kepada pemerintah guna dibangun RTH publik.

### **3. Perdagangan dan Jasa**

SWK Karees merupakan SWK dengan fungsi sebagai perdagangan dan jasa. Seiring dengan fungsi tersebut, maka lahan di SWK Karees dibangun menjadi perdagangan dan jasa

yang menyebabkan sulitnya penyediaan RTH publik akibat tidak ada lagi lahan tidak terbangun. Perdagangan dan jasa juga dinilai lebih produktif secara ekonomi yang dapat memberikan banyak pemasukan bagi banyak pihak dibandingkan dengan RTH publik.

#### **4. Industri**

Pembangunan perindustrian di SWK Karees menyebabkan tidak adanya lahan tidak terbangun guna penyediaan RTH publik yang menyebabkan sulitnya penyediaan RTH publik. Meskipun terdapat beberapa industri yang menyediakan RTH, RTH tersebut bersifat private bukan publik. Selain itu, pada SWK Karees, terjadi pengurangan luasan industri yang memberikan dampak pada penambahan luasan RTH publik. Hal ini terjadi karena masa kontrak kepemilikan lahan yang terjadi antara industri dan pemerintah sudah selesai, sehingga lahan tersebut dikembalikan kepada pemerintah dan dibangun RTH publik.

#### **5. Fasilitas Umum**

Pembangunan fasilitas umum di SWK Karees menyebabkan berkurangnya lahan tidak terbangun guna penyediaan RTH publik. Meskipun terdapat fasilitas umum yang menyediakan RTH, RTH tersebut bersifat private bukan publik. Namun, semakin bertambahnya luasan fasilitas umum di SWK Karees menyebabkan penambahan RTH publik karena terdapat beberapa jenis fasilitas umum yang membutuhkan RTH publik untuk kegiatan sosial seperti sarana pendidikan.

#### **6. Kepadatan Bangunan**

SWK Karees merupakan SWK dengan kepadatan bangunan yang tinggi. Semakin tinggi kepadatan bangunan maka akan semakin sulit dalam penyediaan RTH publik karena sudah tidak tersedia lagi lahan tidak terbangun untuk membangun RTH publik, karena dalam membangun RTH publik

dibutuhkan lahan tidak terbangun agar lebih mudah dan murah dalam penyediannya.

## **7. Harga Lahan**

Harga lahan yang tinggi di SWK Karees mempengaruhi penyediaan RTH publik karena semakin mahal harga lahan maka pemerintah akan semakin sulit dalam menyediakan RTH publik. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh pemerintah terbatas untuk melakukan pembebasan lahan sebelum dibangun RTH publik. Selain itu, harga lahan yang tinggi di SWK Karees menyebabkan cenderung menjadi bangunan komersil karena bangunan komersil dinilai lebih menguntungkan daripada RTH publik.

### **4.2.2 Merumuskan Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan RTH Publik di SWK Karees, Kota Bandung**

Dalam merumuskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, Kota Bandung, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda data panel. Analisis regresi linier berganda data panel digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu dengan yang lain *variable independent* terhadap *variable dependent* penelitian.

Pada hasil analisis sasaran pertama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, Kota Bandung, didapat delapan faktor yang dianggap mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung. Kemudian, faktor-faktor tersebut akan diolah menggunakan analisis regresi linier berganda data panel untuk dirumuskan bagaimana pengaruh antar faktor-faktor tersebut terhadap ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung. Faktor-faktor tersebut kemudian digunakan sebagai *variable independent* pada penelitian. *Variable dependent* pada penelitian

ini adalah ketersediaan RTH publik (Y), sedangkan *variable independent* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk ( $X_1$ )
2. Industri ( $X_2$ )
3. Permukiman ( $X_3$ )
4. Fasilitas Umum ( $X_4$ )
5. Perdagangan dan Jasa ( $X_5$ )
6. Kepadatan Bangunan ( $X_6$ )
7. Harga Lahan ( $X_7$ )

Pada analisis regresi linier berganda data panel yang dilakukan untuk memperoleh rumusan model matematis keterkaitan antara *variable dependent* dengan *variable independent*, digunakan model log-log. Model log-log digunakan untuk menyamakan satuan antar *variable dependent* maupun *variable independent* yang digunakan dalam proses analisis dan interpretasi. Berikut ini adalah persamaan menggunakan model log-log:

$$\log Y_{it} = \alpha + \beta_1 \log X_{1ti} + \beta_2 \log X_{2ti} + \dots + \beta_n \log X_{nti} + e_{it}$$

$Y_{it}$  = variable terikat (*dependent*)

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi

$X_{1ti}$  = variable bebas (*independent*)

$t$  = periode ke- $t$

$i$  = individu ke- $i$

$\log$  = logaritma yang menyatakan *variable* menjadi dalam bentuk persen

$e_{it}$  = error *cross section* ke- $I$  dan waktu ke- $t$

Selain itu, pada proses analisis digunakan data panel dengan unit kelurahan yang ada di SWK Karees, yaitu sebanyak 28 kelurahan dengan periode waktu dari tahun 2014 – 2018. Matriks

data panel dari masing-masing *variable dependent* dan *variable independent* yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.15.



*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*

**Tabel 4.15 Matriks Data Panel**

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/ m <sup>2</sup> )
Babakan Surabaya	2014	1.54	18794	3.78	53.13	2.51	6.38	81.37	802103
	2015	1.54	19005	3.79	53.16	2.66	6.40	81.38	802204
	2016	1.55	19482	3.79	53.19	2.78	6.46	81.40	802302
	2017	1.57	20589	3.79	53.20	2.85	6.49	81.43	916102
	2018	1.58	21411	3.80	53.26	3.00	6.50	81.44	916112
Kebon Jayanti	2014	0.00	10672	0.22	24.81	0.11	1.65	96.74	802111
	2015	0.00	11082	0.23	24.84	0.16	1.65	96.76	802152
	2016	0.00	11824	0.30	24.87	0.21	1.70	96.79	802176
	2017	0.00	12573	0.33	24.89	0.28	1.72	96.80	916119
	2018	0.00	13172	0.37	24.95	0.31	1.75	96.84	916156
Cicaheum	2014	1.12	10102	3.75	53.58	4.78	24.49	95.22	802192
	2015	1.13	16709	3.75	53.60	4.85	24.50	95.24	802308
	2016	1.16	17021	3.76	53.65	4.89	24.54	95.26	802332
	2017	1.20	17742	3.76	53.68	4.99	24.56	95.27	1274116

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/m <sup>2</sup> )
	2018	1.23	18858	3.76	53.69	5.00	24.60	95.30	1274652
Babakan Sari	2014	2.28	37008	1.10	95.04	3.29	2.68	89.77	802273
	2015	2.30	37684	1.10	95.04	3.30	2.75	89.79	802209
	2016	2.42	38236	1.11	95.04	3.35	2.80	89.82	802254
	2017	2.43	39523	1.14	95.04	3.37	2.89	89.83	916152
	2018	2.45	40757	1.16	95.05	3.38	2.99	89.85	916172
Kebon Kangkung	2014	1.60	9752	4.85	33.85	3.03	3.44	92.74	1147167
	2015	1.62	10289	4.88	33.88	3.03	3.58	92.76	1147115
	2016	1.67	11672	4.90	33.89	3.04	3.65	92.77	1147394
	2017	1.70	12309	4.95	33.90	3.04	3.67	92.79	1274425
	2018	1.74	13096	4.99	33.94	3.05	3.71	92.80	1274263
Sukapura	2014	1.96	23907	66.16	73.77	17.03	1.79	86.08	1147109
	2015	1.97	25893	66.19	73.79	17.09	1.80	86.09	1147176
	2016	1.98	26753	66.21	73.81	17.15	1.84	86.12	1147145

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/m <sup>2</sup> )
	2017	2.00	27106	66.27	73.83	17.19	1.85	86.13	1416382
	2018	2.00	28296	66.31	73.86	17.22	1.90	86.13	1416256
Ancol	2014	0.54	10782	1.59	67.03	0.78	2.43	97.53	2353367
	2015	0.56	11004	1.63	67.04	0.78	2.48	97.56	2353463
	2016	0.58	11829	1.65	67.04	0.78	2.50	97.57	2352526
	2017	0.60	12157	1.69	67.04	0.82	2.52	97.59	2925635
	2018	0.62	13078	1.73	67.04	0.88	2.57	97.61	2925526
	Balonggede	2014	0.05	5978	0.01	27.27	5.41	17.53	92.12
2015		1.86	6846	0.01	27.29	5.41	17.55	92.14	1274256
2016		1.89	7103	0.01	27.30	5.49	17.58	92.16	1274354
2017		1.90	7650	0.01	27.32	5.53	17.60	92.18	1416246
2018		1.92	8621	0.01	27.36	5.60	17.63	92.22	1416764
Ciateul	2014	20.27	5562	0.57	36.21	1.11	5.46	67.75	1274321
	2015	20.29	6204	0.58	36.24	1.11	5.49	67.77	1274856

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/m <sup>2</sup> )
	2016	20.30	6943	0.58	36.28	1.20	5.50	67.79	1274257
	2017	20.34	7785	0.59	36.30	1.22	5.55	67.80	1416432
	2018	20.37	8332	0.59	36.33	1.27	5.59	67.82	1416564
Cigereleng	2014	0.85	10896	6.51	61.84	1.85	3.12	95.74	2779162
	2015	0.87	11235	6.52	61.87	1.85	3.18	95.76	2779176
	2016	0.89	11798	6.56	61.90	1.91	3.20	95.77	2779198
	2017	0.93	12281	6.59	61.95	1.98	3.26	95.79	2925152
	2018	0.95	12327	6.64	61.97	1.99	3.30	95.80	2925287
Cisereuh	2014	1.16	15270	7.32	36.25	11.12	4.62	93.56	802453
	2015	1.18	15763	7.33	36.28	11.16	4.64	93.56	802123
	2016	1.19	16142	7.34	36.30	11.21	4.66	93.59	802196
	2017	1.22	16897	7.36	36.33	11.25	4.70	93.59	916176
	2018	1.25	17326	7.38	36.38	11.29	4.74	93.60	916254
Pasirluyu	2014	4.28	13126	19.74	61.60	2.05	1.72	81.70	916203

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/m <sup>2</sup> )
	2015	4.30	13784	19.74	61.64	2.09	1.75	81.74	916307
	2016	4.33	14089	19.75	61.67	2.11	1.78	81.76	916419
	2017	4.36	14762	19.75	61.68	2.17	1.80	81.79	1032176
	2018	4.36	15201	19.76	61.70	2.20	1.82	81.79	1032198
Pungkur	2014	0.10	6014	0.00	29.74	2.44	6.73	98.15	1147203
	2015	0.10	6997	0.00	29.78	2.48	6.73	98.17	1147306
	2016	0.10	7138	0.00	29.80	2.51	6.78	98.18	1147376
	2017	0.10	7786	0.00	29.83	2.56	6.80	98.19	1274165
	2018	0.10	8762	0.00	29.86	2.59	6.82	98.20	1274233
Binong	2014	1.47	12678	0.53	42.38	2.06	5.80	87.08	916103
	2015	1.49	13021	0.53	42.40	2.11	5.84	87.08	916156
	2016	1.50	13882	0.54	42.43	2.16	5.88	87.08	916203
	2017	1.53	14672	0.54	42.47	2.28	5.89	87.08	1032102
	2018	1.54	15518	0.55	42.49	2.30	5.91	87.08	1032205

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/m <sup>2</sup> )
Cibangkong	2014	0.46	15002	0.00	37.82	1.54	10.04	94.24	802102
	2015	0.48	15783	0.00	37.84	1.60	10.06	94.25	802111
	2016	0.49	16234	0.00	37.87	1.61	10.10	94.27	802233
	2017	0.52	16946	0.00	37.90	1.64	10.16	94.29	1032103
	2018	0.54	17608	0.00	37.94	1.69	10.27	94.31	1032323
Gumuruh	2014	4.24	15998	3.80	75.38	6.86	5.06	93.89	2508415
	2015	4.26	16896	3.80	75.40	6.89	5.10	93.92	2508422
	2016	4.28	17021	3.80	75.44	6.91	5.12	93.94	2508145
	2017	4.30	17752	3.80	75.47	6.94	5.15	93.95	3124132
	2018	4.33	18564	3.80	75.48	6.95	5.20	93.97	3125315
Kacapiring	2014	1.07	6126	0.00	33.29	10.32	9.74	60.78	3143254
	2015	1.08	6779	0.00	33.31	10.37	9.77	60.80	3143524
	2016	1.09	7302	0.00	33.34	10.41	9.80	60.82	3152150
	2017	1.13	7885	0.00	33.37	10.43	9.86	60.85	3375225

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/ m <sup>2</sup> )
	2018	1.13	8123	0.00	33.39	10.49	9.88	60.88	3375535
Kebongedan g	2014	0.00	8896	0.11	19.02	0.21	0.52	94.21	1147155
	2015	0.00	9037	0.17	19.02	0.23	0.55	94.24	1147235
	2016	0.00	9764	0.19	19.03	0.27	0.58	94.25	1147355
	2017	0.00	10482	0.22	19.03	0.31	0.59	94.27	1274394
	2018	0.00	11110	0.28	19.03	0.35	0.62	94.29	1274455
Kebonwaru	2014	0.57	12645	27.45	30.32	22.12	4.54	94.44	916254
	2015	0.58	13007	14.10	30.32	22.18	4.57	79.50	916335
	2016	0.58	13768	14.10	30.33	22.21	4.59	79.53	916445
	2017	0.58	14652	14.11	30.33	22.27	4.64	79.54	1032435
	2018	13.92	15382	14.11	30.33	22.32	4.67	79.55	1032453
Maleer	2014	4.85	9562	0.59	36.69	1.09	1.24	86.60	916486
	2015	4.86	10271	0.60	36.69	1.10	1.37	86.62	916493
	2016	4.90	10945	0.63	36.69	1.16	1.46	86.65	916523



Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/m <sup>2</sup> )
	2017	4.93	11732	0.67	36.69	1.19	1.57	86.66	1032352
	2018	4.95	12355	0.70	36.70	1.20	1.63	86.68	1032424
Samoja	2014	0.51	14479	0.00	26.69	2.48	3.30	96.89	802154
	2015	0.53	14652	0.00	26.69	2.51	3.37	96.92	802225
	2016	0.53	14723	0.00	26.69	2.53	3.40	96.94	802285
	2017	0.53	14896	0.00	26.69	2.55	3.43	96.96	916314
	2018	0.54	15163	0.00	26.70	2.61	3.47	96.97	916331
Cikawao	2014	0.12	5221	0.00	25.51	3.69	6.78	99.55	1247144
	2015	0.15	5873	0.00	25.51	3.70	6.84	99.56	1247186
	2016	0.16	6653	0.00	25.51	3.75	6.91	99.57	1274243
	2017	0.20	7012	0.00	25.51	3.77	6.94	99.60	1416251
	2018	0.22	7973	0.00	25.51	3.81	7.00	99.61	1416266
Paledang	2014	0.04	3564	0.00	20.23	0.85	14.66	98.60	1573115
	2015	0.05	4027	0.00	20.24	0.89	14.66	98.63	1573132

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/m <sup>2</sup> )
	2016	0.05	4789	0.00	20.24	0.92	14.68	98.65	1573246
	2017	0.06	5478	0.00	20.25	0.95	14.70	98.67	1722143
	2018	0.06	6130	0.00	20.25	0.97	14.73	98.70	1722234
Burangrang	2014	0.87	7005	0.00	30.43	3.58	11.35	98.06	1274335
	2015	0.87	7784	0.00	30.43	3.67	11.37	98.06	1274346
	2016	0.88	8539	0.00	30.43	3.75	11.39	98.06	1274368
	2017	0.88	9102	0.00	30.44	3.82	11.40	98.06	1416122
	2018	0.99	9839	0.00	30.44	3.95	11.47	98.07	1416135
Malabar	2014	2.01	5655	0.22	37.42	7.38	21.35	96.89	3745422
	2015	2.01	6075	0.26	37.42	7.40	21.38	96.93	3745465
	2016	2.01	6802	0.28	37.43	7.40	21.40	96.95	3745515
	2017	2.01	7502	0.30	37.43	7.41	21.44	96.96	4605204
	2018	2.01	8012	0.30	37.43	7.45	21.47	96.98	4605286
	2014	1.80	7473	0.00	19.56	7.03	10.57	97.86	1862233

Kelurahan	Tahun	Variable Dependent	Variable Independent						
		RTH (ha)	JP (ribu)	Ind (ha)	Perkim (ha)	Fasum (ha)	Perjas (ha)	Kpdtm (%)	Hrg (Rp/m <sup>2</sup> )
Lingkar Selatan	2015	1.85	7984	0.00	19.57	7.10	10.57	97.88	1862265
	2016	1.94	8502	0.00	19.59	7.11	10.59	97.89	1862312
	2017	1.97	9252	0.00	19.60	7.23	10.62	97.90	2176325
	2018	2.00	9879	0.00	19.65	7.26	10.64	97.92	2176421
Turangga	2014	3.32	10562	0.00	112.91	18.33	19.18	96.94	2925226
	2015	3.32	11236	0.00	112.92	18.38	19.19	96.95	2925232
	2016	3.33	11872	0.00	112.92	18.40	19.20	96.96	2925246
	2017	3.33	12176	0.00	112.92	18.43	19.24	96.97	3745422
	2018	3.33	12720	0.00	112.92	18.45	19.26	96.99	3745511
Cijagra	2014	5.36	8103	5.88	83.17	6.07	9.03	93.69	3132422
	2015	5.36	8529	5.90	83.18	6.08	9.06	93.72	3132479
	2016	5.36	9092	5.90	83.19	6.08	9.07	93.73	3132521
	2017	5.37	9987	5.94	83.19	6.09	9.09	93.75	3745243
	2018	5.38	10645	5.96	83.20	6.09	9.10	93.77	3745333

Sumber: Penulis, 2020

**Keterangan:**

RTH = Ruang Terbuka Hijau

JP = Jumlah Penduduk

Ind = Industri

Perkim = Permukiman

Fasum = Fasilitas Umum

Perjas = Perdagangan dan Jasa

Kpdtn = Kepadatan Bangunan

AFL = Alih Fungsi Lahan

Hrg = Harga Lahan

Untuk data panel secara keseluruhan yang digunakan input dalam analisis regresi dapat dilihat pada **Lampiran D** dan proses analisis regresi dapat dilihat pada **Lampiran E**.

Tahapan pertama adalah mengetahui model terbaik yang akan digunakan untuk analisis regresi linier berganda data panel. Untuk menyamakan satuan dari setiap *variable*, maka dalam menginput *variable dependent* maupun *variable independent* harus dibubuhi “log” agar semua satuan *variable dependent* dan *variable independent* menjadi dalam bentuk persen. Setelah melewati Uji Hausman, hasil yang didapat adalah *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang terbaik untuk digunakan karena nilai prob yang didapat dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.000 yang artinya *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Random Effect Model* (REM). Sedangkan pada Uji Chou, hasil yang didapat adalah *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang terbaik untuk digunakan karena nilai prob yang didapat dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.000 yang artinya *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Uji Lagrange Multiplier tidak digunakan karena pada saat Uji Chou dan Uji Hausman telah didapat hasil yang sama, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Selain itu, pada *Fixed Effect Model* (FEM), didapat nilai R-squared yang mendekati 1 yaitu 0.999 yang artinya hubungan antara *variable independent* terhadap *variable dependent* yang terjadi kuat. Sedangkan pada *Common Effect Model* (CEM) R-squared yang didapat sebesar 0.569 dan pada *Random Effect Model* (REM) R-squared yang didapat sebesar 0.253 yang artinya hubungan antara *variable independent* terhadap *variable dependent* yang terjadi lemah.

Setelah ditetapkan bahwa model regresi terbaik adalah menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM), tahap kedua yang dilakukan adalah Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas. Pada Uji Multikolinearitas, model yang digunakan memiliki angka residual

< 0.9 lebih banyak daripada angka residual > 0.9 pada tabel *Residual Correlation Matrix*, artinya model terhindar dari multikolinearitas sehingga model regresi yang dihasilkan bersifat linier, tak bias, dan memiliki varians atau kesalahan minimum (BLUE). Sedangkan pada Uji Heterokedastisitas, model yang digunakan memiliki nilai prob *variable independent* > 0.05 yang artinya model terhindar dari heterokedastisitas sehingga *variable independent* model regresi yang digunakan tidak mempengaruhi tingkat error dan bersifat valid untuk diinterpretasi.

Tahap ketiga adalah interpretasi hasil akhir perasamaan analisis regresi linier berganda data panel. Berikut ini adalah hasil analisis yang didapat menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*

**Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Fixed Effect Model (FEM)**

Dependent Variable: LOG(RTH?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 07/12/20 Time: 22:57  
 Sample: 2014 2018  
 Included observations: 5  
 Cross-sections included: 28  
 Total pool (balanced) observations: 140  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.88859	32.00292	0.527720	0.5988
LOG(JP?)	0.465544	0.082011	5.676567	0.0000
LOG(IND?)	0.063993	0.018167	3.522537	0.0006
LOG(PERKIM?)	2.431113	4.359273	0.557688	0.5782
LOG(FASUM?)	0.330679	0.036763	8.994820	0.0000
LOG(PERJAS?)	0.210498	0.145583	1.445900	0.1512
LOG(KPDTN?)	-6.654030	6.479096	-1.027000	0.3068
LOG(HRG?)	-0.090123	0.046852	-1.923556	0.0571
Fixed Effects (Cross)				
_BABAKANSURABAYA				
--C	-1.021527			

_KEBONJAYANTI--C	-5.710890
_CICAHEUM--C	-0.634952
_BABAKANSARI--C	-1.478870
_KEBONKANGKUNG--C	1.374321
_SUKAPURA--C	-1.823753
_ANCOL--C	-0.364786
_BALONGGEDE--C	1.389795
_CIATEUL--C	2.224306
_CIGERELENG--C	-0.271807
_CISEREUH--C	0.227656
_PASIRLUYU--C	0.089474
_PUNGKUR--C	0.027258
_BINONG--C	0.341571
_CIBANGKONG--C	0.444283
_GUMURUH--C	0.008456
_KACAPIRING--C	-1.481068
_KEBONGEDANG--C	-4.807229
_KEBONWARU--C	-0.471904
_MALEER--C	2.448538
_SAMOJA--C	1.669928
_CIKAWAO--C	0.972307
_PALEDANG--C	0.754690
_BURANGRANG--C	1.881501
_MALABAR--C	1.481126
_LINGKARSELATAN--C	3.463625
_TURANGGA--C	-0.916936
_CIJAGRA--C	0.184887

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---



---

Weighted Statistics

---



---

R-squared	0.999850	Mean dependent var	-2.886976
Adjusted R-squared	0.999802	S.D. dependent var	21.11392
S.E. of regression	0.298043	Sum squared resid	9.327118
F-statistic	20644.81	Durbin-Watson stat	1.354969
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

### Unweighted Statistics

R-squared	0.982039	Mean dependent var	-0.410059
Sum squared resid	17.31023	Durbin-Watson stat	1.682413

*Sumber: Penulis, 2020*

Terlihat dari hasil analisis diatas, berikut ini adalah rincian hasil analisis tersebut:

- **Dependent Variable: Log(RTH?)** yang menjelaskan bahwa dalam penelitian menggunakan ketersediaan RTH publik di SWK Karees sebagai *variable dependent* dalam bentuk persen.
- **Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)** yang menjelaskan bahwa metode yang digunakan untuk analisis adalah *Fixed Effect Model* (FEM).
- **Sample: 2014 2018** yang menjelaskan bahwa periode waktu yang digunakan dalam data penelitian yaitu dari tahun 2014 – 2018.
- **Cross-sections included: 28** yang menjelaskan bahwa banyaknya unit analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu 28 kelurahan yang ada di SWK Karees.

Berdasarkan hasil diatas, didapatkan persamaan pertama analisis regresi linier berganda data panel, yaitu:

$$\log Y = 16.88859 + 0.465544 \log X_1 + 0.063993 \log X_2 + 2.431113 \log X_3 + 0.330679 \log X_4 + 0.210498 \log X_5 - 6.654030 \log X_6 - 0.090123 \log X_7$$

Keterangan:

$Y$  = Ketersediaan RTH publik

$X_1$  = Jumlah Penduduk

$X_2$  = Industri

$X_3$  = Permukiman



$X_4$  = Fasilitas Umum

$X_5$  = Perdagangan dan Jasa

$X_6$  = Kepadatan Bangunan

$X_7$  = Harga Lahan

*log* = logaritma yang menyatakan persamaan dalam bentuk persen

Namun, persamaan tersebut belum dapat dijadikan sebagai persamaan akhir hasil analisis regresi linier berganda data panel. Untuk mendapatkan persamaan akhir, diperlukan Uji Statistik T, Uji Statistik F, Analisis Korelasi Ganda, Analisis Koefisien Determinasi Berganda, dan Analisis Nilai *Adjust R-Square*.

### 1. Uji Statistik T (Pengujian Terhadap Koefisien Regresi Secara Parsial)

Uji Statistik T digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh satu variable independent secara individu terhadap variable dependent. Untuk mengetahui *variable independent* yang memiliki pengaruh terhadap *variable dependent* dapat dilihat pada nilai prob *variable independent* yang dihasilkan, apabila nilai prob < 0.05 maka *variable independent* tersebut memiliki pengaruh terhadap *variable dependent*.

Berdasarkan hasil Uji Statistik T, didapat hasil sebagai berikut:

- **Pengujian terhadap *variable* jumlah penduduk**

Berdasarkan hasil perhitungan data, didapat hasil bahwa nilai prob *variable* jumlah penduduk < 0.05 yaitu sebesar 0.0000 artinya *variable* jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan RTH publik dengan arah hubungan positif.

- **Pengujian terhadap *variable* industry**

Berdasarkan hasil perhitungan data, didapat hasil bahwa nilai prob *variable* industri < 0.05 yaitu

sebesar 0.0006 artinya *variable* industri memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan RTH publik dengan arah hubungan positif.

- **Pengujian terhadap *variable* permukiman**  
Berdasarkan hasil perhitungan data, didapat hasil bahwa nilai prob *variable* permukiman  $> 0.05$  yaitu sebesar 0.5782 artinya *variable* permukiman tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan RTH publik dengan arah hubungan positif.
- **Pengujian terhadap *variable* fasilitas umum**  
Berdasarkan hasil perhitungan data, didapat hasil bahwa nilai prob *variable* fasilitas umum  $< 0.05$  yaitu sebesar 0.0000 artinya *variable* industri memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan RTH publik dengan arah hubungan positif.
- **Pengujian terhadap *variable* perdagangan dan jasa**  
Berdasarkan hasil perhitungan data, didapat hasil bahwa nilai prob *variable* perdagangan dan jasa  $> 0.05$  yaitu sebesar 0.1512 artinya *variable* perdagangan dan jasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan RTH publik dengan arah hubungan positif.
- **Pengujian terhadap *variable* kepadatan bangunan**  
Berdasarkan hasil perhitungan data, didapat hasil bahwa nilai prob *variable* kepadatan bangunan  $> 0.05$  yaitu sebesar 0.3068 artinya *variable* kepadatan bangunan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan RTH publik dengan arah hubungan negatif.
- **Pengujian terhadap *variable* harga lahan**  
Berdasarkan hasil perhitungan data, didapat hasil bahwa nilai prob *variable* harga lahan  $> 0.05$  yaitu

sebesar 0.0571 artinya *variable* harga lahan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan RTH publik dengan arah hubungan negatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *variable independent* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *variable dependent* berupa ketersediaan RTH publik adalah jumlah penduduk, industri, dan fasilitas umum.

## **2. Uji Statistik F (Pengujian Terhadap Koefisien Regresi Secara Simultan)**

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan *variable independent* terhadap *variable dependent* secara signifikan. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapat nilai signifikansi F hitung (*F-statistic*) sebesar 20644.81 dengan nilai prob *F-statistic* < 0.05 yaitu sebesar 0.000000 yang artinya bahwa semua *variable independent* memiliki pengaruh terhadap *variable dependent* secara signifikan.

## **3. Analisis Korelasi Ganda (R)**

Analisis Korelasi Ganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *variable independent* terhadap *variable dependent* secara keseluruhan. Berdasarkan nilai R-square yang didapat diantara angka 0.80 – 1,000 yaitu sebesar 0.999850, yang artinya hubungan koefisien korelasi yang dihasilkan antara *variable independent* dengan *variable dependent* yaitu sangat kuat.

## **4. Analisis Koefisien Determinasi Berganda**

Nilai koefisien determinasi berganda dapat dilihat menggunakan nilai R-squared pada hasil analisis. Nilai R-squared yang didapat pada hasil analisis adalah sebesar 0.999850 yang artinya *variable independent* secara simultan berpengaruh terhadap *variable dependent* sebesar 99.9850%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh *variable* lain diluar persamaan regresi yang diteliti.

## 5. Analisis Nilai Adjust R Square

Nilai adjust R Square adalah nilai R square yang telah dikoreksi oleh nilai standard error atau *S.E of Regression*. Nilai adjust R square yang didapat akan selalu lebih kecil daripada nilai R squared. Selain itu, nilai S.E of Regression akan menentukan apakah model regresi yang dihasilkan dapat memprediksi nilai variable dependent dengan baik. Apabila nilai *S.E of Regression* < nilai *S.D Dependent Var* maka model regresi yang dihasilkan dapat memprediksi nilai *variable dependent* dengan baik. Pada hasil yang didapat, nilai adjust R square sebesar 0.999802 yang bernilai lebih kecil dari nilai R square yang didapat, yaitu sebesar 0.999850. Selain itu, didapat nilai *S.E of Regression* sebesar 0.298043 yang bernilai lebih kecil dari nilai *S.D Dependent Var* yaitu sebesar 21.11392 sehingga model regresi yang didapat dapat memprediksi nilai *variable dependent* dengan baik.

Berdasarkan hasil Uji Statistik T, Uji Statistik F, Analisis Korelasi Ganda, Analisis Koefisien Determinasi Berganda, dan Analisis Nilai Adjust R-Square diatas, persamaan akhir yang didapat yaitu:

$$\log Y = 16.88859 + 0.465544 \log X_1 + 0.063993 \log X_2 + 0.330679 \log X_4$$

Keterangan:

$Y$  = Ketersediaan RTH punlik

$X_1$  = Jumlah Penduduk

$X_2$  = Industri

$X_4$  = Fasilitas Umum

$\log$  = Logaritma yang menyatakan persamaan dalam bentuk persen

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bagaimana kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, kota Bandung. Adapun penjelasan dari hasil model regresi tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar **0.465544** dan bersifat positif (+), menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan penambahan pada luasan RTH publik. Sesuai dengan data statistik dan keadaan yang telah dianalisis, penambahan jumlah penduduk memberikan pengaruh terhadap penambahan luas RTH publik di SWK Karees. Sesuai dengan hasil analisis, penambahan jumlah penduduk sebanyak 1% meningkatkan luas RTH publik di SWK Karees sebesar 0.46%.

### **2. Industri**

Kawasan industri memiliki koefisien sebesar **0.063993** dan bersifat positif (+), menyatakan bahwa bertambahnya luasan kawasan industri menyebabkan penambahan pada luasan RTH publik. Sesuai dengan data statistik dan keadaan yang telah dianalisis, penambahan luas kawasan industri memberikan pengaruh terhadap penambahan luas RTH publik di SWK Karees. Sesuai dengan hasil analisis, penambahan luas kawasan industri sebanyak 1% meningkatkan luas RTH publik di SWK Karees sebesar 0.06%.

### **3. Fasilitas Umum**

Fasilitas umum memiliki koefisien sebesar **0.330679** dan bersifat positif (+), menyatakan bahwa bertambahnya luasan fasilitas umum menyebabkan penambahan pada luasan RTH publik. Sesuai dengan data statistik dan keadaan yang telah dianalisis, penambahan luas fasilitas umum memberikan pengaruh terhadap penambahan luas RTH publik di SWK

Karees. Sesuai dengan hasil analisis, penambahan luas fasilitas umum sebanyak 1% meningkatkan luas RTH publik di SWK Karees sebesar 0.33%.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapat dari penelitian mengenai Analisis Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan RTH publik di SWK Karees, Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pada hasil wawancara yang dilakukan bersama *stakeholders* yang berkaitan dengan RTH publik di Kota Bandung, didapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH publik di SWK Karees, Kota Bandung adalah jumlah penduduk, kawasan industri, permukiman, fasilitas umum, perdagangan dan jasa, kepadatan bangunan, serta harga lahan. Variabel alih fungsi lahan terseleksi karena pada SWK Karees tidak terjadi alih fungsi lahan yang semula diperuntukan untuk RTH publik menjadi kawasan terbangun.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang telah didapat, dilakukan analisis keterkaitan faktor-faktor tersebut menggunakan data statistik yang bertujuan untuk mendapatkan persamaan regresi. Terdapat beberapa variable yang terseleksi karena dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan RTH publik di SWK Karees karena tidak memenuhi nilai signifikansi  $< 0.05$ , yaitu permukiman, fasilitas umum, perdagangan dan jasa, kepadatan bangunan, dan harga lahan. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\log Y = 16.88859 + 0.465544 \log X_1 + 0.063993 \log X_2 + 0.330679 \log X_4$$

Keterangan:

- Y** = Ketersediaan RTH publik  
**X<sub>1</sub>** = Jumlah Penduduk  
**X<sub>2</sub>** = Industri  
**X<sub>4</sub>** = Fasilitas Umum  
**Log** = Logaritma yang menyatakan persamaan dalam bentuk persen

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang didapat selama proses penyusunan tugas akhir, maka rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, didapat bahwa untuk melakukan analisis regresi linear berganda data panel menggunakan *software Eviews 10*, perlu diperhatikan perubahan yang terjadi setiap tahunnya pada setiap variable yang akan diolah sehingga model matematis yang didapat bersifat valid untuk diinterpretasi dan mengurangi tingkat kesalahan pada saat melakukan uji asumsi klasik. Selain itu, dalam menentukan variable penelitian, perlu dipastikan instansi terkait memiliki data yang lengkap mengenai variable penelitian sehingga tidak perlu terjadi reduksi variable yang telah disusun sebelumnya.
2. Ketersediaan RTH publik di SWK Karees sangat diminati oleh masyarakat, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah kota Bandung dalam menyusun arahan pengembangan RTH publik di SWK Karees agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait RTH publik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basuki, A.T., & Prawoto, N. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi&Bisnis (dilengkapi aplikasi SPSS dan Eviews)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiman, A., Sulistyana, B. & Zain, A. FM, 2014. *Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau Pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Studi Kasus : DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, Dan Kota Surabaya)*. Jurnal Lanskap Indonesia, Vol. 6 No. 1.
- Demografi Kecamatan Regol Tahun 2014. *Kantor Kecamatan Kecamatan Regol*.
- Demografi Kecamatan Regol Tahun 2015. *Kantor Kecamatan Kecamatan Regol*.
- Demografi Kecamatan Regol Tahun 2016. *Kantor Kecamatan Kecamatan Regol*.
- Demografi Kecamatan Regol Tahun 2017. *Kantor Kecamatan Kecamatan Regol*.
- Demografi Kecamatan Regol Tahun 2018. *Kantor Kecamatan Kecamatan Regol*.
- Demografi Kecamatan Lengkong Tahun 2014. *Kantor Kecamatan Kecamatan Lengkong*.
- Demografi Kecamatan Lengkong Tahun 2015. *Kantor Kecamatan Kecamatan Lengkong*.
- Demografi Kecamatan Lengkong Tahun 2016. *Kantor Kecamatan Kecamatan Lengkong*.
- Demografi Kecamatan Lengkong Tahun 2017. *Kantor Kecamatan Kecamatan Lengkong*.

- Demografi Kecamatan Lengkong Tahun 2018. *Kantor Kecamatan Kecamatan Lengkong.*
- Demografi Kecamatan Batununggal Tahun 2014. *Kantor Kecamatan Kecamatan Batununggal.*
- Demografi Kecamatan Batununggal Tahun 2015. *Kantor Kecamatan Kecamatan Batununggal.*
- Demografi Kecamatan Batununggal Tahun 2016. *Kantor Kecamatan Kecamatan Batununggal.*
- Demografi Kecamatan Batununggal Tahun 2017. *Kantor Kecamatan Kecamatan Batununggal.*
- Demografi Kecamatan Batununggal Tahun 2018. *Kantor Kecamatan Kecamatan Batununggal.*
- Demografi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2014. *Kantor Kecamatan Kecamatan Kiaracondong.*
- Demografi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2015. *Kantor Kecamatan Kecamatan Kiaracondong.*
- Demografi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2016. *Kantor Kecamatan Kecamatan Kiaracondong.*
- Demografi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2017. *Kantor Kecamatan Kecamatan Kiaracondong.*
- Demografi Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018. *Kantor Kecamatan Kecamatan Kiaracondong.*
- Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. *Rencana Tata Ruang Wilayah.*
- Fattah, Q. (2001). *Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) dalam Upaya mendukung Kota Medan Sebagai Kota Metropolitan.* Theses, Universitas Sumatera Utara
- Gujarati, Damodar. 2004. *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar).* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gujarati, D.N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika.* Jakarta: Salemba Empat.

- Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- [https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4408922/ruang-terbuka-hijau-di-bandung-masih-kurang-3000-hektare diakses pada Juli 2020.](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4408922/ruang-terbuka-hijau-di-bandung-masih-kurang-3000-hektare-diakses-pada-juli-2020)
- Ibrahim, 2009, *Metode Analisis Teks & Wacana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imansari, N., & Khadiyanta, P, 2015. *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang*, (3), 101–110.
- Kurnia, S. D. (2013). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kurangnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Depok*. Jurnal Ekstensi Administrasi Negara. Universitas Indonesia.
- Kuncoro, 2012. *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan (RTHKP)*
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau*.
- Lase, N. D. & Sulistyarso, H. 2017. *Arahan Penyediaan RTH Publik untuk Menyerap Emisi Gas CO2 Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Studi Kasus: Kawasan Perdagangan dan Jasa Mayestik – Barito)*. Jurnal Teknik ITS, Vol. 6, No. 2.
- Lizya, 2017. *Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan*. Jurnal Plano Madani. Vol. 6 No. 2, 153-165.

- Miranti, M., Sundarso, & Purnaweni, H. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang*. 1-11.
- Narimawati, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nawawi, 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawari. 2010. *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*. JakartP2: PT. Elex Media Komputindo.Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Prabowoningsih, N. H., Putri, R. A., & Rini, E. F. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta)*.
- Prakosa, (2019). *Kajian Keterkaitan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Madiun*. Tugas Akhir. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Prihatin, Rohani Budi. 2015. *Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta)*. Jurnal Aspirasi. Vol.6 No.2.
- Rahman, M. D., Awaluddin, M., & Hani'ah (2016). *Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau terhadap Jumlah Penduduk di Kota Solo*. Jurnal Geodesi Undip, Vol. 5 No.3.
- Rahmat, 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9, 1-8.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*

- Rini, E. F., Sulistyarso, H., & Pamungkas, A. (2014). *Factors Influencing The Availability Of Green Open Space in East Surabaya. architecture & Environment*, Vol. 13, No.1, 75-92.
- Santoso, Singgih.2010. *Statistik Parametrik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Cetakan Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, PT Gramedia, Jakarta.
- Shani, F. M. & Kurniawan, A. 2015. Kajian Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Sukabumi. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 4, No.3.
- Sitorus, S. R. P., Aurelia, W. & Panuju, D. R., 2011. *Analisis Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Jakarta Selatan*. *Jurnal Lanskap Indonesia*, Vol.2, No. 1.
- Simonds, J. O. 1983. *Landscape Architecture*. McGraw-Hill Book Co. New York
- Sinulingga, Sukaria. 2015. *Metodologi Penelitian*. Medan. Edisi Ketiga. USU press.
- Subrayogo, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Utami, 2011. *Analisis Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Dengan Pendekatan Model Konservasi Air Menggunakan Sistem Informasi Geografis*. Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widarjono, 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : EKONISIA.

Wahidmurni, 2017. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*.  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang.  
(RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031

## LAMPIRAN

### Lampiran A

#### Desain Survey Penelitian

No	Data	Sumber Data	Instansi Penyedia	Cara Memperoleh	Output
1	Kependudukan	Demografi Kecamatan	Kantor Kecamatan	Survey Sekunder (Literatur)	Jumlah penduduk di wilayah penelitian
2	Jenis Penggunaan Lahan	Wilayah Penelitian		Observasi menggunakan Google Earth	Peta jenis penggunaan lahan di wilayah penelitian
		RTRW Kota Bandung	Dinas Penataan Ruang Kota Bandung	Survey Sekunder (Literatur)	
3	Alih Fungsi Lahan	RTRW Kota Bandung	Dinas Penataan Ruang Kota Bandung	Survey Sekunder (Literatur)	Data statistik tingkat konversi lahan di wilayah penelitian
		Google Earth			

No	Data	Sumber Data	Instansi Penyedia	Cara Memperoleh	Output
4	Kepadatan Bangunan	RTRW Kota Bandung	Dinas Penataan Ruang Kota Bandung	Survey Sekunder (Literatur)	Data statistik kepadatan bangunan di wilayah penelitian
5	Harga Lahan	Data harga lahan berdasarkan NJOP	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung	Survey Sekunder (Literatur)	Data harga lahan berdasarkan NJOP di Kota Bandung

*Sumber: Penulis, 2019*



## **Lampiran B**

### **Form Panduan Wawancara**



Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
2019

**Nama Stakeholder** :

**Tanggal Interview** :

1. Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingkah Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik bagi sebuah perkotaan?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja penyebab kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik pada sebuah perkotaan?
3. Apakah jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya berdampak bagi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di sebuah perkotaan?
4. Apakah jenis penggunaan lahan berpengaruh terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di sebuah perkotaan?
5. Apakah status kepemilikan lahan berpengaruh terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di sebuah perkotaan?
6. Apakah tingkat alih fungsi lahan berpengaruh terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di sebuah perkotaan?

7. Apakah kepadatan bangunan berpengaruh terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di sebuah perkotaan?
8. Apakah harga lahan berpengaruh terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di sebuah perkotaan?

## Lampiran C

### Hasil Transkrip Wawancara Stakeholders

**I. Nama : Yuni Sri Handayani, ST, MT, M.Eng.**

**Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda, Dinas Penataan Ruang Kota Bandung**

**Tanggal Interview : Rabu, 26 Februari 2020**

N : Nama saya Nadhila Wahyuningtyas dari Planologi ITS, Surabaya. Saya sedang melakukan penelitian tentang RTH, Bu.

Y : Oiya terus tentang apanya? Tentang ketersediaan?

N : Iya jadi penelitian saya itu untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau publik di SWK Karees, Bu

Y : SWK Karees

N : Iya Ibu. Mengapa saya memilih Karees karena di RTRW Kota Bandung, SWK Karees merupakan SWK yang memiliki jumlah RTH publik paling kecil dibandingkan dengan SWK lain yang ada di Kota Bandung. Jadi saya mencari faktornya apa yang mempengaruhi dan kenapa bisa gitu Bu. Nah menurut Ibu sendiri, kira-kira apa saja yang dapat mempengaruhi ketersediaan RTH ya Bu?

Y : Menurut saya, hal yang paling utama itu adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang padat dapat mempengaruhi suatu kota dalam penyediaan RTH publik seperti taman kota gitu ya. . Saya kurang tahu apakah memang di Karees ini terpadat. Seharusnya jumlah penduduk

itu linear dengan jumlah kebutuhan ruang akan RTH. [P1.1] Kan bisa lihat di aturan itu kalau gak salah satu orang itu sebenarnya standart yang bagusya itu satu meter persegi jadi satu orang. Tapi ini tidak linear ya, artinya dengan jumlah tertentu dia bisa mungkin lebih dikit lagi sih gak sampe satu. Artinya apa? Artinya bahwa semakin banyak jumlah penduduk pasti harusnya mengikuti ya jumlah RTH nya lebih banyak gitu. Nanti bisa diperbandingkan dengan jumlah penduduk di SWK yang lain gitu. Terus saran saya jangan Pakai data yang.... eh iya rapat ya yang RTRK ya? Iya nanti saya nyusul ya. Eh iya apa? Oh itu. Jadi jumlah penduduk itu kan mempengaruhi banget gitu. Nanti bisa di cek di data SWK per SWK itu secara administrasi nanti keliatan satu SWK itu terdiri dari beberapa kecamatan kan yah, tiga atau empat kecamatan dan itu misalkan Pake data terbaru gitu yah soalnya kan gini ada perubahan-perubahan juga kaya pada tahun 2011 itu gencar terjadi perubahan fungsi lahan. Karena jumlah penduduk itu mempengaruhi suatu kota untuk melakukan pembangunan seperti pembangunan permukiman, perjas, dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah untuk penunjang kehidupan masyarakat. Jumlah luasan zona untuk permukiman, perjas, dan fasum itu jadi bertambah akibat penduduk yang jumlahnya membludak, , seperti yang terjadi di Karees juga ya. [P1.2] Contoh kita lihat di Gedebage lahannya masih kosong nah mungkin sekarang kondisi pemukiman perumahan kan sudah banyak disana. Itukan juga pengaruh kalau memang mau melihat terkecil atau enggak nya di kota Bandung gitu. Jadi memang secara teori pun semakin banyak penduduk di Karees maka harus diimbangi dengan RTH yang memadai karena kaya kebutuhan oksigen gitu kan pengaruh ke masyarakat Karees sendiri. RTH itu kan dapat memberikan kebutuhan oksigen bagi masyarakat. [P1.3] Makanya dulu pada saat gencar-gencarnya walikota membuat taman tematik itu bahwa faktor salah satu indikator kebahagiaan indeks kebahagiaan masyarakat itu salah

satunya adalah terdapatnya RTH maka dari itu dibangun taman-taman gitu kan terus bisa berkumpul, taman sebagai ruang publik, gitu loh. Jadi kan taman itu memang banyak fungsinya nih, gak cuma fungsi ekologis tapi juga fungsi publik untuk ketemu atau berinteraksi. Itu kalau untuk jumlah penduduk ya.

N : Nah kan tadi Ibu memberi penjelasan bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin bertambah pula luasan zona untuk permukiman, perjas, dan fasum, berarti penggunaan lahan itu memiliki pengaruh dalam penyediaan RTH ya Bu ?

Y : Itu sudah pasti ya, karena semakin.... Eh gini..... setiap SWK memiliki tema nya sendiri. Kalau Karees itu temanya kalau tidak salah hmm apayah aku lupa, hm ini temanya Karees ini temanya karyapolis ya kalau tidak salah, Karees itu ibu kotanya hm apa ya pusatnya, ibu kotanya Karees ini, hm ini kita kenal nya SPK, sub pelayanan kota tuh di Maleer, di TSM. Di situ sebenarnya. Dari karyapolisnya itu sebenarnya dia ada di dekat perkotaan gitu ya dan dia tuh sebenarnya perbatasan kota lama dan kota baru yah dari zaman Belanda, sehingga SWK Karees dari dulunya memang ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi utama komersil. Nah sedangkan, menurut saya, kalau suatu daerah yang sudah didominasi oleh kegiatan komersil atau ditetapkan sebagai fungsi utamanya komersil pasti akan memiliki RTH yang sedikit, karena komersil boro-boro mau menyediakan RTH apalagi taman gitu ya. [P1.4] Lahan parkir komersil yang menggunakan material yang sifatnya dapat meresapkan air saja jarang gitu padahal kita suka memberikan saran gitu yah kalau misalkan mau membuat komersil tolong lah ini ya untuk yang bisa peresapan sehingga fungsi parkir juga bisa digunakan untuk fungsi RTH. Tapi kan itu kembali lagi, walaupun secara perizinan pun untuk perdagangan dan jasa itu RTH nya harus 20% KDH nya. Ada memang

aturan itu tapi kenyataannya kan kita sulit mencari di pusat-pusat kegiatan gitu. Tapi sebenarnya untuk Karees masih lumayan kalau saya lihat karena di Karees itu sendiri ada kaya apa namanya, PT KAI.

N : Oiya ada PT KAI menyediakan lahan hijau tapi statusnya private

Y : Iya betul yang di Laswi, terus ada..... Adya itu PINDAD masuk Karees gak? Oh iya masuk. Iya terus ada PINDAD dan itu sebenarnya memang RTH tapi private

N : Pindad itu disini kan industry senjata ya Bu, yang saya baca, mereka men-supply kebutuhan militer. Menurut Ibu apakah industry ada yang menyumbang RTH publik bagi Karees ?

Y : **Sebenarnya industry itu menyumbangkan RTH yang lumayan namun statusnya itu RTH private bukan RTH publik yang dapat dikelola oleh pemerintah. Sehingga kalau dikatakan menyediakan RTH publik tidak ya industry itu, karena ketika sudah jadi industry maka lahannya kan akan milik swasta, segala yang ada disitu milik swasta. Meskipun misal ada industry yang membuat taman gitu didalamnya, ya tapi itu tidak bisa diakses oleh publik, tidak bisa dikelola oleh pemerintah. Namun dapat dilihat sendiri ya terjadi pengurangan luas industry di Karees, yang di daerah Kircon itu, yang memang memiliki dampak bagi penyediaan RTH publik, jadi di Karees gak semata-mata selalu penambahan luas industry karena sudah tidak ada lahan lagi. [P1.5] Berbeda ya dengan perumahan permukiman di Karees, kalau mereka kan kadang masih ada yang menyediakan taman meskipun hanya skala kecil, skala perumahan, tapi itu membantu dalam penyediaan RTH publik, walaupun apabila pola ruang di Karees berubah menjadi perumahan permukiman maka otomatis fungsi taman juga akan semakin sedikit, karena tidak semua perumahan**

menyediakan taman.[P1.6] Jadi memang RTH publik dipengaruhi oleh jenis-jenis penggunaan lahan ya.

N : Oiya tadi kan RTH publik itu harus dikelola oleh pemerintah jadi otomatis lahan yang akan dibangun RTH publik itu berarti harus milik pemerintah ya ?

P1 : Hmm, jadi gini, sebenarnya kalau idealnya kita mau merencanakan suatu apa namanya, pola ruang, idealnya memang tanah itu, khususnya RTH itu, dimiliki oleh pemerintah. Tapi, kondisi kita saat ini memungkinkan untuk apa namanya mem *plot* lahan-lahan yang di eksisting nya itu hijau itu kita plot sebagai RTH. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan misalnya pembebasan lahan. Misalnya gini Mbak punya tanah nih ya tetapi disitunya tanahnya masih berupa lahan hijau nih kita kan kalau ngecek di lapangannya ngeceknnya dari satelit citra terus kita taunya oh inikan lahan hijau nih kita hijau in aja nih apalagi di sekelingnya tidak ada lagi taman-taman gitu, potensi untuk jadi taman lebih berpotensi itukan daripada yang sudah jadi bangunan kita hijaukan ya. Tapi ternyata setelah di cek kepemilikannya dia lahan pribadi. Nah ada beberapa langkah yang dapat diambil, misalkan apa namanya dibeli oleh pemerintah dengan dana pemerintah, gitu tapi dengan persetujuan si pembeli dan kemudian maksudnya tidak ada rasa rugi atau apalah itu dalam hal jual beli ini dalam pembebasan lahan itu karena apa karena bila lahan dibebaskan oleh pemerintah itu hak dari si pemilik lahannya jadi berkurang karena selamanya lahan dia itu tidak ada izin membangun gitu gabisa keluar izin membangun itu jadi kalau selama belum dibebaskan oleh pemerintah dia mau ngapa-ngapain ya tidak bisa kaya gitu. Kemudian untuk membebaskan lahan, pemerintah juga melihat dari seberapa mahal lahannya itu, harga lahannya lah. Tinggi rendahnya harga lahan itu berpengaruh tadi ke untuk fungsi bangunan juga, pola ruangnya, perubahan pola ruang

itu lagi. Nah kalau orang itu kan kalau nilai lahannya tinggi ya, dia kan inginnya itu lahannya dijadikan bangunan, dijadikan komersil, tidak ingin dijadikan taman gitu. Makanya sering kali ditengah kota itu sulit banget mencari lahan untuk dibuat taman gitu.[P1.7] Karena nilainya tinggi orang berpikirnya ya untuk komersil aja gitu. Komersil itu pokoknya bukan taman. Padahal sebenarnya kalau dia lebih mencermati ya, taman itu fungsi ekologisnya dapet, fungsi ekonomisnya juga dapet. Intinya makin tinggi nilainya makin sedikit orang yang mau bikin RTH.

N : Kalau kasus Taman Kiara Artha tadi sendiri Bu yang di Kiaracandong, itukan awalnya industry lalu berubah menjadi taman, apakah pemerintah memang melakukan pembebasan lahan disitu ?

Y : Sebenarnya itu tanah milik pemerintah. Memang ada tanah milik pemerintah yang disewakan dalam jangka beberapa puluh tahun maka saat masa sewa berakhir dan si penyewa tidak memperpanjang karena seiring dengan kita tidak memperbolehkan lagi fungsi-fungsi industry yang mengeluarkan limbah. Itukan dulu perasaan kan pabrik textile atau garmen, itukan sangat berbahaya karena dia dari celupan itukan dia pakai pewarna sehingga mengeluarkan limbah B3 kan. Seiring dengan kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi dan mengurangi industry yang polutan. Setelah selesai masa sewa nya kemudian diambil alih oleh pemerintah, eh bukan diambil alih ya, dikembalikan kepada pemerintah lagi sebagai pemilik lahan, kemudian sekiranya apa yang memungkinkan dibuat kegiatan yang memang hmm yang ada manfaatnya gitu untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah juga ada pemasukan. Itu juga sebenarnya dikerjasamakan lagi gitu bukan dikelola oleh pemerintah langsung tapi tetap itu merupakan aset pemerintah.



N : Apakah dalam memutuskan lahan di SWK Karees menjadi taman, pemerintah memikirkannya berdasarkan kebutuhan RTH atau bagaimana ya ?

Y : Sebetulnya itu dijadikan taman karena daerah sana sedikit sekali ya ruang hijaunya, sehingga kami jadikan taman, melihat jumlah penduduk yang terus meningkat di Karees namun kurangnya ruang hijau publik maka diputuskan menjadi taman saja. Jadi pemerintah itu berpikir sekiranya apa yang memungkinkan dibuat kegiatan yang memang hmn yang ada manfaatnya gitu untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah juga ada pemasukan, jadilah taman itu.

N : Berarti di Karees ada case alih fungsi lahan ya Bu.

Y : Ya ada alih fungsi lahan, namun disini kondisinya adalah dari terbangun menjadi RTH sehingga memiliki dampak positif ya. Karena sebetulnya kalau lahan itu sudah ditetapkan sebagai RTH di pola ruang RDTR itu dia tidak akan bisa di alih fungsi.[P1.8] Jadi RTH itu memang sebenarnya istilahnya kastanya tuh paling tinggi lah gitu. Semua zona bisa jadi RTH kalau misalkan pemerintah maulah misalkan pemerintah mau bebaskan lahan ininoh gitu. Jadi lapangan misalnya warnanya masih ungu karena masuk perdagangan dan jasa gitu tapi kita mau hijau in boleh banget. Tapi kalau misalnya hijau mau di ungu in, gaboleh gitu. Tapi dalam membebaskan lahan juga tidak semena-mena bisa langsung dilakukan, karena kan anggaran kita juga terbatas, balik lagi ke harga lahan. Bila harga lahannya tinggi memang pemerintah cukup sulit untuk membebaskan lahan ya, kendalanya di anggaran yang terbatas. [P1.9]

N : Lebih mudah langsung membangun di atas lahan kosong ya Bu ketimbang harus membebaskan lahan yang sudah terbangun dulu

Y : Iya betul. Karena semakin padat bangunan kan semakin sedikit lahan untuk ruang hijau publiknya. Kalau padat bangunan kita kesulitan untuk menyediakan RTH publik untuk masyarakat ya karena sudah tidak ada lahan kosong. [P1.10]

N : Oiya baik Bu. Apakah sekiranya ada faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan RTH ya Bu?

Y : Sudah sih, itu saja yang saya jelaskan tadi

N : Baik Bu, sekian wawancara kali ini dari saya Bu. Terimakasih atas pendapatnya dan waktunya ya Bu

Y : Iya sama sama ya semoga bermanfaat ilmunya.

**II. Nama : Fachmy Sugih Pradifta, ST., MT.**

**Jabatan : Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota,  
Universitas Islam Bandung**

**Tanggal Interview : Jumat, 28 Februari 2020**

N : Menurut Bapak, seberapa pentingkah RTH publik bagi sebuah perkotaan ?

F : Ya sangat penting yah, kalau seberapa penting ya sangat penting yah, karena fungsinya kan tidak hanya satu, dia memiliki beberapa fungsi yang diemban, tidak hanya dari sisi ekologis tapi baik dari sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya. Jadi perannya cukup banyak sebenarnya gitu.

N : Jadi saya sedang meneliti RTH publik di SWK Karees, nah disana itu kondisinya kan padat bangunan Pak. Menurut Bapak, dalam pemenuhan RTH perkotaan yang sudah padat bangunan sebaiknya menggunakan cara apa ya Pak, melihat bahwa RTH itu memang memiliki fungsi dan peran yang penting bagi perkotaan juga masyarakatnya

F : Sebetulnya kepadatan bangunan suatu perkotaan itu berkaitan dengan pola ruang kota nya, penggunaan lahan eksisting nya. Di Karees sendiri kan cukup padat ya bangunannya akibat sudah tidak ada lahan kosong disana, kemudian masyarakat Karees yang beraktivitas disitu tentu jadi terkena pengaruh karena menjadi kurang ada ruang terbuka publik untuk melayani masyarakat Karees itu sendiri.[A1.1] Ada banyak strategi yang dilakukan untuk mengatasi itu, kalau diluar dia ya memang sulit tadi akhirnya, mengatur mengenai pengadaan ruang terbuka publik di lahan private. Kalau di

daerah perkotaan yang padat pun seperti Singapore gitu dia berusaha agar ada ruang terbuka ditengah-tengah bangunan. Jadi kalau ada menara terus ada *sky lobby* nya dulu, baru naik lagi, nah itu jadi ruang terbuka publik yang bisa diakses untuk mengatasi kekurangan RTH nya. Jadi nanti kalau memang sudah ada rencana dan strategi, semua hal tadi akan bisa dicari solusinya sesuai dengan rencananya. Kalau harga lahan mahal , pemerintah dapat kerja samakan dengan swasta untuk pemenuhan RTH publik. [A1.2] Strategi seperti itu memang dibutuhkan untuk kawasan yang memiliki kepadatan bangunan tinggi, karena semakin tinggi kepadatan bangunan suatu kawasan maka akan semakin sulit pula penyediaan RTH yang bisa di akses masyarakat, RTH publik lah, kalau private mah kan beda ya. [A1.3]

N : Tingginya harga lahan berperan ya dalam penyediaan RTH publik di Karees

F : Ya sebetulnya, mungkin pengaruhnya tidak langsung ya. Jadi, kalau saya sih lebih ke yang tadi, kalau kita memiliki indikasi atau rencana seperti pembangunan taman di Karees, kemudian kita membutuhkan lahan disitu, kemudian harga lahan itu akan menjadi pertimbangan untuk pembebasannya, karena Karees pusat kota dan harga lahannya bisa dibilang cukup tinggi.[A1.4] Nah apakah lahan itu akan dibebaskan tahun ini atau di tahun depan, namun tetap ada rencana kesitu. Jadi harga lahan si mungkin ya akan berpengaruh kalau dia memang tujuannya untuk mengakuisisi lahan tertentu untuk diubah menjadi RTH publik [A1.5] Tapi sepertinya di Karees atau di Bandung sendiri, alasan untuk mengambil suatu lahan untuk diubah menjadi RTH juga belum ada menurut saya.

N : Itu mengakuisisi lahan dari milik masyarakat atau swasta agar menjadi milik pemerintah ya Pak? Kan RTH publik harus dimiliki pemerintah lahannya

F : Sebetulnya bukan..... ya jadi gini. Sering kali memang, bahkan memang belum ada kota di Indonesia yang memenuhi syarat RTH sebesar 30%. Memang kendalanya ada di keterbatasan lahan itu yang bisa di *develop* oleh pemerintah tidak sebanyak itu. Mungkin kalau..... kita masih beruntung karena masih ada area-area yang bisa di *preserve* misal di Bandung Utara masih ada lahan yang bisa dikendalikan, supaya setidaknya masih ada 30% nya bisa memberikan kontribusi disana misalnya. Tapi mungkin kalau di Jakarta kan mungkin tidak ada area yang bisa di *preserve*. Nah beberapa juga mencoba mendekatinya dengan *guidelines* untuk ruang terbuka publik di lahan privat. Terutama yang di sasar biasanya pada pengembang-pengembang yang besar. Jadi sebagai syarat untuk mengembangkan disana perlu misalnya mereka memberikan dokumen *urban desain guidelines*, disitu ada peluang untuk bisa menambah ruang terbuka dengan syaratkan kepada yang mau mengembangkan disitu saya sediakan sekian persen ruang terbuka yang bisa diakses oleh publik, Peluang-peluangnya dengan disitu yang bisa diarahkan. Sedangkan kalau lahan individual memang tidak banyak, kendalanya pasti dipengendaliannya, di kontrolnya gitu. Misalnya 10% untuk rumah-rumah pribadi kan siapa yang bisa mengontrol satu-satu, apakah dia sudah menyediakan RTH sebesar 10% gitu. Jadi memang yang bisa paling memungkinkan untuk saat ini disasar adalah pada saat pengajuan izin di pengembang besar itu.

N : Oiya Pak, jadi kembali lagi tadi ke kepadatan bangunan itu ada karena beragamnya jenis penggunaan lahan ya. Beragamnya

penggunaan lahan memiliki pengaruh besar terhadap penyediaan RTH di Karees ya ?

F : Hmm gimana ya, jadi, begini. Beragamnya penggunaan lahan itu muncul akibat semakin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu wilayah, tadi di Karees ya kasusnya, maka semakin meningkat juga permintaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. [A1.6] Mungkin kalau memang melihat dari penggunaan lahan eksisting di Karees sendiri yang sekarang, maka ada kebutuhan terhadap ruang terbuka yang memang bisa melayani tiap penggunaan lahan tersebut. Jadi misalnya memang kalau di Karees terdapat perumahan atau permukiman maka pasti dibutuhkan RTH publik yaitu taman perumahan seperti *playground* atau taman bermain atau taman olahraga gitu kan ya karena ada kebutuhan ekologis dan sosial budaya tadi bagi masyarakat Karees dan kebutuhan perencanaan disitu. [A1.7] Tapi takutnya akan berbeda dengan daerah yang mendominasi kegiatan perjas misalnya, sama-sama membutuhkan RTH tapi mungkin RTH seperti apa yang perlu diadakan disitu, mungkin dia butuhnya ruang terbuka yang sifatnya lebih sosial seperti taman skala kota untuk event-event budaya misalnya atau kegiatan usaha yang sifatnya *temporer* untuk seperti pasar malam dan sebagainya. [A1.8] Atau contoh lagi, fasilitas umum, untuk kegiatan sekolah misalnya, RTH apa yang dibutuhkan? Pasti butuhnya seperti lapangan, atau taman publik yang memiliki lapangan yang bisa digunakan anak-anak sekolah untuk berolahraga dan juga bisa untuk kegiatan belajar mengajar diluar sekolah seperti kegiatan yang berhubungan dengan alam. [A1.9] Jadi saya memang melihatnya seperti tadi, memang ada kebutuhan RTH publik yang berbeda pada setiap dominasi kegiatan penggunaan lahan di Karees sendiri. Faktor penentu kebutuhannya menurut saya ada dengan keragaman aktivitas dari beragamnya penggunaan lahan yang ada seperti fasum, perjas, perumahan tadi,

sehingga akan membentuk karakter yang dibutuhkan pada lokasi tersebut sekiranya selain kepada luasan juga terhadap kegiatan yang ditampung. [A1.10]

N : Lalu Pak, semakin banyak jumlah penduduk kan harusnya semakin bertambah juga jumlah RTH nya ya

F : Ya, karena kalau kita kaitkan dengan tingkat kebutuhan oksigen misalnya, kota yang penduduknya banyak atau padat dengan kota yang penduduknya lebih sedikit dengan luas wilayah yang sama tentu kebutuhannya oksigen nya juga berbeda sebetulnya.[A1.11]. Kemudian juga, itu kalau dari sisi ekologisnya ya kita belum menghitung resapan air misalnya kalau resapan air itu variabelnya akan beda lagi yang di analisis mungkin karena dalam satu kota itu seberapa mampu ia meresapkan air. Kalau memang tanahnya ternyata tidak mampu menyerap air maka fungsi RTH dalam menyerap air juga tidak bisa berfungsi seperti itu. Mungkin bukan itu tujuan RTH yang lebih tepatnya mungkin bisa yang sifatnya lebih sosial yang bisa lebih mengenali kota, seperti itu. Jadi yaitu semua tidak... kalau ingin mengetahui berapa jumlah yang tepat yang dibutuhkan, memang harus melihat dari aspek ekologisnya yang butuh berapa RTH untuk oksigen atau meresap air kah. Kemudian kalau dari sisi *planning* nya atau dari skala pelayanannya kalau kita ambil dari Permen PU no 5 tahun 2008 tentang RTH itu yang bisa kita analisis berdasarkan skala pelayanannya kan kalau taman lingkungan bisa untuk berapa orang sampai taman kota itu kan juga bisa ketemu berapa jumlahnya. [A1.12] Kemudian juga dari sisi sosial budaya atau perancangannya juga itu bisa jadi faktor penentu juga bahwa ada kebutuhan ruang-ruang publik yang khusus dari sisi perancangan yang memang dibutuhkan di kota itu jadi menurut saya harus dari ketiga aspek itu kita baru bisa

mengetahui dengan tepat berapa sih RTH yang dibutuhkan pada kota itu.

N : Di Karees sendiri kan sudah banyak lahan yang menjadi bangunan terbangun yang terdiri dari perumahan, perjas, fasum, dan industry dengan kondisi RTH yang sedikit. Menurut Bapak adakah kasus alih fungsi lahan disana? Melihat jumlah RTH yang sedikit dibandingkan luasan lahan terbangunnya. Kan jomplang gitu Pak

F : Sebetulnya sih itu sangat sulit ya untuk alih fungsi lahan seperti itu memberikan dampak yang besar walaupun sebenarnya ada pengaruhnya. Jadi, mungkin pada kenyataanya akan sulit sekali. Ketika ada orang yang membangun pada lahan yang memang sudah ditetapkan sebagai zona RTH dan juga akan banyak pengawasannya disitu tapi yang lebih mungkin itu memang alih fungsinya bukan oleh masyarakat yang apa, yang menduduki lahan itu secara illegal, yang lebih banyak pengaruhnya itu memang alih fungsi yang direncanakan sendiri oleh pemerintah kota [A1.13]. Misalnya kota Bandung kan dulu batasnya tidak sebesar sekarang, tapi kemudian kan *expand* ke timur. Nah timur itu tadinya apa ?

N : Persawahan Pak

A1 : Ya sawah dan sebagainya ya lahan kosong pokoknya, namun dengan ekspansi pertumbuhan kotanya ya sawah itu menjadi lahan terbangun yang memang sudah direncanakan sendiri oleh pemerintah, [A1.14] seperti itu. Nah tapi mungkin belum diamankan lahan-lahan mana yang untuk dijadikan RTH sebelumnya sehingga menjadi apa, menjadi sulit lagi, Kembali lagi kepada yang tadi, untuk meliputi RTH ternyata sudah semuanya dimiliki oleh *private*.



N : Oo gitu ya Pak jadi alih fungsi lahan itu tidak terlalu memiliki pengaruh ya dalam penyediaan RTH publik

A1 : Sebetulnya itu lebih, menurut saya kan itu porsinya kecil ya menurut saya untuk bisa dijadikan variable yang besar dalam kekurangan RTH, karena bila sudah ditetapkan menjadi zona RTH biasanya juga akan lebih ditaati oleh pemerintah maupun masyarakat. [A1.15], misalnya rumah-rumah yang menduduki lahan RTH belum ditindak lanjuti tapi mungkin sudah banyak juga yang dibereskan. Kemudian juga untuk, kalau orang pribadi bangun di RTH rasanya sangat sulit ya dengan pengawasan dari masyarakat sendiri gitu, jadi saya rasa itu relatif sudah ada mekanisme seperti itu walaupun masih belum optimal. Jadi kekurangan RTH nya saya rasa kalau memang ada, memang bukan karena alih fungsi tapi karena semakin padat dan rencana pemerintah kotanya belum cukup punya isi untuk keberadaan ruang terbuka. Misalkan saya contohkan gini, Melbourne, dia itu punya satu dokumen *open space* strategi yang dimana ruang terbuka itu tidak hanya RTH dan ruang terbuka yang non hijau, jadi semua *public space* gitu. Nah di kita belum punya semacam itu, jadi semestinya kota memiliki *masterplan* untuk RTH nya. Kalau misalkan sekarang dia kekurangan RTH, maka lokasi mana yang potensial untuk dia bisa jadi lokasi penambahan RTH. *At least* indikasinya dulu disini yang kira-kira kurang karena skala pelayanannya misal belum bisa memenuhi seluruh warga disini atau gini, yang perlu banget ada pengamanan air gitu misalnya, setidaknya sudah ada rencana kalau kekurangan mau ditambahin dimana. Kemudian dari sisi perencanaan yang eksisting juga itu harusnya sudah men *state* kalau ada masterplan itu dari sisi skala pelayanannya, kemudian dari sisi ekologisnya sama tujuan perancangannya. Jadi tidak serta merta kalau di Bandung tiba-tiba ada taman tematik, taman foto misalnya disini. Atau tidak serta merta disini ada taman apa hanya karena ini tamannya tidak terurus

kemudian kita revitalisasi. Ini oke memang tujuannya baik untuk menghidupkan itu, tapi kalau kita memiliki *masterplan* tadi kita sudah tau kalau lokasi ini secara skala pelayanannya dia adalah taman apa, misal taman kota gitu, berarti harus bisa memiliki luasan atau fasilitas untuk skala kota. Kemudian kalau di sisi ekologis dia berfungsi sebagai apa, ternyata dia tidak terlalu ada peran ekologis disini karena meresap air susah, dari sisi vegetasi juga kurang dan tidak ada urgensi biologis tertentu disitu. Lalu dari sisi perancangan oh disini dibutuhkan ruang untuk masyarakat berekspresi atau bersosialisasi, oke kalau gitu kita buat taman musik misalnya karena ada urgensi untuk berekspresi komunitas atau orang di sekitar situ yang memang butuh ruang untuk berekspresi dan bersosialisasi, tapi juga didukung bahwa ternyata ini memang tidak ada urgensi ekologis juga disini. Jadi *match* antara apa yang direncanakan dan dibutuhkan. Nah lain hal nya di tempat yang lain misal ruang terbuka ini kita akan kembangkan, memang ada permintaan misalnya ini untuk kegiatan olahraga, tapi tunggu kalau dari sisi ekologis di *masterplan* ini kita lihat merupakan jalur pengamanan air ini, karena dia berpotensi sebagai *flooding area*, limpahan air yang dari sungai terdekat misalnya, berarti gabisa kan digunakan, seperti itu. Nah menurut saya yang lebih kita butuhkan tuh itu, untuk mengatasi *gap* antara kebutuhan dan kondisi eksisting yang ada sekarang, itu yang kita belum punya gitu.

N : Oiya sih Pak memang di Indonesia menurut saya kurang masterplan nya apalagi untuk pembangunan RTH, masih dianggap tidak penting RTH itu bagi beberapa kalangan

F : Nah iya betul itu

N : Ya disini saya sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya sih Pak, mungkin sekian wawancara saya kali ini. Terimakasih atas waktunya

F : Iya sama sama, semoga sukses selalu.

**III. Nama : Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP**

**Jabatan : Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung**

**Tanggal Interview : 3 Maret 2020**

N : Jadi gini Pak, pertama-tama saya mau nanya dulu seberapa penting kah ruang terbuka hijau publik bagi sebuah perkotaan menurut BaPak?

D : Sangat penting, baik dari segi ekologis dari segi sosial penempatannya. Kemudian juga segi ekonomi, kalau dihitung ya, jadi penyediaan oksigen itu kalau beli berapa? Ini dikasih gratis kalau ada ruang terbuka hijau itu. Jadi ada hitung-hitungannya juga, berapa besar kontribusi ekonomi dari ruang terbuka hijau yang kita tidak sadar, itu bisa milyaran setaun kita kalau misalnya disuruh bayar oksigen. Kemarin itu saya tanya, 1 meter kubik berapa isi ulang, 40000 per meter kubik. Nah setiap hektar itu menghasilkan, saya lupa berapa meter kubik gitu ya per hari, yang kita perlukan berapa gitu ya jadi sehari sebetulnya kita harusnya bayar berapa kalau misalnya dihitung secara ekonomi. Jadi dari ekonomi untuk kesehatan ya penting, untuk ekologi resapan air, oksigen, dan sebagainya penting, dan untuk sosial penting juga.

N : Jadi banyak aspeknya yang penting ya Pak. Nah menurut Bapak apa aja sih Pak penyebab kurangnya RTH publik di sebuah perkotaan, ini menurut Bapak saja ya.

D : Umum atau di Bandung ?

N : Hmm sebenarnya di Bandung Pak, namun lebih spesifiknya di SWK Karees.

D : SWK Karees ? Dimana itu ?

N : Itu sub wilayah kota Pak, terdiri dari empat kecamatan, yaitu Regol, Lengkong, Kiaracandong, dan Batununggal.

D : Waduh kalau daerah situ saya jujur kurang paham ya, saya bahas yang di Kota Bandung aja nanti yang sekiranya sama bisa dipakai. Nah kalau di Bandung, satu, memang tidak cukup ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan, artinya memang tidak ada lagi begitu ya. Yang kedua kalau pun ada bisa dibeli itu harganya mahal, mungkin. Yang ketiga itu karena jumlah penduduk yang terus bertambah jadi yang ruang terbuka hijau pun banyak yang bergeser fungsinya diokupasi, terutama sempadan-sempadan sungai itu yang kemudian mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau.[A2.1]

N : Oiyaya Pak itu yang di Kota Bandung ya.

D : Nah ini cerita aja waktu misalnya, Kampanye Calon Walikota Nurul Arifin dengan pasangannya itu, “kami menjajikan RTH sebesar 20%” serius 20% ? Hitungannya segini segini segini, Pak ini bukan hitung-hitungan. Bukan soal hitung-hitungannya! Anda menetapkan target tahu konsekuensinya tidak? gitu. Karena setiap tahun harus membebaskan berapa itukan 1600 hektar, dikurangi ya 1600 dikurangi 800 kalau misalnya cuman 10 hektar ya. Sorry, 3200 hektar harus membebaskan 1600 hektar, dalam 5 tahun, bener targetnya mau segitu? Hitung saja terus berapa, dananya berapa buat itu. Jadi, orang tidak menyadari kadang-kadang terlalu idealis bahwa target saya menyediakan segitu, hitung saya bilang. karena ya itu tidak murah, menyediakan itu.

N : Iyasih Pak terlalu idealis padahal kenyataannya tidak semudah itu, tapi bukankah ada undang-undang atau peraturan yang mengatur syarat penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk ya Pak

D : Kalau menurut undang-undang tidak. Karena berapapun penduduknya minimum 20% ruang terbuka hijau publik gitu ya. Tapi kalau misalnya di Eropa mereka standardnya perorang, jadi semakin banyak orang, 35 m<sup>2</sup> atau jiwa perorang gitu ya, harusnya semakin banyak orang ya RTH nya semakin besar, dan itukan rasional. Orang kalau memang memanfaatkan oksigen ya makin banyak orang oksigennya terus semakin banyak berarti ruang terbukanya semakin banyak.[A2.2] Nah kita dipatok 20%, itupun banyak yang tidak bisa memenuhi terutama kota besar ya, Bandung ngakunya 12% padahal kalau dihitung betul mungkin 6-7%, karena yang dulu ruang terbuka hijau sekarang jadi taman tematik. Taman tematik itu lebih banyak perkerasannya daripada hijaunya, jadi harusnya sudah keluar atau paling tidak, tidak full 100% sebagai RTH lagi. Kalau 200m<sup>2</sup> mungkin tinggal 40 m<sup>2</sup> RTH, yang lainnya perkerasan.

N : Berarti di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur RTH dari segi jumlah penduduk ya Pak

A2 : Kan itu di Undang-Undang No 26 Tahun 2007 kan sudah bilang minimum 20% ruang terbuka hijau

N : yang menyebut jumlah penduduk maksud saya Pak tidak akan ya Pak

A2 : Tidak, makanya, jadi pokoknya *flat* segitu mau penduduknya naik, RTH nya tetep. Itupun juga tidak terpenuhi. Tapi betul itu sebenarnya mempengaruhi karena sebetulnya semakin banyak orang semakin perlu ruang terbuka hijau untuk mensuplai oksigen. Nah

selain itu, jumlah penduduk juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan pola ruang suatu kota. Ketika penduduk suatu wilayah terus *growing up*, maka wilayah tersebut harus membangun fasilitas penunjang kehidupan penduduknya. [A2.3]

N : Fasilitas penunjang seperti sekolah masjid rumah perjas gitu-gitu ya

D : Iya betul

N : Berarti berdampak ke penambahan jumlah luas penggunaan lahannya ya

D : Penyediaan RTH publik memang akan dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan eksisting karena setiap jenis penggunaan lahan itu harus wajib menyediakan RTH publik, harusnya. Tapi nyatanya banyak yang tidak menyediakan RTH publik tuh kaya industry atau perjas-perjas seperti mall,ruko, pasti dia berpikinya uang-uang aja kan tidak memikirkan RTH lah ngapain. Padahal RTH dapat membantu mengurangi polusi yang dihasilkan dari kegiatan industry tersebut. [A2.4] Nah udah gitu kalau dia tadi misalnya sudah terbangun atau padat bangunan, dengan yang belum terbangun itu pasti lebih mudah, lebih murah untuk yang belum terbangun ya untuk dijadikan RTH publik. [A2.5] Karena bila sudah terbangun, pemkot itu harus menyediakan biaya untuk mengokupasi lahan tersebut, tergantung harga lahan nya mahal atau tidak. Kalau mahal pasti lebih sulit lagi, udah mah harus mengokupasi, lalu membebaskan lahan.[A2.6] Meskipun memang bila lahan sudah menjadi lahan terbangun untuk permukiman, komersil, atau infrastruktur penunjang lainnya akan lebih sulit dalam penyediaan RTH publiknya.[A2.7] Misalnya pertanian, oke di *convert* jadi RTH lebih mudah, tapi kalau

misalnya *land use* nya *built-up area* mau perjas atau permukiman ya itu lebih sulit menkonveksinya menjadi ruang terbuka hijau, kecuali kalau menerapkan KDH, koefisien dasar hijau, jadi boleh perumahan tapi KDH minimum 10%, boleh komersil tapi KDH minimum 20%, itu juga belum tentu terjadi.

N : KDH masuknya ke private ya Pak

D : Ya itu kalau KDH pasti private. Halaman rumah 10% sisakan buat resapan air. Karena kan satu kota 30% RTH , 20% publik, 10% privat. Nah 10% privat ini kalau dibagikan ke kavling ya masing-masing jadi KDH 10% 10% 10% 10% 10%. Tapi kan kalau pemerintahan naikin 30%, komersil rumah susun 50%, atau apartemen. Kalau di Bandung 50%. Untuk rumah susun itu KDB maksimum 40% KDH minimum 50%. Jadi lebih dari yang diminta cuman 10%, nah itu untuk mengejar yang RTH publik yang tidak terkejar penyediannya oleh pemerintah kota.

N : Jadi semakin padat bangunan suatu wilayah semakin sulit pemenuhan RTH ya

D : : Ya, semakin padat bangunan pada suatu kawasan seharusnya semakin banyak orang dan semakin perlu ruang terbuka hijau, baik untuk kesehatannya ya penyediaan oksigen, maupun untuk sosialnya. [A2.8] Bayangkan padat terus tidak ada tempat main tidak ada ruang terbuka hijau, nanti jadi preman semua

N : Hehehe bahaya ya Pak

D : Jadi memang harus punya tempat mainnya untuk sosialisasi juga. Kalau tidak ya stress semua.



N : Betul itu Pak. Berarti tadi dalam penyediaan RTH itu tanah harus milik pemerintah sehingga bila tanahnya masih milik masyarakat itu menjadi tantangan buat pemerintah untuk merubah status kepemilikannya

D : Ya betul, karena kalau ditempat yang perlu disediakan tetapi hak milik ya harus dibebaskan. Satu. Kedua kalau pemerintah tidak bisa ya harus oleh swasta yang misalnya melalui CSR gitu dia yang beli lah gitu ya. Yang ketiga, kalau mau menyumbangkan boleh, wakaf hibah gitu ya untuk ruang terbuka hijau, tapi dimana-mana kalau wakaf maunya mesjid atau mushola atau pesantren sekolah, tidak mau buat RTH. Kalau RTH nya dipake buat yang baik-baik.

N : Padahal RTH juga baik hehehe

D : Bukan amal jariah malah dosa jariah heu

N : Untuk membebaskan lahan sendiri pemkot butuh anggaran yang besar juga ya Pak

D : Iya, itu tadi, RTH publik itu kan milik Pemda, kalau misalnya tanahnya bukan punya Pemda berarti dia harus membebaskan lahan, nah itu tergantung lokasi dan pusatnya. Kalau misalnya lokasi yang diperlukan tapi harganya mahal ya dia harus menganggarkan biayanya besar.[A2.9] Tapi kalau misalnya di lokasi yang harganya murah tapi ya dipinggir kota jauh-jauh gitu, ya itu mungkin untuk resapan dan oksigen, hidroekologis itu oke. Tapi mungkin untuk sosialnya tidak terlalu efektif karena jauh gitu ya. Kan itu tersebar, walaupun bisa juga, tapi lokasi-lokasinya ya tidak terlalu berdekatan dengan hunian, harus jalan lah apa kesana.

N : Tapi di Kota Bandung sendiri pemerintahnya apa sudah pernah melakukan pembebasan lahan untuk RTH ?

D : Kecil sih, waktu Pak Emil jadi walikota juga masih sedikit-sedikit, makin lama makin kecil gitu. Aduh pembebasan bukannya makin besar makin kecil. Kalau itu coba saja cek datanya deh, anggaran dana pengadaan tanah untuk RTH. Jangan bikin tamannya, bikin tamannya banyak taman tematik tematik tematik tapi kan tamannya *eta-eta keneh*, jadi tidak ada penambahan.

N : Paling kasusnya yang di Taman Kiara Arta aja itu ya Pak, yang dari industri jadi RTH

D : Wah saya mah tidak tahu emang daerah san aitu.

N : Baru Pak dulunya industri garmen terus sekarang jadi taman.

D : Yang di Kiaracondong itu ya?

N : Iya Pak

D : Bagus tuh, ya walaupun saya juga tidak tahu sebetulnya nanti jadi apa ya

N : Katanya mau dibangun apartemen sih Pak ujung-ujungnya

D : Nah kan bener, sekarang sih taman gitu, bentar lagi terus apartemen

N : Berarti ada kasus alih fungsi lahan ya Pak disini

D : Alih fungsi lahan memang ada dua ya yang satu transformasi, yang satu itu ekspansi. Kalau transformasi ya dari perumahan jadi toko gitu

ya, terbangun ke terbangun lah udah. Nah tapi yang ekspansi itu adalah yang tadinya bukan terbangun jadi terbangun, sawah jadi real estate, industry walaupun sebetulnya kalau dari pertanian ya lahan kering lahan terbuka dia masih resapan air gitu ya walaupun tadinya tidak tidak hijau hijau amat lah kalau tidak ada pohonnya, tapi dia masih mending lah ada fungsi ekologisnya, hidrologisnya, walaupun tidak memberikan oksigen.[A2.10]

N : Tapi adakah Pak yang semula harusnya untuk RTH tapi malah jadi terbangun?

D : Menurut saya malah pemkot tidak merencanakan adanya RTH, kurang lah rencana peruntukan lahannya untuk RTH karena mungkin kurang dipahami fungsi RTH nya sendiri ketika merencanakan. Banyaknya pasti peruntukan lahan untuk komersil.

N : Ooo begitu ya Pak. Kalau begitu, ya sudah ini sekian wawancara dari saya Pak terimakasih atas jawaban dan masukannya

D : Oke semoga sukses ya skripsinya

N : Baik Pak Terimakasih.

**IV. Nama : Andry Heru Santoso, ST, MT**

**Jabatan : Kasubid I Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan (*Bappelitbang*) Kota Bandung**

**Tanggal Interview: Jumat, 28 Februari 2020**

N : Nah menurut Bapak itu seberapa pentingkah ruang terbuka hijau publik bagi sebuah perkotaan?

A : Ya kan sesuai amanah Undang-Undang Penataan Ruang kan yang di kota yang berkelanjutan itu adalah kota yang bisa menyediakan ruang terbuka sebagai elemen untuk pertama tentunya ya untuk apa ya ekologis ya RTH itu sebagai tempat resapan air, kemudian juga penyediaan paru-paru kota, oksigen ya itu elemen lingkungan. Kedua, elemen sosial, bahwa RTH juga bisa sebagai ruang publik interaksi masyarakat. Ketiga adalah RTH juga bisa sebagai estetika kota, jadi keindahan kan kalau banyak taman kaya Surabaya kan kotanya jadi menarik, dan yang keempat mungkin aspek ekonomi, jadi kalau ada ruang terbuka taman ini kan tentu aktivitas sekitar mungkin ekonominya juga wisata. Ini kan? jadi ada empat, lingkungan hidup yang utama, yang kedua sosial, ketiga estetika atau keindahan, keempat ekonomi. Nah mungkin keempat itulah yang dijadikan kenapa suatu kota itu harus ada, karena sekarang kan penduduk di kota itu kan semakin padat tapi ruang kota itu semakin kecil, padahal harusnya semakin banyak penduduk maka RTH juga semakin banyak. [P2.1] intinya kalau semua lahan diperuntukan untuk perumahan untuk infrastruktur lain seperti fasum atau komersil nanti lama-lama kan semakin sedikit RTH nya karena sudah terbangun. [P2.2] Itulah yang perlu diinterferensi oleh pemerintah sebagai ruang publik.

N : Jumlah penduduk memiliki peran yang besar ya Pak dalam penyediaan RTH publik di Karees

A : Iya, kan ada kan standart nya kan? Standart di Kementrian PU, artinya untuk misalnya Kota Bandung, sekarang kan penduduknya yang kota Bandung itu 2 juta setengah, berapa taman kota yang dibutuhkan untuk jumlah penduduk dengan jumlah itu. Kemudian yang taman skala kawasan, ada juga standart pelayanan minimum kan nanti tolong di cek, jadi ada yang taman skala kota, misalnya berapa setiap satu juta penduduk harus ada taman skala kota, kemudian setiap 500 ribu, nanti ada taman skala kawasan, ada yang lebih lagi yang lingkungan. [P2.3], jadi nanti tinggal berapa misalnya kalau untuk kota Bandung yang 2 juta setengah berarti minimal ada 2 taman skala kota yang harus ada. Nah kemudian yang skala kawasan, berarti misalnya kalau dia ini tambah lagi per 500 ribu dia ada 5, jadi semakin bagus itu semakin baik artinya kalau melebihi standart lebih bagus kan. Ya artinya tinggal liat sekarang standart PU nya kalau untuk kota Bandung atau wilayah Karees. Belum lagi sebenarnya taman-taman yang ada di Bandung atau di wilayah Karees kan tidak hanya dinikmati warga sana kan, banyak dari kabupaten atau kota-kota kecil sekitarnya, yang kaya taman di alun-alun, banyak orang luar kota Bandung, dari kabupaten Cimahi, artinya juga dengan posisi kota Bandung sebagai kota wisata tentunya taman-taman itu akan semakin menarik untuk di kunjungi sebagai wisata yang “murah meriah” lah. Bagi saya jumlah penduduk ini memang memiliki peran, karena dalam standart pun satu taman kota itu ada skala pelayanannya, sehingga ketika jumlah penduduk terus bertambah maka jumlah RTH publik nya juga ikut bertambah. Selain itu, semakin bertambahnya penduduk maka semakin bertambah juga jumlah perumahan dan infrastruktur kotanya yang menyebabkan RTH semakin sedikit karena permintaan kebutuhan akan pembangunan kawasan terbangunnya tinggi. Sama

hal nya yang terjadi di Karees, bisa kita lihat disitu penuh sekali dengan permukiman dan perjas, karena memang permintaannya tinggi akibat jumlah penduduk disana yang padat. [P2.4]

N : Tapi menurut Bapak sendiri jumlah taman atau RTH di Karees tuh sudah memenuhi standart belum?

A : Ya nanti gini, intinya, kalau menurut saya pribadi sih ya belum lah. Makanya sekarang ada, karena tadi, ketersediaan lahan kan semakin susah karena emang di Karees sudah padat bangunan nya sehingga semakin sulit dibangun RTH [P2.5], kemudian kedua, harga lahannya kan gitu kan. Artinya misalnya kan kalau untuk taman skala kota minimal berapa lahannya? 1 hektar? Nyari lahan 1 hektar di Bandung mah susah, belum lagi harga lahannya yang tinggi apalagi di Karees jadi susah mau bangun RTH publik [P2.6], makanya sekarang program Pemkot tuh kebanyakan taman skala RW, skala lingkungan, ya kan kita ada 1500. Karena tadi semakin skala lingkupnya taman RW , sekarang yang kecil kecil aja tapi banyak, ya artinya kan effortnya akan lebih mudah. Dan nanti dilihat standarnya taman skala kota kebutuhan lahannya sekian, cari lahan di kota Bandung segitu, kalikan harganya per meter, ya artinya kita juga anggaran APBD kan terbatas ya, kan hanya taman, pasti untuk yang lain, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jadi artinya juga kita memerlukan kolaborasi dengan masyarakat, penyediaan taman taman lingkungan RT RW kan kita ada sekitar 1560an nanti dilihat di BPS, Karees sendiri sekarang ya dengan semakin terbatas ruang itu karena padatnya bangunan ya mungkin solusinya emang taman-taman RW yang semakin dibanyakin.

A : Jadi jumlah penduduk itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan eksisting ya di Karees

P2 : Ya betul ! Artinya gini, kalau semakin fungsinya kan Karees adalah SWK dengan fungsi perdagangan dan jasa, tentunya faktor penggunaan lahan tersebut akan mempengaruhi kecenderungan untuk mengubah fungsi yang dari non-terbangun menjadi terbangun. Kemudian juga fungsi tadi ya perdagangan dan jasa tentunya juga ada kebutuhan lain juga termasuk perumahan, kan kebutuhan perumahan semakin ya artinya kalau lahan itu kan kecenderungan pasarnya dia akan produktif secara ekonomi kan, kalau taman kan gak menghasilkan pemasukan.[P2.7] Tapi kalau dia jadi hotel jadi café jadi apartemen atau komersil lainnya kan bisa ada pemasukan, makanya kecenderungannya akan beralih fungsi menjadi kawasan-kawasan yang produktif secara ekonomi, [P2.8] sedangkan kalau jadi RTH kan memang ada fungsi ekonomi tapi tidak seefektif kalau jadi perumahan, atau komersil. Karena selain itu juga pajaknya kan mahal kalau di pusat kota, pajak bumi bangunan, coba di Dago tuh harganya puluhan juta, kalau dia cuman jadi taman aja gak menghasilkan dari mana? Makanya banyak kecenderungan pusat kota itu akan beralih fungsi menjadi kawasan komersial, itulah peran pemerintah untuk mengatur atau pengadaan lahan, supaya dia juga ada fungsi RTH nya.

N :Di Karees ini kan banyak sekali industry ya Pak, apalagi di daerah Kiaracondong dan Batununggal, nah apakah ada industry yang menyediakan RTH publik?

A : Saya rasa tidak ya, industry tidak menyediakan RTH publik karena pasti 90% lahannya sudah menjadi lahan terbangun kan, paling ya private statusnya [P2.9]

N : Berarti sama seperti fasilitas umum ya Pak di Karees seperti masjid atau sekolah

A : Iya, fasilitas umum itu juga tidak menyediakan RTH publik sih malah menyediakannya RTH private kan seperti lapangan didalam rumah sakit misalnya kaya di Santosa itukan. Tapi tidak terhitung RTH publik. Paling yang membantu itu jalur hijau di sekitarnya ya. [P2.10]

N : Pembangunan infrastuktur penunjang tersebut menyebabkan kawasan tersebut memiliki kepadatan bangunan yang tinggi ya kalau masif pembangunannya

A : Ya, seperti di Karees itu kan kepadatannya sudah tinggi sekali ya sekarang. Nanti dilihat sebenarnya idealnya ya, satu orang itu mempunyai bangunan berapa luasnya, termasuk untuk proporsi RTH yang harus disediakan, memenuhi standart tidak. **Kalaupun nanti kepadatan bangunannya sudah terlalu tinggi, artinya untuk penyediaan RTH secara memenuhi standart tadi agak susah, harus ada inovasi.** [P2.11] Mungkin nanti satu, pengembangan taman-taman RW, yang kecil-kecil tapi banyak. Kedua, adalah taman-taman *vertical garden*, *urban farming*, gitu kan. Artinya perlu ada inovasi bagaimana lahan-lahan yang sempit, lahan-lahan yang sudah padat bangunan itu bisa ada fungsi RTH nya walaupun tadi secara ekologis memang tidak terlalu tapi secara kebutuhan sosial, untuk faktor estetika, ekonomi ada gitu ya. Kan sekarang ada *roof garden*, ada *vertical garden*, taman yang di dinding atau di atap. Kemudian *urban farming*, itu harus di, ya memang untuk yang sudah padat memang harus seperti itu. Ya artinya kan tidak mungkin lagi pengembangan secara ekstensifikasi. Ya itu faktornya, nah nanti bagaimana masyarakat dilakukan edukasi, bahwa tanah-tanah yang sempit ini bisa untuk pengembangan kawasan-kawasan padat tadi.



N : Oh iya, itu berarti ada ya Pak karena sekarang di Karees sangat padat bangunan, kasus-kasus kaya misalkan lahan ini emang tujuannya untuk RTH tapi berubah fungsi jadi terbangun ?

A : Ya ada sepertinya lahan untuk RTH namun jadi kawasan terbangun mungkin, tapi kan itu namanya pelanggaran tata ruang, tapi kayaknya di Karees tidak ada ya [P2.12] dan pelanggaran pasti ada sanksi, indikasi pelanggaran nanti ada sanksi administratif sama sanksi pidana. Kan kalau itu kan nanti pidananya ke penegakan hukum, iya, dibongkar dikembalikan kepada fungsi yang sesuai tata ruang. Kalau memang peruntukannya untuk RTH untuk taman ya harus ini. Intinya itu, tidak boleh, berarti artinya yang membangun disitu berarti tidak punya izin, tidak ada IMB, karena kan fungsinya itu, iya. Karena itu tadi, ketika nilai lahan, harga lahan, semakin mahal, berpengaruh sama bayar pajaknya juga jadi ikut mahal, maka orang-orang akan memanfaatkan lahannya menjadi daerah komersil yang bisa memberikan keuntungan besar, bukan RTH publik yang memang keuntungannya bukan bentuk uang kasarnya gitu. Jadi biasanya masyarakat menjualnya ke pengembang yang memberikan harga tinggi, kalau dijual ke pemerintah kan harganya ya cuma sesuai NJOP, gak jauh-jauh dari NJOP. Nanti kan intinya gini, kan tadi kecenderungan perkotaan itu kan harga lahan semakin mahal lahan semakin sempit, kecenderungannya kan beralih fungsi menjadi komersial, perdagangan jasa, kawasan perumahan [P2.13], kan gak ada kalau di kota ada sawah, tiba-tiba di Dago ada sawah, ada taman yang gede, itu kecenderungannya kan melawan pasar, Nah itu kan kecenderungannya akan beralih, nah itu yang mungkin perlu ada upaya pengendalian. Pengendalian kan ada 4, mulai dari peraturan zonasi, perizinan, intensif disintensif, terakhir sanksi, kalau tetep melanggar aja. Kalau tetep melanggar ya sanksi, sanksinya bisa administratif terus sanksi pidana. Jadi artinya, nah itu makanya

mekanisme pengendaliannya nanti nanya ke Dinas Penataan Ruang. Kemudian, mungkin harusnya nambah nih Satpol PP, kalau Dinas Penataan Ruang itu kan sifatnya hanya pengawasan dan pengendalian, tapi nanti penertibannya kan oleh Satpol PP, eksekusi, tanahnya dibongkar, bangunannya dibongkar, itu oleh Satpol PP. Kalau Dinas Penataan Ruang hanya “oh ini sudah terindikasi melanggar” jadi nanti mereka bersurat ke Satpol PP bahwa ini layak untuk dibongkar.

N : Selain itu apakah harga lahan berpengaruh dalam penyediaan RTH dari segi pembebasan lahan ?

A : Jadi gini, harga lahan di kota besar itu sekarang ada yang namanya NJOP dan ada juga harga pasar. Nah kalau NJOP kan memang harganya rendah, tapi kan kalau itu nantinya akan mengikuti harga pasar. Ada yang di Dago 25 juta per meter, kebayang membangun taman 100 meter aja dikali 25 juta untuk di Dago berapa coba ? Kalau yang di Karees kan juga harga lahannya sudah udah mahal. Nah nanti dilihat, di wawancara ke setiap kecamatan, berapa harga lahan yang ada disana. Di Lengkong misalnya, atau di Kircon, NJOP nya berapa dan harga pasarnya berapa. Misalnya di NJOP harganya 2-3 juta, tapi harga pasarnya bisa 5 juta. Nah tadi, nanti dilihat dengan penduduk yang ada di kecamatan ini, kali aja kekurangannya yang sudah ada berapa, kebutuhannya sesuai standart berapa, tinggal nanti kekurangan itu dikurangi harga tadi. Nah bandingkan dengan APBD kota, pasti ga akan mampu pemerintah untuk menyediakan. Jadi intinya harga lahan memiliki pengaruh dalam penyediaan RTH ketika pembebasan lahan, karena semakin tinggi harga lahan maka pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan RTH publik, karena butuh anggaran yang besar sedangkan APBD kita terbatas. Karena tadi itu, ketika lahannya masih milik masyarakat maka harus dibebaskan sehingga jadi milik pemerintah [P2.14] Kebutuhan masyarakat kan bukan hanya RTH

doang, disitu juga tadi masyarakat lebih membutuhkan sekolah misalnya atau puskesmas, peribadatan. Ya artinya kan tadi, kita bagaimana nantinya lewat wakaf warga misalnya. Warga yang menyumbangkan lahan untuk menjadi taman RW, jadi diserahkan kepada pemerintah, kaya gitu ya paling.

N : Oiya jadi RTH publik itu status lahan harus milik pemerintah ya agar dapat dikelola terus oleh pemerintah

A : Ya jadi kalau status kan ada yang namanya RTH publik, ada RTH privat. Nah RTH publik itu yang harus disediakan oleh pemerintah, kalau RTH publik itu yang pemerintah bisa milik masyarakat bisa milik swasta, nah itu artinya disini kepemilikan juga nanti sangat berpengaruh terhadap penyediaan RTH publik. Kalau RTH publik mah pasti pemerintah akan menggaransi lah itu tidak akan beralih fungsi, tapi yang namanya RTH private itu juga ada kemungkinan bisa beralih fungsi, kan ini tanah tanah saya, artinya juga itu perlu dikendalikan, nanti di mungkin di tata ruang nya secara detail ya di RDTR, artinya walaupun dia kepemilikannya privat, dikendalikan juga harus ada. Kalaupun dia nanti beralih fungsi, dia harus ada pengganti, atau diganti oleh pemerintah, dibeli.

N : Saya mau bertanya Pak kalau yang di Taman Kiara Artha itu ?

A : Itu mah milik swasta, tapi lahan milik Pemkot. Jadi kita kerja sama. Pernah denger kan BOT ? *Built Operate Transfer*, PPP, *public private partnership*, nah jadi tanahnya dimiliki oleh pemerintah lalu dikerjasamakan selama 20 tahun atau 30 tahun. Nanti dikelola oleh swasta. Nah nanti kalau sudah 30 tahun nanti asetnya dikembalikan ke pemerintah. Itu yang coba dilihat di BOT atau BOO, seperti itu. Jadi bisa bekerja sama juga, masyarakat dengan pemerintah bisa Kerjasama. Atau pemerintah dengan swasta juga bisa bekerja sama.

Artinya kan tadi, pemerintah tidak memiliki anggaran yang memadai, tapi nanti swasta yang membangun dan mengelola selama 30 tahun. Nanti kalau sudah dapat untung dikembalikan lagi. Pemerintah kan juga untung tamannya terpelihara, terus masyarakat juga memperoleh ruang-ruang publik disitu. Semua pihak jadinya dapat untung, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi ada pentahelix, kolaborasi pentahelix itu kolaborasi pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan swasta atau pembisnis itu tadi disitu begitu.

N : Tapi bukankah itu juga termasuk alih fungsi lahan ya Pak? Dari industry jadi RTH

A : Ah iya, alih fungsi lahan dari terbangun menjadi terbangun ya, memiliki dampak positif itu bagi warga Karees kan mereka jadi punya ruang terbuka publik

N : Tapi apakah ada taman lain yang berkolaborasi dengan swasta gitu seperti Taman Kiara Artha ?

A : Sejauh ini baru Taman Kiara Artha ajasih ya. Tapi itu nanti juga bakal dibangun apartment di sekitar taman itu. Tapi sekarang memang yang dibangun taman dulu. Jadi dari situ ya peluang-peluangnya untuk penambahan RTH atau taman nya gitu.

N : Oh begitu Pak. Iya kalau dari saya sih segini aja Pak

A : Oiya yasudah kalau begitu.

N : Iya Pak terimakasih ya Pak

A : Iya sama-sama.

**V. Nama : Dwi Priyono, S.P.**

**Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung**

**Tanggal Interview : Senin, 9 Maret 2020**

N : Jadi gini Pak saya sedang melakukan penelitian itu di SWK Karees terkait ruang terbuka hijau publik. Jadi saya mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan RTH di SWK Karees. Saya mengambil SWK Karees karena di sana di dalam RTRW Kota Bandung jumlah RTH nya paling kecil se Kota Bandung.

D : Oiya bener, terus ?

N : Nah pertama saya ingin bertanya dahulu, menurut Bapak seberapa penting kah RTH publik bagi sebuah perkotaan ?

D : Tentu saja sangat penting ruang terbuka publik itu, apalagi publik kan kewajiban pemerintah yang harus mengadakannya namun keberadaan yang menjadi bahan penelitiannya kan di pusat kota ya di SWK Karees. Kalau berdasarkan perhitungan masih kecil yang memang kalau di pusat kota itu gitulah, peninggalannya peninggalan lama jadi saat akan dikembangkan agak susah. Kemudian sangat penting karena yang namanya ruang publik masih dipergunakan oleh masyarakat banyak dan tadi itu kewajiban pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang ya, wajib menyediakan ruang terbuka hijau 30%, yang 20% nya publik yang 10% nya private.

N : Menurut Bapak apakah penyediaan RTH publik di Karees itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat ya?

D : Nahkan yaitu standar nya ada taman skala RW, taman skala kelurahan, kecamatan, dan kota. Nah tapi saya belum tahu nih jumlah penduduk di Karees, saya tidak pernah ngitung jumlah penduduk. Nah tapi kalo berdasarkan angka-angka tersebut ya pasti lah kurang, orang kenyataanya, apa, di Bandung saja ruang terbuka hijau publiknya masih kecil gimana di Karees. Secara keseluruhan se kota Bandung itu masih kurang, apalagi kalo sudah di plot ke per wilayah ya per wilayah ya pasti masih kurang.

N : Maksud saya apakah jumlah penduuduk pada Karees mempengaruhi ketesediaan RTH publik Pak?

D : Oh iya mempengaruhi, kan ada standart nya itu satu taman untuk melayani berapa ratus penduduk. Jadi jumlah penduduk memang mempengaruhi penyediaan RTH ya, semakin banyak jumlah penduduk maka RTH atau taman yang harus disediakan juga semakin bertambah. [P3.1] Tapi paling tidak dengan program sekarang satu RW satu taman bermain kan itu untuk memenuhi itu, kita kan punya kebutuhan di RPJMD, rencana pembangunan jarak menengah, di program strategis kita juga salah satunya ya satu RW satu taman bermain, untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. Tapi ternyata tidak mudah, cari lahannya juga susah, ada warga yang mengusulkan “Pak ini ingin dibuat taman RW tanahnya kosong”, pas didatengin di survey , “ini punya siapa?” “ Gatau Pak punya siapa katanya, ini terlantar aja udah lama”. Nah tidak bisa, tidak boleh. Kan kita harus membangun di tanah milik pemerintah tapi untuk kepentingan publik. Kita beberapa kali mengalami itu, ada tanah terlantar misal ga bisa dibiarkan terlalu lama warga ngusulkan ya daripada terlantar ya ga berani kita ya kan gaboleh kemudian ada juga tanah perumahan.

N : Tapi apakah pemerintah tidak melakukan pembebasan lahan? Agar tanah tersebut tetap bisa dibangun taman

D : Kendalanya ada di harga lahan yang tinggi sedangkan anggaran pemkot itu tidak cukup. Contoh ya, saya mau menyediakan ruang terbuka hijau di tengah kota, nah harga lahan di tengah kota itu kan mahal, sok di Regol udah berapa harganya kan. Nah si lahan itu kan masih milik masyarakat ya atau swasta, nah kita ini pemerintah harus beli kan lahannya, akhirnya tidak jadi. Jadi memang kendalanya ada di anggaran pemerintahnya juga, bila harga lahannya terlalu mahal ya pemerintah tidak bisa membeli karena tidak cukup anggaran. [P3.2]

Tapi harga lahan di setiap kecamatan kan beda ya, di Gedebage, disini, di Dago, di Ujung Berung, di Mandala Jati kan beda-beda ya, jadi memang kecenderungan gagal bidang pertanahan untuk membebaskan lahan di pusat kota itu lebih besar ketimbang di pinggir kota, karena harga lahan di pusat kota itu sudah mahal, makanya di Karees ini dia kan di pusat kota, RTH nya sedikit, karena harga lahanya tinggi, sehingga pemerintah susah mau membebaskan lahannya. Kan bidang pertanahan itu tugasnya yang membebaskan dan membeli lahan untuk dibangun menjadi ruang terbuka hijau publik gitu jadi taman. Tapi kita pernah ya membebaskan lahan di Pasir Rimpun, si lahan yang kita bebaskan ini kecil lah cuma 3000 m2, namun karena di Pasir Rimpun tidak terlalu padat dan si lahan yang kami bebaskan sudah banyak pohon besar hijau gitu, ya kita bangun saja taman skala RW 200 m2, si hijau sisanya kita pertahankan gitu. Kamu rumah dimana?

N : Di Dago Pak

D : Di perumahan ?

N : Di Dago Sutes Pak, apartment, di jalan sangkuriang

D : Oh apartement, ya sama seperti apartement pasti harus ada ruang terbuka hijau publiknya kan ?

N : Iya harus

D : Apalagi apartement kan harus diserahkan ke pemerintah kota. Nah di perumahan-perumahan misalnya di wilayah Karees di Kecamatan Regol kan ada beberapa perumahan tuh, udah keliling-keliling di Kecamatan Regol ?

N : Iya udah

P3 : Ada perumahan apa gitu, eh beberapa perumahannya di Karees belum diserahkan ke pemerintah kota, ruang terbukanya, jadi kita tidak bisa membangun juga karena itu kan masih lahan pemilik pengembang. Jadi memang sebenarnya perumahan atau permukiman gitu ya, di situ harusnya membangun RTH publik tiap satu perumahan, tapi banyak yang tidak bikin atau tidak menyerahkan lahannya untuk dibangun RTH publik, sehingga jadi kurang jumlah RTH nya [P3.4]

N : Tapi menurut Bapak sudah efektif kah satu RW satu taman itu Pak ?

D : Seharusnya iya harusnya sudah, namun kenyataannya kan masih terbatas lahan di RW itu ya tadi itu kendalanya ada yang belum diserahkan ada yang bukan milik pemerintah tanahnya. Jadi kita tidak berani ya jadi tentu saja sangat efektif kalo sudah terwujudkan, kita ada beberapa RW di kecamatan gitu. Jadi kalau orang yang Karees biasanya ke Taman Tegalega ya, karena itu memang taman skala kota, itukan milik kita ya milik pemerintah, jadi fasilitas itu taman skala kota tapi digunakan oleh warga Karees sendiri, karena memang terbatas kan RTH di Karees itu.



N: Oh iya Pak, berarti dalam penyediaan RTH publik itu penggunaan lahan eksisting di Karees juga memiliki dampak ya

P3 : Iya. Itu pasti pertamanya berhubungan dengan Dinas Tata Ruang, kan yang menyediakan ruangnya Dinas Tata Ruang. Kalau DPKP mah penggunanya. Setelah ditentukan oleh Dinas Tata Ruang, misalnya perkantoran atau perdagangan dan jasa, pasti kan proses pertamanya harus Dinas Tata Ruang dulu. Ketika akan membuat sebuah kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, pasti disyaratkan oleh Dinas Tata Ruang, harus misalnya 80%, 20% nya RTH dan jalan lalu 60% nya bangunan, itu di Karees ya. Beda dengan di Dago, di Dago bisa kebalikannya, 60% RTH dan 20% bangunan karena Bandung Utara, karena di daerah dataran tinggi harus lebih luas kan RTH nya. Jadi sangat berpengaruh. Jadi kesimpulannya memang berpengaruh dari syarat-syarat per jenis penggunaan lahannya itu sendiri untuk menyediakan RTH pada undang-undang yang ada, misal perumahan permukiman harus menyediakan 30% RTH publik, perdagangan dan jasa 20% RTH publik atau perkantoran 10% kan beda-beda ya keharusannya gitu. Ya kaya misalnya permukiman, walaupun jadi lahan terbangun tapi pasti ada tamannya kan setiap permukiman ada taman skala RW itu misalnya, meskipun pasti lebih banyak luasan untuk perumahannya daripada RTH nya [P3.5] Kalau jadi komersil gitu jadi perdagangan jasa, pasti jadi tidak ada RTH publiknya. [P3.6] Industri juga, pasti ga ada kan industry yang menyediakan RTH publik. Apalagi di Kiaracondong itu kan banyak industrinya tapi RTH publiknya sedikit sekali, karena ya memang tidak disediakan oleh si industrinya. [P3.7]

N : Kalau fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat ibadah di Karees Pak?

P3 : Kalau fasilitas umum ya sama sih tidak menyediakan RTH publik juga, karena kalau sudah jadi lahan terbangun jadi si jenis-jenis penggunaan lahan itu pasti udah susah dalam penyediaan RTH publiknya. Tapi kan ada tuh kaya kantor atau rumah sakit yang menyediakan taman, tapi ya private statusnya ya bukan publik. [P3.8]

N : Semakin banyak luasan penggunaan lahannya semakin sulit juga ya dalam menyediakan RTH karena timbul kepadatan bangunan yang tinggi

D : Iya, pembangunan permukiman, fasilitas, dan lain-lain akan menyebabkan lahan yang tidak terbangun jadi tidak ada. Kan kalau suatu kawasan dan sudah menjadi lahan terbangun semua, mau bangun ruang terbuka hijau nya dimana, kan susah ya karena isinya bangunan semua, kepadatan bangunannya jadi tinggi. Soalnya menyediakan ruang terbuka hijau itu membutuhkan lahan kosong juga ya. Apalagi di Karees itu padat bangunan sekali [P3.9], sehingga menurut saya berpengaruh karena itu tadi, bila sudah padat akan susah mengembangkan ruang terbuka hijaunya kecuali nanti ada inovasi baru, seperti *vertical garden* kan bisa jadi alternatif dalam pengadaan ruang terbuka hijau, meskipun nanti tidak semua fungsi ruang terbuka hijaunya didapat. Kan kalau *vertical garden* itu paling fungsi sosial nya yang didapat ya, mungkin fungsi ekologisnya kurang tapi ya adalah meskipun tidak banyak.

N : Apakah ada indikasi alih fungsi lahan dari untuk RTH jadi kawasan terbangun Pak di Karees? Melihat padatnya kawasan terbangun di Karees sendiri

P3 : Menurut saya sih kecil ya adanya alih fungsi lahan. Mungkin ada alih fungsi lahan dari RTH ke terbangun tapi kecil, karena bila suatu lahan memang sudah diperuntukan menjadi ruang terbuka hijau ya tidak boleh diubah lagi peruntukannya oleh Dinas Tata Ruang. [P3.10]

Kecuali perubahannya ini dari tanah kosong atau sawah jadi terbangun, baru mempengaruhi, tapi kalau dari RTH ke terbangun sepertinya tidak karena sudah ada aturannya oleh Dinas Tata Ruang. Wilayah Karees itu, Kecamatan Regol ya contohnya, itu ruang terbuka hijaunya memang sedikit. Pasti selain perumahan mungkin di Regol ada sempadan sungai, nah ya itu paling, sempadan sungai, jalur hijau jalan, terus taman di perumahan, pasti tidak akan berubah fungsi. Kalau ketika itu berubah fungsi berarti itu bukan milik pemerintah, berarti milik masyarakat atau swasta.

N : Oh gitu ya, wawancara dari saya ya ini ajasih Pak

D : Oiya sudah tidak ada lagi

N : Iya Pak sudah

D : Yasudah kalau begitu, semoga bermanfaat ya

N : Iya Pak terimakasih.

## Lampiran D

### Data Sasaran 2

Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
Babakan Surabaya	2014	1.53918912	18794	3.78059350	53.13262012	2.50717291	6.38138478	81.3668865	802103
	2015	1.54025363	19005	3.78537267	53.15673546	2.65992038	6.40216758	81.3847307	802204
	2016	1.55236274	19482	3.78847564	53.18921637	2.77673049	6.45623747	81.4038448	802302
	2017	1.57168453	20589	3.79172639	53.20127365	2.84774837	6.48926385	81.4263538	916102
	2018	1.58327366	21411	3.79533646	53.25739193	2.99975375	6.50228466	81.4374646	916112
Kebon Jayanti	2014	0.00011627	10672	0.22417700	24.80867616	0.10956023	1.64982844	96.7384789	802111
	2015	0.00012736	11082	0.22736485	24.83623546	0.15860385	1.65203050	96.7563540	802152
	2016	0.00016355	11824	0.30263374	24.87263254	0.20973648	1.69821459	96.7938483	802176
	2017	0.00017365	12573	0.32658374	24.89273616	0.27984756	1.72326547	96.8048387	916119
	2018	0.00018375	13172	0.37453647	24.94733647	0.30993848	1.74532672	96.8356483	916156
Cicaheum	2014	1.12381773	10102	3.74656248	53.58298459	4.77746988	24.4918755	95.2245311	802192
	2015	1.13475736	16709	3.75273642	53.60485284	4.85343647	24.5029485	95.2436534	802308
	2016	1.15768726	17021	3.75573636	53.64725274	4.88748365	24.5376038	95.2563744	802332
	2017	1.20377583	17742	3.76038466	53.67625365	4.98949375	24.5573273	95.2746343	1274116

Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
	2018	1.22637375	18858	3.76483739	53.69276493	4.99960385	24.5983384	95.2973437	1274652
Babakan Sari	2014	2.28436177	37008	1.09994776	95.03667397	3.29214476	2.67623963	89.7736441	802273
	2015	2.30182326	37684	1.10283743	95.03892765	3.29830385	2.75370284	89.7938474	802209
	2016	2.41827355	38236	1.11028374	95.04038446	3.34648574	2.80381274	89.8172633	802254
	2017	2.42736930	39523	1.13947493	95.04235473	3.37248578	2.89393328	89.8273633	916152
	2018	2.44765303	40757	1.15827385	95.04763937	3.38258375	2.99363848	89.8496382	916172
Kebon Kangkung	2014	1.60247179	9752	4.85017378	33.85401507	3.03183255	3.43726415	92.7426834	1147167
	2015	1.61637637	10289	4.88493746	33.87836039	3.03384375	3.58378229	92.7635473	1147115
	2016	1.66754385	11672	4.90283747	33.89273605	3.03785375	3.65379337	92.7736483	1147394
	2017	1.70374193	12309	4.94726350	33.90273037	3.04186355	3.67363944	92.7937473	1274425
	2018	1.73748336	13096	4.98648574	33.93736275	3.04997375	3.70975276	92.8038422	1274263
Sukapura	2014	1.96155898	23907	66.1553516	73.77081632	17.0269283	1.79243420	86.0824765	1147109
	2015	1.97364835	25893	66.1904826	73.79102837	17.0927364	1.80226427	86.0928735	1147176
	2016	1.97746386	26753	66.2053738	73.81283747	17.1529957	1.83642859	86.1173687	1147145
	2017	1.99847549	27106	66.2673837	73.83304756	17.1938474	1.85376331	86.1273673	1416382
	2018	1.99997537	28296	66.3053947	73.86436452	17.2229384	1.90335735	86.1336738	1416256
Ancol	2014	0.53881826	10782	1.59201236	67.03379631	0.77553140	2.43151313	97.5318083	2353367

Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
	2015	0.55738744	11004	1.62837133	67.03783947	0.77864375	2.47837293	97.5573267	2353463
	2016	0.58374557	11829	1.65346443	67.03992736	0.78373847	2.50383177	97.5747638	2352526
	2017	0.60374048	12157	1.69387456	67.04002736	0.81684795	2.51827185	97.5948374	2925635
	2018	0.61746537	13078	1.72836476	67.04315264	0.88194746	2.57372158	97.6102838	2925526
Balonggede	2014	0.05405138	5978	0.00581512	27.27066821	5.40632604	17.5274974	92.1168241	1274354
	2015	1.85771099	6846	0.00602837	27.29273385	5.41248474	17.5538728	92.1384784	1274256
	2016	1.88747346	7103	0.00668476	27.30273355	5.48653746	17.5838388	92.1646734	1274354
	2017	1.90384748	7650	0.00694858	27.31720463	5.53263847	17.6038837	92.1838741	1416246
	2018	1.91727365	8621	0.00736464	27.35736326	5.59738473	17.6273648	92.2182732	1416764
Ciateul	2014	20.2739805	5562	0.57476132	36.21219834	1.10865198	5.46420168	67.7549614	1274321
	2015	20.2937364	6204	0.58028375	36.24220375	1.11473647	5.49383766	67.7736474	1274856
	2016	20.3048473	6943	0.58463746	36.27863048	1.19984757	5.50373365	67.7947418	1274257
	2017	20.3374638	7785	0.58736483	36.30273957	1.22493850	5.55276484	67.8028834	1416432
	2018	20.3673648	8332	0.59364638	36.32765037	1.27039486	5.58737347	67.8172368	1416564
Cigereleng	2014	0.85027051	10896	6.51189311	61.84354236	1.84996476	3.11770336	95.7442743	2779162
	2015	0.87364366	11235	6.52038465	61.86736737	1.85397365	3.18372375	95.7648374	2779176
	2016	0.89474636	11798	6.56384625	61.90283323	1.91458474	3.20388374	95.7748374	2779198

Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
	2017	0.92736484	12281	6.59374635	61.94736574	1.97999375	3.26373937	95.7943773	2925152
	2018	0.95374644	12327	6.63826383	61.96736358	1.99210284	3.29834726	95.8034848	2925287
Cisereuh	2014	1.15551094	15270	7.32465005	36.25383401	11.1198401	4.61765565	93.5599005	802453
	2015	1.18374636	15763	7.33083846	36.27736365	11.1599384	4.63763894	93.5648364	802123
	2016	1.19384736	16142	7.33746297	36.30283627	11.2133848	4.66374395	93.5873641	802196
	2017	1.22273647	16897	7.36483649	36.32636326	11.2488273	4.70285375	93.5937472	916176
	2018	1.24837465	17326	7.38374738	36.37635365	11.2928374	4.73673937	93.6038434	916254
Pasirluyu	2014	4.28196763	13126	19.7385808	61.60498702	2.05058961	1.71796700	81.7028314	916203
	2015	4.30484759	13784	19.7402837	61.63746948	2.09061489	1.75376304	81.7374915	916307
	2016	4.32837467	14089	19.7473649	61.66836317	2.11065395	1.78383663	81.7647379	916419
	2017	4.35746365	14762	19.7503847	61.68373627	2.17061726	1.80383874	81.7877491	1032176
	2018	4.36483764	15201	19.7553746	61.70283764	2.20068837	1.81728205	81.7918446	1032198
Pungkur	2014	0.10037879	6014	0.00019284	29.73920034	2.44335095	6.72827865	98.1537467	1147203
	2015	0.10038065	6997	0.00020193	29.78374677	2.48383644	6.73437464	98.1736838	1147306
	2016	0.10040385	7138	0.00025968	29.80283638	2.51453746	6.78393467	98.1806476	1147376
	2017	0.10043746	7786	0.00026384	29.82736477	2.55686383	6.80383538	98.1903848	1274165
	2018	0.10046363	8762	0.00030484	29.85863575	2.59007385	6.81782364	98.2038480	1274233

Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
Binong	2014	1.47020957	12678	0.52998733	42.38210121	2.05629607	5.80383609	87.0764583	916103
	2015	1.49347463	13021	0.53384739	42.40384037	2.10680494	5.84367644	87.0776356	916156
	2016	1.50384745	13882	0.53548268	42.42736385	2.15748573	5.87838387	87.0784992	916203
	2017	1.52763644	14672	0.54028375	42.47363857	2.27753747	5.89368994	87.0793747	1032102
	2018	1.53746343	15518	0.54537463	42.49374264	2.29784837	5.90936476	87.0818273	1032205
Cibangkong	2014	0.45565110	15002	0.00011028	37.81678356	1.54064406	10.0364908	94.2407484	802102
	2015	0.47636488	15783	0.00016482	37.83847647	1.59694736	10.0637838	94.2537648	802111
	2016	0.49384363	16234	0.00020383	37.87276386	1.61076484	10.1028837	94.2738478	802233
	2017	0.51726383	16946	0.00025373	37.90283739	1.64083493	10.1639984	94.2938437	1032103
	2018	0.53726373	17608	0.00029373	37.94236386	1.69088347	10.2743847	94.3084844	1032323
Gumuruh	2014	4.23573648	15998	3.80051987	75.38330666	6.85833781	5.06324606	93.8938488	2508415
	2015	4.26384664	16896	3.80052039	75.40384058	6.89047385	5.10284847	93.9184788	2508422
	2016	4.28394736	17021	3.80059326	75.43746735	6.91254738	5.12348368	93.9374847	2508145
	2017	4.30483745	17752	3.80060383	75.46537374	6.93664837	5.15373576	93.9534873	3124132
	2018	4.32763645	18564	3.80062736	75.48377485	6.95274837	5.20386484	93.9691726	3125315
Kacaping	2014	1.06803172	6126	0.00014254	33.28623960	10.3166264	9.73655310	60.7837840	3143254
	2015	1.08374637	6779	0.00019264	33.30766548	10.3674484	9.77387338	60.8038483	3143524



Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
	2016	1.09473634	7302	0.00022375	33.33647564	10.4078473	9.80283645	60.8183748	3152150
	2017	1.12837644	7885	0.00025385	33.36657355	10.4280485	9.86378365	60.8463826	3375225
	2018	1.13464764	8123	0.00029365	33.38746675	10.4884485	9.88377365	60.8758374	3375535
Kebongedang	2014	0.00012406	8896	0.11212465	19.02044624	0.21446804	0.51775810	94.2103451	1147155
	2015	0.00014365	9037	0.16823637	19.02384726	0.22851028	0.55372839	94.2374611	1147235
	2016	0.00017484	9764	0.19273725	19.02763747	0.26957878	0.58373948	94.2538741	1147355
	2017	0.00020375	10482	0.22382683	19.02926635	0.30834636	0.59373035	94.2749381	1274394
	2018	0.00026355	11110	0.28374733	19.03048365	0.34544858	0.61822496	94.2949841	1274455
Kebonwaru	2014	0.57277129	12645	27.4469760	30.31825071	22.1165085	4.53696424	94.4358376	916254
	2015	0.57635473	13007	14.1001332	30.32038846	22.1769846	4.57363275	79.5001310	916335
	2016	0.57838463	13768	14.1020383	30.32537455	22.2073497	4.59374185	79.5283742	916445
	2017	0.58038473	14652	14.1073638	30.32837754	22.2676478	4.64048399	79.5393723	1032435
	2018	13.9196140	15382	14.1102836	30.33028387	22.3177478	4.67363638	79.5537648	1032453
Maleer	2014	4.85110743	9562	0.58592303	36.68557650	1.09224886	1.24235834	86.6029064	916486
	2015	4.86353472	10271	0.60384728	36.68937644	1.10372637	1.37466375	86.6236302	916493
	2016	4.89638264	10945	0.62837496	36.69182735	1.15646573	1.46367484	86.6463631	916523
	2017	4.92836358	11732	0.66832837	36.69374644	1.18756538	1.57238474	86.6636427	1032352

Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
	2018	4.94635457	12355	0.70283737	36.69683783	1.19886376	1.63447935	86.6838743	1032424
Samoja	2014	0.51191627	14479	0.00012938	26.68765828	2.47532858	3.29776737	96.8938482	802154
	2015	0.52536446	14652	0.00016048	26.68937636	2.50833848	3.37298938	96.9183783	802225
	2016	0.53048349	14723	0.00019756	26.69182736	2.53034837	3.40283294	96.9384735	802285
	2017	0.53263546	14896	0.00020365	26.69372637	2.55335049	3.42763704	96.9583746	916314
	2018	0.54037468	15163	0.00025345	26.69627635	2.60836577	3.46738193	96.9658638	916331
Cikawao	2014	0.12301250	5221	0.00011928	25.50885110	3.69196391	6.78374743	99.5473646	1247144
	2015	0.15372635	5873	0.00015646	25.50934737	3.70207464	6.83764535	99.5637460	1247186
	2016	0.16383624	6653	0.00017947	25.50962635	3.75268498	6.90764494	99.5738760	1274243
	2017	0.20383644	7012	0.00021756	25.50986355	3.77319488	6.94362504	99.5987561	1416251
	2018	0.22365744	7973	0.00024643	25.50996453	3.81363398	6.99516276	99.6062366	1416266
Paledang	2014	0.04128212	3564	0.00010294	20.23337143	0.85075130	14.6584545	98.6049547	1573115
	2015	0.04532638	4027	0.00016627	20.23843648	0.89187375	14.6625384	98.6283746	1573132
	2016	0.05386395	4789	0.00018836	20.24052736	0.92192483	14.6838736	98.6476389	1573246
	2017	0.05638469	5478	0.00020145	20.24562837	0.95498385	14.7038373	98.6664948	1722143
	2018	0.06347349	6130	0.00023533	20.24673647	0.96819385	14.7273893	98.6953746	1722234
Burangrang	2014	0.87197099	7005	0.00013746	30.42598851	3.58272734	11.3485884	98.0568969	1274335

Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
	2015	0.87474847	7784	0.00016254	30.42935476	3.67339488	11.3736733	98.0589034	1274346
	2016	0.87736478	8539	0.00017274	30.43226355	3.75495858	11.3938384	98.0603849	1274368
	2017	0.88027366	9102	0.00020274	30.43536473	3.81583749	11.4038483	98.0618279	1416122
	2018	0.99304867	9839	0.00021385	30.43837466	3.94586476	11.4736338	98.0652739	1416135
Malabar	2014	2.00571466	5655	0.22395935	37.41997892	7.37573752	21.3473799	96.8927362	3745422
	2015	2.00645376	6075	0.25566254	37.42238375	7.39940576	21.3847347	96.9283763	3745465
	2016	2.00667486	6802	0.27547385	37.42639385	7.40047576	21.4038494	96.9476346	3745515
	2017	2.00705858	7502	0.29637484	37.42938464	7.41297274	21.4364384	96.9637646	4605204
	2018	2.00756385	8012	0.30273936	37.43271928	7.45027376	21.4726274	96.9766837	4605286
Lingkar Selatan	2014	1.80283776	7473	0.00039895	19.55776655	7.03497653	10.5688022	97.8647417	1862233
	2015	1.85374638	7984	0.00040927	19.57388763	7.10248748	10.5728367	97.8839744	1862265
	2016	1.93746825	8502	0.00045183	19.59377393	7.11347365	10.5937429	97.8937443	1862312
	2017	1.97372638	9252	0.00048927	19.60280283	7.23484634	10.6176348	97.9038444	2176325
	2018	1.99967895	9879	0.00052363	19.64816254	7.26182838	10.6387457	97.9245736	2176421
Turangga	2014	3.31982801	10562	0.00127365	112.9140489	18.3273931	19.1786254	96.9372632	2925226
	2015	3.32037473	11236	0.00139284	112.9171028	18.3784847	19.1937333	96.9483742	2925232
	2016	3.32583750	11872	0.00145273	112.9192736	18.3972374	19.2037483	96.9636429	2925246

Kelurahan	Tahun	RTH (ha)	Jumlah Penduduk (ribu)	Industri (ha)	Permukiman (ha)	Fasilitas Umum (ha)	Perdagangan dan Jasa (ha)	Kepadatan Bangunan (%)	Harga Lahan (Rp/m <sup>2</sup> )
	2017	3.32849478	12176	0.00151264	112.9213172	18.4294278	19.2376438	96.9748733	3745422
	2018	3.33048374	12720	0.00162836	112.9234283	18.4514856	19.2638338	96.9931263	3745511
Cijagra	2014	5.35652797	8103	5.88388801	83.17010317	6.07435402	9.03181915	93.6947567	3132422
	2015	5.36048574	8529	5.89632736	83.18328375	6.07563449	9.05746275	93.7172389	3132479
	2016	5.36373646	9092	5.90101274	83.18636254	6.08344758	9.07387486	93.7336493	3132521
	2017	5.37086957	9987	5.93524187	83.19146569	6.08977488	9.09373439	93.7537640	3745243
	2018	5.37586767	10645	5.95622637	83.19657688	6.09021479	9.10373238	93.7721038	3745333

## Lampiran E

### Proses Analisis Sasaran 2

#### **1. Common Effect Model (CEM)**

Dependent Variable: LOG(RTH?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/12/20 Time: 23:32

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JP?)	0.283099	0.437476	0.647118	0.5187
LOG(IND?)	0.052602	0.046267	1.136920	0.2576
LOG(PERKIM?)	1.755095	0.475222	3.693209	0.0003
LOG(FASUM?)	0.801472	0.180333	4.444409	0.0000
LOG(PERJAS?)	0.741733	0.253164	2.929857	0.0040
LOG(KPDTN?)	-3.323173	1.248099	-2.662588	0.0087
LOG(HRG?)	0.236055	0.283410	0.832912	0.4064
R-squared	0.569479	Mean dependent var		-0.410059
Adjusted R-squared	0.550057	S.D. dependent var		2.633166
S.E. of regression	1.766269	Akaike info criterion		4.024322
Sum squared resid	414.9207	Schwarz criterion		4.171404
Log likelihood	-274.7025	Hannan-Quinn criter.		4.084092
Durbin-Watson stat	0.068309			

#### **2. Fixed Effect Model (FEM)**

Dependent Variable: LOG(RTH?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/12/20 Time: 23:35

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (balanced) observations: 140

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.88859	32.00292	0.527720	0.5988
LOG(JP?)	0.465544	0.082011	5.676567	0.0000
LOG(IND?)	0.063993	0.018167	3.522537	0.0006
LOG(PERKIM?)	2.431113	4.359273	0.557688	0.5782
LOG(FASUM?)	0.330679	0.036763	8.994820	0.0000
LOG(PERJAS?)	0.210498	0.145583	1.445900	0.1512
LOG(KPDTN?)	-6.654030	6.479096	-1.027000	0.3068
LOG(HRG?)	-0.090123	0.046852	-1.923556	0.0571
Fixed Effects (Cross)				
_BABAKANSURABAYA				
--C	-1.021527			
_KEBONJAYANTI--C	-5.710890			
_CICAHEUM--C	-0.634952			
_BABAKANSARI--C	-1.478870			
_KEBONKANGKUNG--				
C	1.374321			
_SUKAPURA--C	-1.823753			
_ANCOL--C	-0.364786			
_BALONGGEDE--C	1.389795			
_CIATEUL--C	2.224306			
_CIGERELENG--C	-0.271807			
_CISEREUH--C	0.227656			
_PASIRLUYU--C	0.089474			
_PUNGKUR--C	0.027258			
_BINONG--C	0.341571			
_CIBANGKONG--C	0.444283			
_GUMURUH--C	0.008456			
_KACAPIRING--C	-1.481068			
_KEBONGEDANG--C	-4.807229			
_KEBONWARU--C	-0.471904			
_MALEER--C	2.448538			
_SAMOJA--C	1.669928			
_CIKAWAO--C	0.972307			
_PALEDANG--C	0.754690			
_BURANGRANG--C	1.881501			

_MALABAR--C	1.481126
_LINGKARSELATAN--C	3.463625
_TURANGGA--C	-0.916936
_CIJAGRA--C	0.184887

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---



---

Weighted Statistics

---



---

R-squared	0.999850	Mean dependent var	-2.886976
Adjusted R-squared	0.999802	S.D. dependent var	21.11392
S.E. of regression	0.298043	Sum squared resid	9.327118
F-statistic	20644.81	Durbin-Watson stat	1.354969
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Unweighted Statistics

---



---

R-squared	0.982039	Mean dependent var	-0.410059
Sum squared resid	17.31023	Durbin-Watson stat	1.682413

---



---

### 3. *Random Effect Model (REM)*

Dependent Variable: LOG(RTH?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/12/20 Time: 23:39

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (balanced) observations: 140

Swamy and Arora estimator of component variances

---



---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.713390	11.13341	0.872454	0.3845
LOG(JP?)	0.690573	0.371756	1.857597	0.0655
LOG(IND?)	0.050128	0.100051	0.501024	0.6172

---



---

LOG(PERKIM?)	1.712977	0.865172	1.979927	0.0498
LOG(FASUM?)	0.542609	0.309612	1.752547	0.0820
LOG(PERJAS?)	0.973144	0.499135	1.949661	0.0533
LOG(KPDTN?)	-5.169283	2.027050	-2.550151	0.0119
LOG(HRG?)	-0.126965	0.412883	-0.307509	0.7589
Random Effects (Cross)				
_BABAKANSURABAYA				
--C	-0.857841			
_KEBONJAYANTI--C	-4.658650			
_CICAHEUM--C	-1.774734			
_BABAKANSARI--C	-0.624171			
_KEBONKANGKUNG--				
C	1.560846			
_SUKAPURA--C	-0.947525			
_ANCOL--C	0.810429			
_BALONGGEDE--C	0.126895			
_CIATEUL--C	2.876305			
_CIGERELENG--C	0.525461			
_CISEREUH--C	-0.095010			
_PASIRLUYU--C	1.473017			
_PUNGKUR--C	-0.421864			
_BINONG--C	0.410314			
_CIBANGKONG--C	-0.182563			
_GUMURUH--C	0.254502			
_KACAPIRING--C	-1.673051			
_KEBONGEDANG--C	-3.109682			
_KEBONWARU--C	-0.808886			
_MALEER--C	3.648323			
_SAMOJA--C	1.492784			
_CIKAWAO--C	0.311823			
_PALEDANG--C	-0.251982			
_BURANGRANG--C	0.922717			
_MALABAR--C	0.261107			
_LINGKARSELATAN--				
C	2.122085			
_TURANGGA--C	-1.641385			
_CIJAGRA--C	0.250735			

---

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.861206	0.9557

---



Idiosyncratic random 0.400672 0.0443

Weighted Statistics

R-squared	0.253898	Mean dependent var	-0.039296
Adjusted R-squared	0.214332	S.D. dependent var	0.447457
S.E. of regression	0.396617	Sum squared resid	20.76425
F-statistic	6.417067	Durbin-Watson stat	1.368016
Prob(F-statistic)	0.000002		

Unweighted Statistics

R-squared	0.569202	Mean dependent var	-0.410059
Sum squared resid	415.1882	Durbin-Watson stat	0.068417

**4. Uji Chou**

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: PANEL\_DATA

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7388.815297	(27,105)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(RTH?)

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/12/20 Time: 23:43

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (balanced) observations: 140

Use pre-specified GLS weights

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.25844	11.24637	1.623496	0.1069

LOG(JP?)	-0.750301	0.553165	-1.356379	0.1773
LOG(IND?)	-0.175749	0.028048	-6.266015	0.0000
LOG(PERKIM?)	2.507445	0.517272	4.847442	0.0000
LOG(FASUM?)	1.461112	0.125170	11.67299	0.0000
LOG(PERJAS?)	-0.355277	0.243979	-1.456176	0.1477
LOG(KPDTN?)	-5.570328	2.102124	-2.649857	0.0090
LOG(HRG?)	0.208765	0.392972	0.531247	0.5961

---



---

Weighted Statistics

---



---

R-squared	0.715677	Mean dependent var	-2.886976
Adjusted R-squared	0.700599	S.D. dependent var	21.11392
S.E. of regression	11.58979	Sum squared resid	17730.67
F-statistic	47.46576	Durbin-Watson stat	0.005374
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Unweighted Statistics

---



---

R-squared	0.453500	Mean dependent var	-0.410059
Sum squared resid	526.6976	Durbin-Watson stat	0.060973

---



---

## 5. *Uji Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: PANEL\_DATA

Test cross-section random effects

---



---

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.341334	7	0.0000

---



---

Cross-section random effects test comparisons:

---



---

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(JP?)	1.059125	0.690573	0.171445	0.3734
LOG(IND?)	0.088370	0.050128	0.090067	0.8986

LOG(PERKIM?)	2.846788	1.712977	3974.813113	0.9857
LOG(FASUM?)	0.240594	0.542609	0.194658	0.4936
LOG(PERJAS?)	-0.036150	0.973144	2.259168	0.5019
LOG(KPDTN?)	-4.375176	-5.169283	4.681729	0.7136
LOG(HRG?)	-0.286725	-0.126965	0.135912	0.6648

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(RTH?)

Method: Panel Least Squares

Date: 07/12/20 Time: 23:41

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.895271	230.5135	0.012560	0.9900
LOG(JP?)	1.059125	0.556460	1.903326	0.0597
LOG(IND?)	0.088370	0.316350	0.279344	0.7805
LOG(PERKIM?)	2.846788	63.05205	0.045150	0.9641
LOG(FASUM?)	0.240594	0.538997	0.446374	0.6562
LOG(PERJAS?)	-0.036150	1.583763	-0.022825	0.9818
LOG(KPDTN?)	-4.375176	2.964904	-1.475655	0.1430
LOG(HRG?)	-0.286725	0.553520	-0.518002	0.6055

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.982510	Mean dependent var	-0.410059
Adjusted R-squared	0.976846	S.D. dependent var	2.633166
S.E. of regression	0.400672	Akaike info criterion	1.220973
Sum squared resid	16.85653	Schwarz criterion	1.956384
Log likelihood	-50.46811	Hannan-Quinn criter.	1.519822
F-statistic	173.4803	Durbin-Watson stat	1.655388
Prob(F-statistic)	0.000000		

## 6. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: LOG(RESID?^2)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/12/20 Time: 23:44

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (balanced) observations: 140

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-929.0100	1015.068	-0.915219	0.3622
LOG(JP?)	-6.756572	2.816515	-2.398912	0.1182
LOG(IND?)	0.677576	1.404048	0.482587	0.6304
LOG(PERKIM?)	271.0767	278.0376	0.974964	0.3318
LOG(FASUM?)	-0.320575	3.049928	-0.105109	0.9165
LOG(PERJAS?)	-3.595701	7.102713	-0.506243	0.6137
LOG(KPDTN?)	-20.94351	9.241132	-2.266336	0.1255
LOG(HRG?)	5.817560	2.814248	2.067181	0.1412
Fixed Effects (Cross)				
_BABAKANSURABAYA				
--C	-70.74795			
_KEBONJAYANTI--C	131.5183			
_CICAHEUM--C	-65.25374			
_BABAKANSARI--C	-224.5239			
_KEBONKANGKUNG--				
C	46.62612			
_SUKAPURA--C	-166.0619			
_ANCOL--C	-143.8023			
_BALONGGEDE--C	119.2821			
_CIATEUL--C	22.40936			
_CIGERELENG--C	-124.0203			
_CISEREUH--C	30.14641			
_PASIRLUYU--C	-121.5172			
_PUNGKUR--C	89.05046			
_BINONG--C	-10.05653			
_CIBANGKONG--C	29.58680			
_GUMURUH--C	-173.5906			
_KACAPIRING--C	45.01418			
_KEBONGEDANG--C	200.0086			

_KEBONWARU--C	85.00073
_MALEER--C	24.01286
_SAMOJA--C	120.0983
_CIKAWAO--C	133.2749
_PALEDANG--C	191.7547
_BURANGRANG--C	85.54016
_MALABAR--C	20.15754
_LINGKARSELATAN-- C	200.8368
_TURANGGA--C	-272.4663
_CIJAGRA--C	-202.2776

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---



---

Weighted Statistics

---



---

R-squared	0.849126	Mean dependent var	-10.23719
Adjusted R-squared	0.800272	S.D. dependent var	6.008308
S.E. of regression	2.708969	Sum squared resid	770.5437
F-statistic	17.38080	Durbin-Watson stat	2.470557
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Unweighted Statistics

---



---

R-squared	0.570867	Mean dependent var	-7.636521
Sum squared resid	772.2756	Durbin-Watson stat	2.618279

---



---

## 7. Uji Multikolinierita

	_BABAKAN	_KEBONJA	_CICAHEU	_BABAKAN	_KEBONKA	_SUKAPUR	_ANCOL	_BALONGC	_CIATEUL	_CIGERELE	_CISEREUH	_PASIRLUY	_PUNGKUF	_BINONG	_CIBANGK	_GUMURU	_KACAPIRII	_KEBONGE	_KEBONW	_MALEER	_SAMOJA	_CIKAWAO	_PALEDAN	_BURANGF	_MALABAF	_LINGKARS	_TURANGC	_CIJAGRA
_BABAKAN	1	-0.03383	0.341506	-0.70935	0.308544	0.188491	0.729147	0.868455	-0.54364	0.504075	0.897232	0.823998	0.876817	-0.35057	0.139939	0.140097	-0.13604	0.470664	0.757256	0.333237	0.644343	-0.1621	-0.68312	0.165975	0.653549	-0.13228	0.810323	0.807202
_KEBONJA	-0.03383	1	-0.6103	-0.12967	-0.52662	0.963914	-0.04075	0.455466	-0.40352	-0.12191	0.338735	0.471486	0.386115	0.350046	0.770144	-0.46313	0.132229	-0.18718	0.124237	0.915587	-0.4602	-0.22518	0.329236	0.665496	-0.34582	0.528291	0.056682	-0.321273
_CICAHEU	0.341506	-0.6103	1	-0.62013	0.900661	-0.60429	-0.18266	0.078782	-0.05134	0.821306	0.238987	-0.09079	-0.082	-0.33964	-0.60386	-0.30742	0.530042	0.887664	0.071504	-0.32033	0.931445	-0.02504	-0.24054	0.17694	0.912511	-0.46935	0.005491	0.821453
_BABAKAN	-0.70935	-0.12967	-0.62013	1	-0.47601	-0.22471	-0.04834	-0.76001	0.717968	-0.80256	-0.8046	-0.65248	-0.53155	0.01299	-0.17823	0.509594	-0.59727	-0.88467	-0.33135	-0.49414	-0.81289	0.463347	0.138892	-0.69617	-0.86124	-0.0767	-0.50233	-0.84912
_KEBONKA	0.308544	-0.52662	0.900661	-0.47601	1	-0.5614	-0.04071	0.077044	0.246797	0.875079	0.278926	-0.17861	0.001458	-0.6773	-0.77299	-0.35327	0.327935	0.778377	0.335433	-0.27567	0.800553	0.380032	-0.47302	0.175333	0.820917	-0.77229	-0.21185	0.760661
_SUKAPUR	0.188491	0.963914	-0.60429	-0.22471	-0.5614	1	0.168143	0.624154	-0.55377	-0.12852	0.492086	0.673902	0.577479	0.340809	0.858517	-0.3044	0.023712	-0.17452	0.250699	0.945412	-0.37079	-0.3187	0.19271	0.599114	-0.27208	0.573771	0.31375	-0.1986
_ANCOL	0.729147	-0.04075	-0.18266	-0.04834	-0.04071	0.168143	1	0.558525	-0.07	-0.03643	0.554952	0.577092	0.792857	-0.51812	0.073166	0.604	-0.77204	-0.20352	0.824853	0.117226	0.07041	0.27116	-0.84315	-0.33891	0.06008	-0.26954	0.62187	0.294996
_BALONGC	0.868455	0.455466	0.078782	-0.76001	0.077044	0.624154	0.558525	1	-0.70615	0.463201	0.977628	0.952349	0.942094	-0.12692	0.481761	-0.18626	0.04153	0.413719	0.705655	0.75667	0.410762	-0.28485	-0.40905	0.543014	0.479515	0.139023	0.72279	0.608667
_CIATEUL	-0.54364	-0.40352	-0.05134	0.717968	0.246797	-0.55377	-0.07	-0.70615	1	-0.16311	-0.59641	-0.81732	-0.51112	-0.56529	-0.75612	0.178879	-0.40325	-0.3796	-0.61974	-0.33242	0.879745	-0.2336	-0.5133	-0.34172	-0.70918	-0.77471	-0.36972	
_CIGERELE	0.504075	-0.12191	0.821306	-0.80256	0.875079	-0.12852	-0.03643	0.463201	-0.16311	1	0.61821	0.211725	0.294931	-0.47752	-0.37762	-0.61791	0.53808	0.931211	0.432378	0.198638	0.846047	0.088975	-0.35328	0.588818	0.912645	-0.47809	0.013723	0.861911
_CISEREUH	0.897232	0.338735	0.238987	-0.8046	0.278926	0.492086	0.554952	0.977628	-0.59641	0.61821	1	0.873739	0.919851	-0.29596	0.292095	-0.24178	0.071336	0.533088	0.778408	0.673879	0.536881	-0.15231	-0.5197	0.546635	0.610198	-0.0535	0.636093	0.728406
_PASIRLUY	0.823998	0.471486	-0.09079	-0.65248	-0.17861	0.673902	0.577092	0.952349	-0.81732	0.211725	0.873739	1	0.90975	0.09865	0.667056	0.002172	-0.04246	0.234722	0.558631	0.727955	0.272517	-0.46846	-0.2817	0.4072	0.311802	0.372977	0.862508	0.456748
_PUNGKUF	0.876817	0.386115	-0.08200	-0.53155	0.001458	0.577479	0.792857	0.942094	-0.51112	0.294931	0.919851	0.90975	1	-0.29974	0.404402	0.07279	-0.29218	0.171804	0.848712	0.643013	0.254724	-0.0617	-0.61308	0.288386	0.310963	-0.00046	0.723502	0.498415
_BINONG	-0.35057	0.350046	-0.33964	0.01299	-0.6773	0.340809	-0.51812	-0.12692	-0.56529	-0.47752	-0.29596	0.09865	-0.29974	1	0.707425	-0.08355	0.40998	-0.17563	-0.75392	0.21723	-0.30767	-0.84507	0.875678	0.178387	-0.34116	0.949647	0.182242	-0.42967
_CIBANGK	0.139939	0.770144	-0.60386	-0.17823	-0.77299	0.858517	0.073166	0.481761	-0.75612	-0.37762	0.292095	0.667056	0.404402	0.707425	1	-0.04706	0.06498	-0.24634	-0.09039	0.73783	-0.35792	-0.69291	0.423726	0.374338	-0.32758	0.889722	0.533188	-0.26958
_GUMURU	0.140097	-0.46313	-0.30742	0.509594	-0.35327	-0.3044	0.604	-0.18626	0.178879	-0.61791	-0.24178	0.002172	0.07279	-0.08355	-0.04706	1	-0.81735	-0.5965	0.082928	-0.52139	-0.23676	0.104159	-0.3772	-0.90898	-0.35305	-0.03167	0.396772	-0.20002
_KACAPIRII	-0.13604	0.132229	0.530042	-0.59727	0.327935	0.023712	-0.77204	0.04153	-0.40325	0.53808	0.071336	-0.04246	-0.29218	0.40998	0.06498	-0.81735	1	0.721668	-0.44733	0.235144	0.451235	-0.51151	0.592034	0.725616	0.492559	0.270476	-0.18204	0.296789
_KEBONGE	0.470664	-0.18718	0.887664	-0.88467	0.778377	-0.17452	-0.20352	0.413719	-0.3796	0.931211	0.533088	0.234722	0.171804	-0.17563	-0.24634	-0.5965	0.721668	1	0.166659	0.144663	0.919652	-0.23888	-0.1163	0.587401	0.953864	-0.21894	0.142444	0.866876
_KEBONW	0.757256	0.124237	0.071504	-0.33135	0.335433	0.250699	0.824853	0.705655	-0.01389	0.432378	0.778408	0.558631	0.848712	-0.75392	-0.09039	0.082928	-0.44733	0.166659	1	0.35163	0.281043	0.451523	-0.88722	0.110597	0.344658	-0.51525	0.360718	0.523423
_MALEER	0.333237	0.915587	-0.32033	-0.49414	-0.27567	0.945412	0.117226	0.75667	-0.61974	0.198638	0.673879	0.727955	0.643013	0.21723	0.73783	-0.52139	0.235144	0.144663	0.35163	1	-0.08561	-0.31936	0.114352	0.799903	0.032552	0.439426	0.310615	0.080203
_SAMOJA	0.644343	-0.4602	0.931445	-0.81289	0.800553	-0.37079	0.07041	0.410762	-0.33242	0.846047	0.536881	0.272517	0.254724	-0.30767	-0.35792	-0.23676	0.451235	0.919652	0.281043	-0.08561	1	-0.18389	-0.36628	0.262181	0.9883	-0.33226	0.342305	0.961498
_CIKAWAO	-0.1621	-0.22518	-0.02504	0.463347	0.380032	-0.3187	0.27116	-0.28485	0.879745	0.088975	-0.15231	-0.46846	-0.0617	-0.84507	-0.69291	0.104159	-0.51151	-0.23888	0.451523	-0.31936	-0.18389	1	-0.58071	-0.31821	-0.14811	-0.86105	-0.57282	-0.10099
_PALEDAN	-0.68312	0.329236	-0.24054	0.138892	-0.47302	0.19271	-0.84315	-0.40905	-0.2336	-0.35328	-0.5197	-0.2817	-0.61308	0.875678	0.423726	-0.3772	0.592034	-0.1163	-0.88722	0.114352	-0.36628	-0.58071	1	0.286618	-0.36947	0.724139	-0.29779	-0.54219
_BURANGF	0.165975	0.665496	0.17694	-0.69617	0.175333	0.599114	-0.33891	0.543014	-0.5133	0.588818	0.546635	0.4072	0.288386	0.178387	0.374338	-0.90898	0.725616	0.587401	0.110597	0.799903	0.262181	-0.31821	0.286618	1	0.384926	0.245314	-0.01405	0.302892
_MALABAF	0.653549	-0.34582	0.912511	-0.86124	0.820917	-0.27208	0.06008	0.479515	-0.34172	0.912645	0.610198	0.311802	0.310963	-0.34116	-0.32758	-0.35305	0.492559	0.953864	0.344658	0.032552	0.9883	-0.14811	-0.36947	0.384926	1	-0.34719	0.301588	0.971081
_LINGKARS	-0.13228	0.528291	-0.46935	-0.0767	-0.77229	0.573771	-0.26954	0.139023	-0.70918	-0.47809	-0.0535	0.372977	0.00046	0.949647	0.889722	-0.03167	0.270476	-0.21894	-0.51525	0.439426	-0.33226	-0.86105	0.724139	0.245314	-0.34719	1	0.39146	-0.37183
_TURANGC	0.810323	0.056682	0.005491	-0.50233	-0.21185	0.31375	0.62187	0.72279	-0.77471	0.013723	0.636093	0.862508	0.723502	0.182242	0.533188	0.396772	-0.18204	0.142444	0.360718	0.310615	0.342305	-0.57282	-0.29779	-0.01405	0.301588	0.39146	1	0.454096
_CIJAGRA	0.807202	-0.32173	0.821453	-0.84912	0.760661	-0.1986	0.294996	0.608667	-0.36972	0.861911	0.728406	0.456748	0.498415	-0.42967	-0.26958	-0.20002	0.296789	0.866876	0.523423	0.080203	0.961498	-0.10099	-0.54219	0.302892	0.971081	-0.37183	0.454096	1

*“Halaman ini Sengaja dikosongkan”*





## BIODATA PENULIS



Penulis dengan nama Nadhila Wahyuningtyas lahir di Bekasi, 14 Agustus 1997. Terlahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD Taruna Bakti Bandung, SMP Taruna Bakti Bandung, dan SMA Taruna Bakti Bandung. Kemudian, penulis melanjutkan studinya pada perguruan tinggi negeri di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, tepatnya pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSPK tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa di ITS, penulis aktif dalam organisasi mahasiswa diantara menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Arsitektur Desain dan Percenanaan (BEM FADP) ITS pada tahun 2018 – 2020 sebagai staff dan staff ahli departemen dalam negeri dan Himpunan Mahasiswa Planologi (HMPL) ITS pada tahun 2017 – 2019 sebagai staff dan staff ahli departemen kewirausahaan. Penulis juga melalui masa-masa perkuliahan dengan mengikuti berbagai kegiatan untuk menunjang *softskill* yang dimiliki salah satunya mengikuti berbagai macam kegiatan kepanitiaan yang diselenggarakan oleh BEM ITS, BEM FADP ITS, dan HMPL ITS. Keterkaitan penulis terhadap perencanaan perkotaan membawa penulis menyusun tugas akhir berjudul “Analisis Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan RTH Publik di SWK Karees, Kota Bandung”.

Untuk diskusi lebih lanjut dapat menghubungi penulis pada email [nadh.wahyuningtyas@gmail.com](mailto:nadh.wahyuningtyas@gmail.com)